

INDONESIA
ECONOMIC
QUARTERLY

Juli 2014

Pilihan sulit



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Pilihan sulit

Juli 2014

Kata pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly/IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan *IEQ* ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

IEQ merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomic and Fiscal Management Global Practice*, dibawah bimbingan Shubham Chaudhuri, *Practice Manager*, Ndiame Dip, *Lead Economist*, dan Ashley Taylor, *Senior Economist*. Tim utama penyusun laporan ini dipimpin oleh Alex Sienaert, *Country Economist* dan bertanggung jawab di bagian A, pengeditan dan produksi, tim inti terdiri dari Arsianti, Magda Adriani, Masyita Crystallin, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Yus Medina, Elitza Mileva (memimpin Bagian A), Michele Savini Zangrandi dan Violeta Vulovic dengan bantuan sebagian pengeditan oleh Peter Milne. Laporan ini diterjemahkan oleh Nicolas Noviyanto dan diedit oleh Eva Muchtar. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto. Diseminasi dilakukan oleh Farhana Asap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Desy Mutialim dan Nugroho Sunjoyo dibawah bimbingan Dini Sari Djalal.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Alex Sienart (Bagian B.1, ICP 2011), Magda Adriani, Mubariq Ahmad, Iwan Gunawan dan Paul van Howagen (Bagian B.2, Kebakaran Hutan dan El Nino), Vivi Alatas, Edgar Janz and Matthew Grant Wai-Poi (Bagian C.1 Ketimpangan/*Inequality*). Masukan utama juga diterima dari Mark Ahern, Enda Ginting, Grace Hadiwidjaja, Amri Ilmma, Taufik Indrakesuma, Puguh Imanto, The Fei Ming, Liliana Olarte, Cindy Paladines, Anh Nguyet Pham, Carlos Pinerua, Astrid Rengganis Savitri, Djauhari Sitorus and Daim Syukriyah. Laporan ini juga mendapat tambahan masukan yang penting dari Ernest Bethe, Michael Brady, Jim Brumby, Cristobal Ridao-Cano, Werner Kornexl, Yue Man Lee, Azrin Rasuwin, Rinsan Tobing dan George Henry Stirrett Wood. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Neil McCulloch dan David Gottlieb dari *Department of Foreign Affairs and Trade* untuk masukan di bagian *Inequality*, dan Dody Ruswandi and Harmensyah (BNPB), William Sabandar (BPRED), Dedi Hariri (WWF), Dr. Muhammad Evri (BPPT), Suwarsono (LAPAN), Paul Lemaistre (WRI), Rini Octavia, Muhammad Hanifuddin dan Gita Febriyanti untuk masukan di bagian Kebakaran hutan dan El Nino.

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto di bagian Ringkasan Eksekutif, bagian A (Arsianti) dan C merupakan Hak Cipta Bank Dunia dan bagian B merupakan Hak Cipta Dedi Hariri, WWF-Indonesia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi asienaert@worldbank.org.

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF: PILIHAN SULIT	I
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....	1
1. Kondisi pasar keuangan dunia telah membaik namun harga komoditas masih tetap lemah	1
2. Perlambatan pertumbuhan Indonesia didorong oleh lemahnya ekspor bersih	3
3. Inflasi tetap melambat, namun terdapat risiko kenaikan	6
4. Penyesuaian neraca berjalan berlanjut, aliran masuk portofolio angka tertinggi selama dekade	7
5. Harga-harga aset Indonesia menguat namun kondisi kredit mengalami pengetatan.....	12
6. Sektor fiskal terus mengalami tekanan.....	14
7. Laju pengentasan kemiskinan telah melambat.....	22
8. Risiko-risiko fiskal telah menjadi fokus	23
B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA.....	24
1. El Niño, kebakaran hutan dan kabut: Tindakan konkrit yang mendesak untuk dilakukan	24
a. Penyebab utama berulangnya kebakaran lahan dan hutan	24
b. Apa yang mungkin dibawa oleh El Niño di tahun 2014	27
c. Pelajaran dari kebakaran Februari-Maret 2014 di Riau	28
d. Pentingnya lebih banyak tindakan konkrit.....	31
2. Perkiraan baru paritas daya beli yang disesuaikan untuk perekonomian Indonesia	32
a. Hasil untuk Indonesia: 10 Perekonomian Terbesar	33
b. Keterbatasan dan hal-hal yang tidak terungkap oleh data baru.....	34
c. Implikasi bagi para penyusun kebijakan.....	35
C. INDONESIA TAHUN 2015 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN.....	37
1. Ketimpangan dan kesempatan di Indonesia.....	37
a. Sekilas: Peningkatan ketimpangan merupakan hal penting untuk diperhatikan.....	37
b. Ketimpangan di Indonesia tercatat tinggi dan kesenjangan antara kelompok miskin-kaya semakin melebar ...	39
c. Sebagian peningkatan ketimpangan didorong oleh peningkatan ketimpangan upah dan non-upah	41
d. Kesenjangan akses terhadap kesempatan juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan	44
e. Kurangnya perlindungan yang memadai dari guncangan juga mempersulit rumah tangga pada bagian bawah distribusi pendapatan untuk naik	47
f. Ketimpangan dapat mengarah ke penurunan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan konflik	49
g. Kebutuhan untuk bertindak dan sejumlah pesan kebijakan utama.....	50
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Indonesia memerlukan penguatan kembali pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan	I
Gambar 2: Harga komoditas dunia, terutama logam, terus menurun.....	2
Gambar 3: Kondisi kredit internasional telah membaik, dengan penundaan pengetatan likuiditas lebih lanjut untuk saat ini.....	2
Gambar 4: Pertumbuhan PDB riil terus melambat pada kuartal satu tahun 2014.....	3
Gambar 5: ...didorong oleh kontribusi kecil negatif dari perdagangan bersih	3
Gambar 6: Penurunan kegiatan pertambangan dan penggalian berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan pada sisi produksi	4
Gambar 7: Data frekuensi tinggi memberi sinyal beragam terhadap kuartal kedua.....	4
Gambar 8: Tekanan harga tetap terjaga pada kuartal kedua 2014	6
Gambar 9: Keberhasilan panen menurunkan harga beras dalam negeri.....	6
Gambar 10: Neraca berjalan tetap stabil, namun neraca dasar masih tetap negatif	8
Gambar 11: Nilai impor terus melemah, didorong oleh barang modal dan bahan mentah	8
Gambar 12: Komoditas berada di balik perlemahan ekspor... ..	8
Gambar 13: ...dengan volume komoditas turun sebesar 17,3 persen yoy, didorong oleh mineral..	8
Gambar 14: Ekspor manufaktur mencatat peningkatan kecil	9
Gambar 15: Aliran masuk portofolio yang tertinggi selama dekade didorong oleh pinjaman pemerintah dan pulihnya minat terhadap aset-aset EMEs	10
Gambar 16: Peningkatan hutang luar negeri swasta telah mendorong sebagian besar kebutuhan peningkatan pembiayaan luar negeri bruto pada beberapa tahun terakhir	10
Gambar 17: Komoditas utama Indonesia mencatat penurunan harga dan volume ekspor pada kuartal pertama 2014	11
Gambar 18: Provinsi-provinsi yang paling terkait dengan sektor komoditas mencatat perlambatan yang signifikan pada kuartal pertama 2014.....	11
Gambar 19: Perlambatan pertumbuhan simpanan berkontribusi pada perlemahan pertumbuhan kredit	13
Gambar 20: Bank-bank belum sepenuhnya membebaskan peningkatan biaya pendanaan mata uang dalam negeri terhadap para peminjam	13
Gambar 21: Pertumbuhan belanja dan penerimaan nominal telah melambat sejak pertengahan tahun 2012... ..	15
Gambar 22: ...dengan turunnya penerimaan/PDB sebagai pendorong utama peningkatan defisit anggaran 2013	15
Gambar 23: Pelemahan pertumbuhan pendapatan bersifat keseluruhan namun sangat penting termasuk penerimaan migas... ..	16
Gambar 24: ...yang berdampak dari tren penurunan produksi minyak dan fluktuasi harga minyak	16
Gambar 25: Peningkatan pertumbuhan pajak pendapatan non-migas tercatat pada Januari-Mei 2014 dan juga kinerja PPN yang lebih lemah.....	16
Gambar 26: Perbedaan harga BBM bersubsidi dan harga pasar tetap tinggi... ..	17
Gambar 27: ...yang akan meningkatkan belanja subsidi BBM pada tahun 2014.....	17
Gambar 28: ...yang menurunkan kesenjangan harga subsidi yang ada dan menghasilkan penghematan yang besar dibanding skenario tanpa perubahan tarif	18
Gambar 29: Kementerian-kementerian utama menghadapi pemotongan anggaran yang signifikan	19
Gambar 30: Pada tahun 2014 hingga bulan Mei, pencairan belanja inti pemerintah masih tetap rendah	19
Gambar 31: Laju pengentasan kemiskinan pada tiga tahun terakhir adalah yang paling lambat selama satu dekade... ..	22
Gambar 32: ...dan data pasar tenaga kerja terakhir pada Agustus menunjukkan perlambatan pertumbuhan ketenagakerjaan pada tahun 2013.....	22
Gambar 33: Kepadatan <i>hotspot</i> satelit menunjukkan frekuensi kebakaran tahun 2001-10, menurut daerah	25
Gambar 34: Lahan terbakar di Riau menurut penggunaan lahan	28
Gambar 35: Ekonomi Indonesia menurut PPP termasuk sepuluh terbesar... ..	34

Gambar 36: ...namun belanja per kapita menurut PPP masih tetap relatif rendah	34
Gambar 37: Ketimpangan di Indonesia meningkat sejak tahun 2000	40
Gambar 38: Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan kedua tercepat secara regional setelah Cina antara tahun 1990an dan 2000an	41
Gambar 39: Rumah tangga paling kaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang jauh lebih tinggi dibanding rumah tangga yang lebih miskin	42
Gambar 40: Peningkatan ketimpangan konsumsi sebagian disebabkan oleh peningkatan ketimpangan pendapatan tenaga kerja	43
Gambar 41: Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menerima upah yang lebih besar, dan hidup di rumah tangga dengan konsumsi yang lebih besar	44
Gambar 42: Dunia kerja semakin membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi	44
Gambar 43: Terdapat perbedaan mencolok pada akses ke kesempatan hidup bagi anak-anak di Indonesia... ..	45
Gambar 44: ... dan ada kesenjangan yang besar terhadap kesempatan antara anak desa yang lahir pada desil paling miskin dan anak kota yang lahir ke desil paling mampu ...	45
Gambar 45: Sebagian besar anak perdesaan yang tak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi mengalami kekurangan dalam lebih dari satu segi..	46
Gambar 46: Anak-anak dari rumah tangga yang lebih miskin tertinggal dalam kehidupan, namun kesenjangannya telah menyusut	46
Gambar 47: Kesenjangan kesempatan antara rumah tangga perkotaan dan perdesaan menyusut dengan lebih lambat	46
Gambar 48: Tingkat pendaftaran anak yang orangtuanya berpendidikan rendah mulai menyusul... ..	47
Gambar 49: ...dan anak-anak dengan orangtua tanpa pendidikan meraih pendidikan yang lebih tinggi.....	47
Gambar 50: 75 persen rumah tangga tidak keluar dari kemiskinan atau kerentanan selama lebih dari tiga tahun.....	48

DAFTAR GAMBAR LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB.....	53
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran	53
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi.....	53
Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil	53
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen	53
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri.....	53
Lampiran Gambar 7: Arus volume perdagangan	54
Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran	54
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang.....	54
Lampiran Gambar 10: Impor barang.....	54
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal	54
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter.....	54
Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK.....	55
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara.....	55
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional	55
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.....	55
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional	55
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS.....	55
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal	56
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI	56
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit perbankan komersial dan pedesaan	56
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan	56
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah	56
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Menurut skenario dasar (<i>baseline</i>), pertumbuhan Indonesia diproyeksikan pada 5,2 persen untuk tahun 2014	III
Tabel 2: Pada kasus dasar (<i>base case</i>), PDB diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2014 dan 5,6 persen pada 2015	5
Tabel 3: Defisit neraca berjalan sebesar 2,9 persen dari PDB diproyeksikan pada kasus dasar (<i>base case</i>).....	12
Tabel 4: Tarif listrik meningkat secara signifikan untuk hampir seluruh kelompok pengguna besar, kecuali rumah tangga dengan konsumsi yang rendah.....	18
Tabel 5: Bank Dunia telah menaikkan proyeksi defisit APBN-nya menjadi 2,8 persen dari PDB..	21
Tabel 6: Perkiraan kerusakan dan kerugian dari kebakaran hutan di Riau, bulan Februari-Maret 2014.....	29
Tabel 7: Hasil utama ICP 2011 untuk Indonesia.....	34
Tabel 8: 20 persen rumah tangga paling mampu kini mengkonsumsi hampir setengah dari seluruh konsumsi.....	40
Tabel 9: Komposisi kuintil paling kaya relatif tetap; lebih banyak pergerakan pada kuintil lain .	42

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah	57
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran.....	57
Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi Indonesia	58
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia.....	59

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Tantangan-tantangan terkini pada sektor ekspor komoditas Indonesia	11
Kotak 2: Lemahnya kinerja penerimaan membawa dampak yang besar pada neraca fiskal selama beberapa tahun terakhir	15
Kotak 3: Gambut, lahan gambut dan kebakaran gambut.....	26
Kotak 4: El Niño dan ENSO	27
Kotak 5: Tantangan pengukuran ketimpangan dan perbandingan lintas negara.....	39
Kotak 6: Temuan utama penelitian terbaru tentang risiko dan manajemen risiko di Indonesia..	49

Ringkasan eksekutif: Pilihan sulit



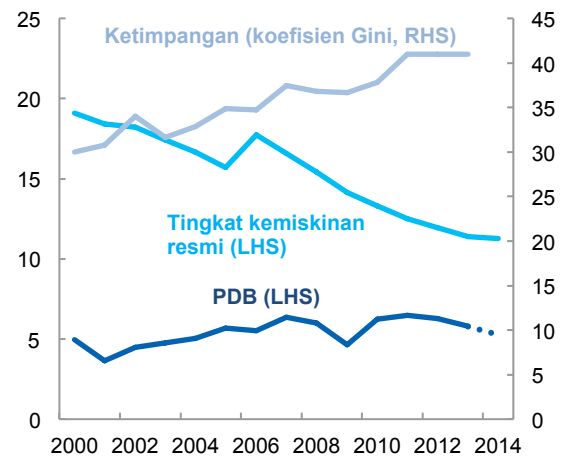
Indonesia, demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah memilih Presiden baru ...

... yang pada awal jabatannya akan langsung dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam upaya mengatasi peningkatan tekanan fiskal, dan melaksanakan reformasi yang mendesak guna mewujudkan potensi ekonomi yang besar

Warga negara Indonesia memberikan suaranya bagi Presiden mereka berikutnya pada tanggal 9 Juli. Hasil resmi pemilu akan diumumkan pada tanggal 22 Juli, dan kini Indonesia tengah menanti pelantikan Presiden baru pada bulan Oktober.

Indonesia saat ini menghadapi pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Pertumbuhan yang kokoh selama dekade lalu telah mendorong kemajuan pembangunan yang nyata. Indonesia kini merupakan negara nomor sepuluh terbesar dunia dalam paritas daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity – adjusted*), menurut angka terakhir. Namun risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi belakangan ini dapat meningkat. Dengan perlambatan pertumbuhan penerimaan dan peningkatan belanja subsidi energi, hal ini akan semakin membatasi pengeluaran yang penting untuk pembangunan, seperti infrastruktur, jaminan sosial, dan kesehatan. Seperti disoroti pada laporan Tinjauan Kebijakan Pembangunan Indonesia tahun 2014 dari Bank Dunia (dengan judul Indonesia: Menghindari Perangkap), para penentu kebijakan perlu mengambil pilihan-

Gambar 1: Indonesia memerlukan penguatan kembali pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan
(persen perubahan (tingkat kemiskinan dan PDB), skala 0-100 (Gini))



Catatan: Tingkat kemiskinan adalah perkiraan BPS Maret; PDB 2014: Proyeksi Bank Dunia; data Gini hingga 2012
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

pilihan yang sulit terkait reformasi kebijakan dan investasi yang mendesak dibutuhkan, serta menindaklanjutinya dengan pelaksanaan, guna mendorong tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan, membalikkan perlambatan laju pengentasan kemiskinan (Gambar 1), dan memastikan pemerataan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebutuhan akan reformasi sebagian mencerminkan perubahan lingkungan ekonomi global; pilihan-pilihan sulit sebaiknya diambil untuk memetik manfaat dari peningkatan permintaan dunia dan menyesuaikan diri terhadap terus melemahnya harga komoditas utama Indonesia...

Pemerintah yang baru akan menghadapi lingkungan global yang terus berubah, seiring dengan meredanya faktor-faktor pendorong selama dekade lalu, yaitu peningkatan harga komoditas dan permintaan dan rendahnya biaya pendanaan global. Namun, dalam jangka pendek, laju ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat, setelah mencatat permulaan tahun yang lebih lambat dari perkiraan. Sebagian besar percepatan tersebut akan dimotori oleh negara-negara berpenghasilan tinggi, terutama AS dan Eropa. Lebih kuatnya pertumbuhan di negara-negara maju akan meningkatkan permintaan bagi produk-produk ekspor dari negara-negara berkembang, sesuai dengan daya saing negara-negara berkembang tersebut di pasar dunia. Sementara sejauh ini kondisi keuangan dunia telah membaik pada tahun ini, dengan penundaan pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Namun berlanjutnya penurunan harga-harga komoditas akan menurunkan pendapatan dan penerimaan negara-negara eksportir komoditas seperti Indonesia. Harga enam komoditas utama Indonesia, yang merupakan 50 persen dari seluruh pendapatan ekspor, terus melemah dengan penurunan tercatat sebesar 8,6 persen pada tahun 2014 hingga bulan Juni, yang dimotori oleh batubara (turun sebesar 15,2 persen). Volatilitas harga minyak yang belakangan terjadi, sebagian akibat gejolak yang terjadi di Irak, menyoroiti kerentanan berkelanjutan posisi fiskal Indonesia terhadap peningkatan harga minyak internasional.

...dan memastikan bahwa berlanjutnya moderasi siklikal pertumbuhan dalam negeri tidak menjadi struktural

Pertumbuhan PDB riil Indonesia mengalami moderasi menjadi 5,2 persen tahun-ke-tahun (*year-on-year, yoy*) dan 4,3 persen kuartal-ke-kuartal (*quarter-on-quarter, qoq*) dengan penyesuaian musiman tahunan (*quarter-on-quarter at a seasonally-adjusted annualized rate, qoq saar*) pada kuartal pembuka tahun 2014. Namun berbeda tajam dengan kuartal akhir tahun 2013, ketika kegiatan ekonomi mencatat dorongan yang signifikan dari ekspor bersih, permintaan dalam negeri tetap kuat pada kuartal pertama 2014 sementara kontribusi perdagangan bersih terhadap pertumbuhan mencatat nilai negatif. Konsumsi sementara yang terkait dengan belanja pemilu mungkin berperan dalam mendorong permintaan dalam negeri pada kuartal pertama, bersama-sama dengan tetap kuatnya investasi bidang konstruksi. Seperti disinggung di bawah, perkiraan dasar (*baseline*) Bank Dunia tetap pada percepatan kembali pertumbuhan ekonomi yang moderat hingga tahun 2015. Namun tanpa disertai tambahan langkah-langkah kebijakan dan pertumbuhan produktivitas, maka risiko-risiko penurunan yang lebih struktural akan semakin meningkat.

Defisit neraca berjalan yang stabil pada kuartal pertama telah menyamakan tantangan-tantangan terhadap proses penyesuaian eksternal

Defisit neraca berjalan secara keseluruhan bersifat stabil, yaitu di tingkat 2,1 persen dari PDB, pada kuartal pertama tahun 2014. Namun proses penyesuaian luar negeri Indonesia tampaknya mulai melambat. Larangan ekspor sebagian mineral, yang berlaku mulai bulan Januari, menyebabkan penurunan volume ekspor yang signifikan. Hal ini, bersama-sama dengan melemahnya harga komoditas dunia, telah menekan penerimaan ekspor, dan terbukti menjadi beban berkelanjutan bagi keseluruhan neraca berjalan. Pelebaran yang baru dan bersifat musiman pada saldo neraca berjalan diperkirakan terjadi pada kuartal kedua. Pembiayaan luar negeri sejauh ini mencatat nilai yang cukup besar pada tahun 2014, dengan aliran masuk modal portofolio ke Indonesia (serta ke ekonomi-ekonomi berkembang lainnya) berkat berlanjutnya kondisi moneter akomodatif di ekonomi-ekonomi negara maju dan pemulihan selera risiko (*risk appetite*) global, yang mendorong kepemilikan surat utang negara oleh pihak asing ke tingkat yang belum pernah tercatat sebelumnya.

Harga-harga aset Indonesia telah meningkat, namun kondisi kredit perbankan terus mengetat

Harga aset-aset Indonesia secara umum telah meningkat selama tahun 2014 dan hampir pulih dari penurunan yang terjadi pada paruh kedua tahun lalu, sebagian berkat peningkatan aliran modal asing. Namun likuiditas bank dalam mata uang lokal tetap ketat dan tampaknya akan semakin menekan pertumbuhan kredit. Sementara itu, perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah dapat berpengaruh terhadap semakin lemahnya pertumbuhan kredit. Pada saat yang sama, ekspektasi pertumbuhan yang lebih rendah dapat semakin mendorong pelemahan permintaan kredit lebih lanjut.

Perkiraan Bank Dunia terhadap pertumbuhan Indonesia tahun 2014 direvisi sedikit, turun ke 5,2 persen

Melihat kedepan, lebih rendahnya konsumsi pemerintah dari yang diperkirakan sebelumnya (seiring dengan perubahan APBN 2014), lebih lambatnya pertumbuhan kredit, dan berlanjutnya perlemahan pertumbuhan pendapatan terkait dengan komoditas, tampaknya akan menghambat pertumbuhan PDB pada paruh kedua tahun 2014. Pada kasus dasar (*base case*), Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB riil sebesar 5,2 persen untuk tahun 2014, hanya revisi kecil sebesar 0,1 poin persentase dari perkiraan pada *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014. Perubahan prospek jangka pendek ini umumnya mencerminkan data perdagangan kuartal pertama yang lebih rendah dari perkiraan. Sementara penyesuaian ekonomi terhadap kondisi perdagangan yang lebih lemah dan prospek lebih tingginya suku bunga dunia masih terus berjalan. Tekanan yang berasal dari luar negeri dapat timbul kembali karena tidak adanya peningkatan yang nyata dalam kinerja ekspor, atau karena lebih lemahnya aliran masuk modal luar negeri, bila selera risiko dunia berbalik arah. Tekanan lebih lanjut terhadap pertumbuhan dapat terjadi akibat peningkatan penyusutan kredit, jika hal ini mengakibatkan perlemahan lebih lanjut dalam harga properti, dan pada akhirnya mengurangi kegiatan konstruksi riil.

Tabel 1: Menurut skenario dasar (*baseline*), pertumbuhan Indonesia diproyeksikan pada 5,2 persen untuk tahun 2014

		2012	2013	2014p	2015p
PDB riil	(% perubahan tahunan)	6,2	5,8	5,2	5,6
Indeks harga konsumen	(% perubahan tahunan)	4,3	6,9	5,8	4,9
Saldo neraca berjalan	(Persen dari PDB)	-2,8	-3,3	-2,9	-2,4
Saldo anggaran (APBN)*	(Persen dari PDB)	-1,9	-2,2	-2,4	n.a.
PDB mitra dagang utama	(% perubahan tahunan)	3,4	3,5	4,0	3,9

Catatan: * Angka dari pemerintah – realisasi (2012-2013) dan angka APBN-P 2014

Sumber: BI; BPS; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

APBN-P 2014 telah disetujui di tengah peningkatan tekanan fiskal, yang mengakibatkan peningkatan defisit fiskal dan kebutuhan pembiayaan bruto

Menanggapi perubahan ekonomi makro, penurunan pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan biaya subsidi energi, Pemerintah mengusulkan perubahan yang substansial terhadap APBN 2014. Defisit pada APBN-P yang disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Juni mencapai 2,4 persen dari PDB, meningkat dari 1,7 persen pada APBN sebelumnya. Pemotongan anggaran yang signifikan sebesar Rp 43 triliun bagi kementerian disetujui, bersama-sama dengan penundaan pembayaran tunggakan subsidi energi yang kian meningkat ke tahun 2015 sekitar Rp 50 triliun. Walau pergerakan lebih lanjut dalam reformasi subsidi BBM yang sensitif secara politis masih dinantikan, Pemerintah telah mengumumkan penyesuaian tarif listrik yang penting. Namun, walau dengan langkah-langkah penghematan biaya yang telah diumumkan, proyeksi ekonomi makro Bank Dunia menunjukkan defisit fiskal yang lebih besar, pada kisaran 2,8 persen dari PDB. Tingkat ini akan mendekati batas legal PDB sebesar 3 persen, dan masih tetap rentan terhadap peningkatan lebih lanjut dalam harga minyak atau perlemahan kurs Rupiah. Karenanya, kebutuhan peningkatan lanjutan dalam kualitas belanja dan peningkatan mobilisasi pendapatan menjadi sangat penting, bila Indonesia hendak mencapai prioritas-prioritas pembangunannya. Kemajuan dalam bidang ini akan sangat penting untuk menjaga tingkat kepercayaan investor, membantu memastikan bahwa tambahan kebutuhan pembiayaan bersih Pemerintah sebesar 0,7 persen dari PDB akan terpenuhi secara memadai pada paruh kedua tahun 2014.

Salah satu prioritas penting bagi reformasi kebijakan fiskal adalah mendukung inklusivitas pertumbuhan masa depan, memitigasi tren peningkatan ketimpangan di Indonesia belakangan ini

Indonesia mencatat kemajuan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan selama dekade lalu. Namun dengan perlambatan laju pengentasan kemiskinan, serta pesatnya peningkatan kekayaan, kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin telah melebar. Pada tahun 2002, rata-rata konsumsi per orang dari 10 persen rumah tangga paling kaya adalah 6,6 kali lipat dibanding 10 persen rumah tangga yang paling miskin; pada tahun 2013, perbandingan ini telah meningkat menjadi 10,3 kali. Hal ini cukup mengkhawatirkan, pertama, karena peningkatan ketimpangan mencerminkan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang baik, dan, karenanya, membatasi pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang tengah berlangsung. Kedua, hal ini meningkatkan keprihatinan akan kesetaraan, karena seluruh penduduk Indonesia seyogyanya memiliki akses terhadap kesempatan yang sama. Ketiga, peningkatan ketimpangan dapat membawa risiko-risiko bagi

pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial pada masa depan. Melalui tindakan terpadu, Indonesia dapat menghambat peningkatan ketimpangan, termasuk dengan kebijakan yang saling menguntungkan, yang tidak hanya akan memberantas ketimpangan, namun juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan meningkatkan mobilitas pasar tenaga kerja.

Kondisi El Niño dapat memperburuk “musim” kebakaran hutan yang akan datang – menambah , tantangan awal bagi Pemerintahan baru, dan membutuhkan rencana penanggulangan yang sesuai

Menjaga hasil-hasil pencapaian dalam kemajuan pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial di Indonesia membutuhkan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko-risiko bencana dan peningkatan ketahanan. Edisi *Triwulanan* ini meninjau salah satu risiko bencana ini: kebakaran lahan dan hutan. Walau Indonesia telah lama mengalami kebakaran-kebakaran tersebut, kebakaran lahan dan hutan semakin sering terjadi dan berskala besar dalam beberapa dekade belakangan, mencerminkan keterkaitan yang rumit antara faktor-faktor alam dan perbuatan manusia. Sebagai contoh, kebakaran yang sangat merusak pada bulan Februari-Maret 2014 mengakibatkan kerusakan dan kerugian lingkungan dan ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai 935 juta dolar AS hanya untuk provinsi Riau saja. Besarnya kemungkinan terjadinya kondisi El Niño menjelang akhir tahun 2014 turut meningkatkan risiko bahwa musim kebakaran berikutnya akan lebih merusak, suatu tantangan besar yang mendesak bagi Pemerintahan baru. Langkah-langkah seperti penerapan pendekatan yang sistematis untuk menentukan waktu mulainya musim kebakaran dan penetapan status siaga bahaya dapat menjadi hal yang penting dalam upaya memitigasi risiko ini.

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



1. Kondisi pasar keuangan dunia telah membaik namun harga komoditas masih tetap lemah

Ekonomi pasar negara berkembang akan menikmati peningkatan permintaan global dan perbaikan kondisi keuangan, walau harga komoditas non-energi masih tetap lemah

Setelah pembukaan tahun 2014 yang lebih lemah dari perkiraan, ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat dengan laju yang kurang lebih sesuai dengan perkiraan yang lalu. Sebagian besar percepatan tersebut akan dimotori oleh negara-negara berpenghasilan tinggi, terutama Amerika Serikat dan Eropa, mendorong permintaan untuk ekspor dari negara-negara berkembang. Sementara itu, kondisi keuangan dunia semakin membaik, dengan penundaan pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Namun, berlanjutnya penurunan harga-harga komoditas, terutama harga logam, akan menurunkan pendapatan dan penerimaan negara-negara eksportir komoditas seperti Indonesia, yang posisi fiskalnya juga akan menerima dampak negatif dari peningkatan harga minyak yang baru terjadi.

Walau di kuartal pertama mencatat kemunduran, pertumbuhan ekonomi dan permintaan ekspor negara-negara maju tengah menguat...

Menurut proyeksi Bank Dunia pada bulan Juni¹, kegiatan ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat sebesar 2,8 persen tahun ini, dan menguat menjadi 3,4 persen pada tahun 2015. Walau dengan perlemahan yang terkait dengan cuaca pada kuartal pertama, perekonomian Amerika Serikat justru sedang mengalami momentum peningkatan dan Eropa juga tengah mengalami penguatan. Sebagai akibatnya, pertumbuhan permintaan impor negara-negara berpenghasilan tinggi diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2014 menjadi 4,2 persen dari 1,9 persen pada tahun 2013, dan semakin meningkat menjadi 4,8 persen pada tahun 2015. Laju pertumbuhan rata-rata PDB dari 13 negara mitra perdagangan utama Indonesia yang dibobot berdasarkan porsi dalam ekspor, diperkirakan akan mencapai 4,0 persen pada tahun 2014 dan 3,9 persen pada tahun 2015. Karenanya, prospek ekspor Indonesia – yang fokusnya lebih besar kepada beberapa negara tetangganya dibanding dengan negara-negara berpenghasilan tinggi – diperkirakan tidak terlalu berubah untuk tahun 2014 dan sedikit menurun untuk tahun 2015 dari apa yang pernah dimuat pada *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014.

¹ Bank Dunia, Juni 2014, “Global Economic Prospects – Shifting priorities; building for the future” <http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>.

...namun pada saat yang sama, harga-harga komoditas, terutama logam, mengalami penurunan

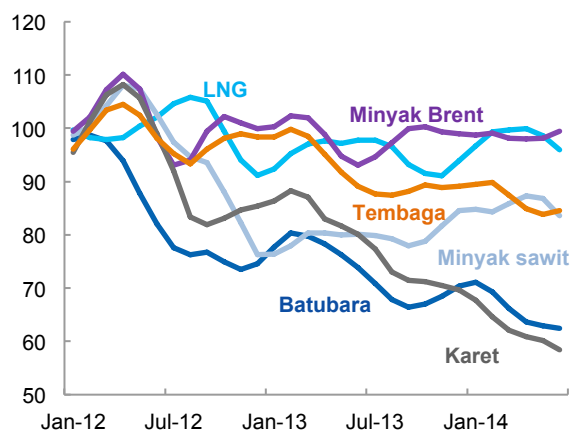
Walau secara keseluruhan permintaan global telah meningkat, dampak positifnya terhadap ekspor Indonesia terhapus oleh berlanjutnya penurunan pada banyak harga komoditas dunia, kecuali harga minyak mentah. Pada kuartal kedua tahun 2014, di antara komoditas ekspor utama Indonesia, harga batubara, gas alam, karet, tembaga, dan emas mencatat penurunan yang cukup besar dibanding kuartal pertama tahun ini dan kuartal kedua tahun lalu (Gambar 2). Harga minyak kelapa sawit (*crude palm oil*, CPO) juga menurun pada kuartal kedua 2014 dibanding kuartal sebelumnya. Prospek harga logam dasar, pada khususnya, akan bergantung pada prospek ekonomi Tiongkok, yang mewakili hampir 45 persen permintaan logam dunia. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia naik antara bulan Maret dan Juni 2014, dengan harga minyak mentah Indonesia naik hampir 2 dolar AS. Sebagai importir bersih minyak, neraca perdagangan dan posisi fiskal Indonesia (dengan besarnya subsidi BBM) tampaknya akan berpengaruh negatif dengan peningkatan harga minyak.

Kondisi keuangan dunia telah membaik

Indonesia dan sebagian besar ekonomi pasar berkembang (*emerging market economies*, EMEs) menghadapi kondisi keuangan internasional yang lebih lambat pada paruh pertama tahun 2014 dibanding perkiraan pada awal tahun. Para investor kini memperkirakan kondisi moneter yang akomodatif di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa akan bertahan untuk waktu yang lebih panjang. Selain itu, pada bulan Juni, Bank Sentral Eropa mengumumkan langkah-langkah pelonggaran kredit yang baru untuk mencegah deflasi. Selain itu, kebijakan penyesuaian ekonomi makro di banyak negara berkembang telah menurunkan kerentanan dan mendorong aliran masuk modal. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, biaya pinjaman negara EMEs telah menurun secara cukup berarti sejak bulan Februari, karena penurunan *yield* negara berpenghasilan tinggi dan penyusutan selisih (*spread*) kredit EMEs (Gambar 3). Selama kuartal pertama 2014, Indonesia menerima aliran masuk portofolio bersih tertinggi selama satu dekade dalam dolar AS (lihat Bagian 4).

Gambar 2: Harga komoditas dunia, terutama logam, terus menurun

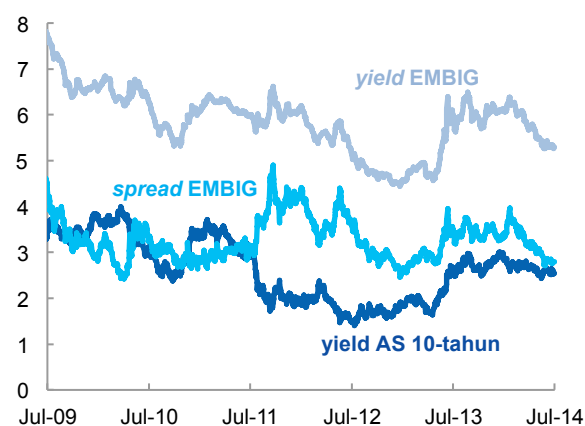
(indeks, Januari 2012 = 100, rata-rata bergerak 3-bulanan)



Catatan: LNG adalah gas alam cair (harga impor Jepang)
Sumber: Bank Dunia

Gambar 3: Kondisi kredit internasional telah membaik, dengan penundaan pengetatan likuiditas lebih lanjut untuk saat ini

(persen)



Sumber: JP Morgan

2. Perlambatan pertumbuhan Indonesia didorong oleh lemahnya ekspor bersih

Sesuai perkiraan, perlambatan pertumbuhan siklikal terus berlanjut pada kuartal pertama 2014

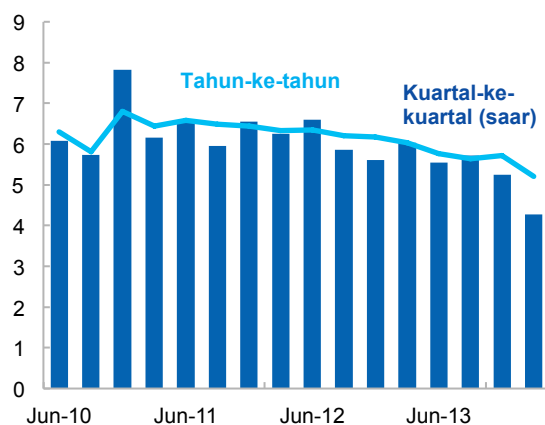
Pertumbuhan PDB riil Indonesia melambat menjadi 5,2 persen tahun-ke-tahun (*year-on-year, yoy*) dan 4,3 persen kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman tahunan (*quarter-on-quarter at a seasonally-adjusted annualized rate, qoq saar*) pada kuartal pertama tahun 2014 (Gambar 4). Penurunan ini sejalan dengan pola penyesuaian ekonomi makro menurut proyeksi pada *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014. Namun, berlawanan dengan kuartal akhir tahun 2013, ketika kegiatan ekonomi menerima dorongan yang signifikan dari ekspor bersih, permintaan dalam negeri tetap bertahan kuat pada kuartal pertama 2014 sementara kontribusi perdagangan bersih terhadap pertumbuhan sedikit negatif. Ke depan, belanja pemerintah yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, karena revisi APBN, lebih lambatnya pertumbuhan kredit, dan lebih lemahnya pertumbuhan pendapatan terkait komoditas, tampaknya akan menghambat pertumbuhan pada paruh kedua tahun 2014.

Konsumsi swasta, yang tampaknya sebagian didorong oleh belanja terkait pemilu, mendorong pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2014...

Pertumbuhan permintaan dalam negeri meningkat menjadi 5,3 persen yoy pada kuartal pertama 2014, dari 5,1 persen pada kuartal akhir 2013, dan memberikan kontribusi sebesar 4,5 poin persentase terhadap keseluruhan pertumbuhan PDB (Gambar 5). Konsumsi swasta meningkat sebesar 5,6 persen yoy dan 5,8 persen qoq saar. Peningkatan pertumbuhan dari 5,3 persen yoy pada kuartal akhir 2013 disebabkan oleh kenaikan konsumsi bukan bahan pangan, yang tampaknya sebagian didorong oleh belanja tidak rutin terkait dengan pemilu. Belanja pemerintah pada kuartal pertama 2014 meningkat sebesar 3,6 persen yoy, turun dari 6,4 persen pada kuartal keempat. Pembentukan modal tetap bruto tetap mencatat laju pertumbuhan yang relatif moderat pada 5,1 persen yoy, naik dari 4,4 persen yoy pada kuartal yang lalu, namun masih cukup jauh berada di bawah rata-ratanya pada tahun 2010-2012 sebesar 8,8 persen yoy. Selain itu, secara berurutan pertumbuhan investasi tetap sedikit melambat: 3,9 persen qoq saar pada kuartal pertama tahun 2014 dibanding 4,4 persen pada kuartal akhir tahun 2013. Pertumbuhan investasi pembangunan gedung masih tetap kuat, dengan kontribusi sebesar 4,7 poin persentase terhadap pertumbuhan investasi tetap tahun-ke-tahun. Belanja untuk peralatan transportasi asing terus menurun secara tahun-ke-tahun selama lima kuartal berturut-turut, sementara belanja untuk peralatan dan permesinan asing mencatat pertumbuhan yang positif untuk pertama kali dalam empat kuartal.

Gambar 4: Pertumbuhan PDB riil terus melambat pada kuartal satu tahun 2014...

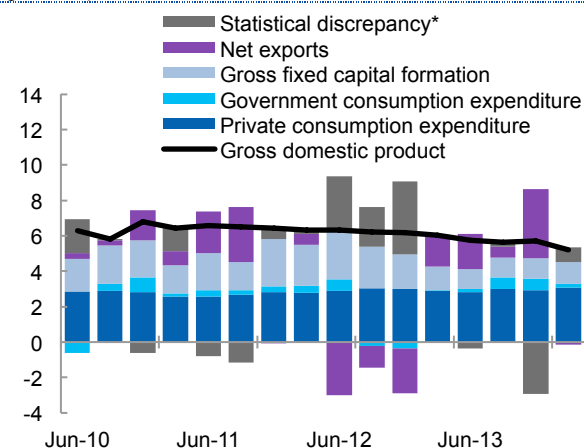
(pertumbuhan riil yoy dan qoq saar, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 5: ...didorong oleh kontribusi kecil negatif dari perdagangan bersih

(kontribusi komponen belanja terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase)



Catatan: * Perbedaan statistika termasuk persediaan

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

...sementara ekspor bersih memberi kontribusi negatif kepada pertumbuhan pada periode yang sama

Berlawanan dengan kuartal empat 2013 ketika ekspor bersih menjadi pendorong utama pertumbuhan, pada kuartal pertama 2014 kontribusi dari ekspor bersih kepada pertumbuhan tahun-ke-tahun adalah -0,1 poin persentase (Gambar 5). Laju pertumbuhan ekspor riil barang-barang dan jasa-jasa turun secara signifikan pada kuartal pertama 2014, dengan kontraksi sebesar 0,8 persen yoy dibanding dengan pertumbuhan sebesar 7,4 persen yoy pada kuartal akhir 2013. Berdasarkan data volume perdagangan, penurunan ekspor riil pada kuartal pertama disebabkan oleh penurunan ekspor batubara dan juga terhentinya ekspor bijih, kerak, dan abu, sejalan dengan laporan dampak larangan sebagian ekspor mineral mentah pada bulan Januari. Pada saat yang sama, volume impor menurun sebesar 0,7 persen yoy setelah turun sebesar 0,6 persen pada kuartal keempat.

Sejalan dengan melemahnya ekspor mineral, sektor pertambangan telah menjadi beban pertumbuhan

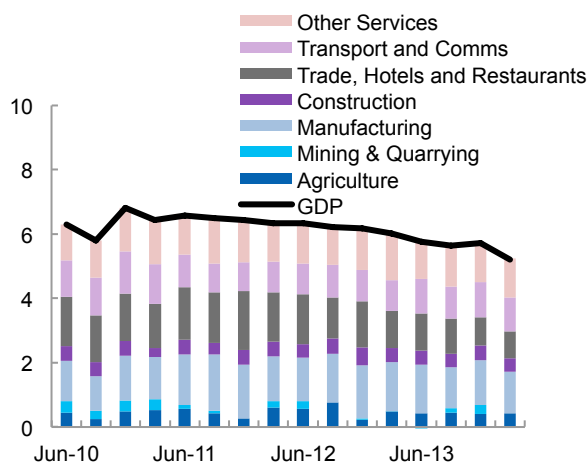
Dari sudut pandang produksi, sektor pertambangan memberi kontribusi terbesar terhadap perlambatan pertumbuhan PDB riil tahun-ke-tahun pada kuartal pembuka tahun 2014 (Gambar 6). Kontribusi terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun dari sektor-sektor lain dalam ekonomi masih relatif stabil pada kuartal pertama 2014. Lemahnya kinerja pertambangan dan penggalan memang telah diperkirakan, yang diakibatkan oleh adanya pelarangan sebagian ekspor mineral mentah yang mulai berlaku pada pertengahan bulan Januari 2014. Penurunan hasil pertambangan yang berbarengan dengan berlanjutnya perlemahan pada harga-harga komoditas, telah menimbulkan dampak besar yang berbeda antar provinsi di Indonesia, dimana komoditas-komoditas yang relatif lebih bergantung terhadap pertambangan mencatat penurunan terbesar dalam pertumbuhan PDB tingkat provinsi (lihat Kotak 1).

Indikator berfrekuensi tinggi terus memberikan sinyal yang beragam

Sejumlah indikator kegiatan ekonomi bulanan, seperti survei keyakinan konsumen Bank Indonesia (BI), *Purchasing Managers Index* (PMI) HSBC untuk Indonesia, serta penjualan sepeda motor dan semen, merujuk kepada peningkatan tipis dalam ekonomi di kuartal kedua 2014 (Gambar 7). Namun, penjualan mobil mencatat penurunan yang signifikan pada bulan April dan Mei yang tampaknya lebih disebabkan oleh perlambatan ekonomi secara umum dan depresiasi Rupiah, dibanding diakibatkan oleh misalnya angka penjualan sepeda motor itu sendiri. Secara keseluruhan, data frekuensi tinggi tidak memberikan indikasi yang jelas akan tingkat permintaan dalam negeri pada kuartal kedua tahun 2014.

Gambar 6: Penurunan kegiatan pertambangan dan penggalan berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan pada sisi produksi

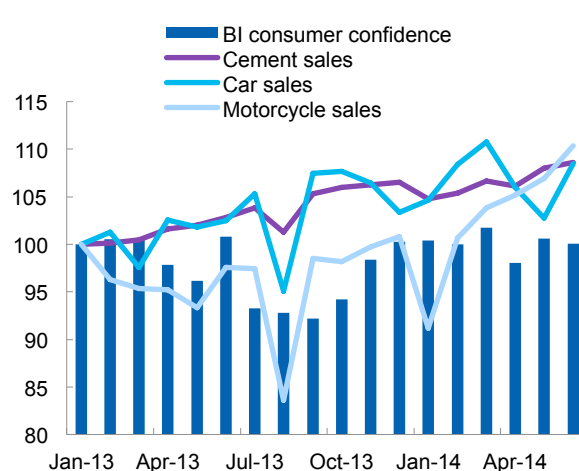
(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 7: Data frekuensi tinggi memberi sinyal beragam terhadap kuartal kedua

(data dengan penyesuaian musiman, Januari 2013 = 100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Bank Dunia merevisi prospek pertumbuhan Indonesia tahun 2014 sedikit turun ke 5,2

Pada kasus dasar (*base case*), Bank Dunia memproyeksikan PDB riil Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2014 dan 5,6 persen pada tahun 2015. Secara regional, kinerja Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan akan berada di atas rata-rata Asia Timur sebesar 4,7 persen di luar Cina dan Indonesia sesuai proyeksi Bank Dunia, sementara proyeksi untuk

**persen dan
diproeksikan akan
meningkat menjadi 5,6
persen pada tahun 2015**

2015 adalah sama dengan rata-rata regional (*Global Economic Prospects*, Juni 2014). Proyeksi pertumbuhan PDB 2014 yang terakhir telah menyertakan revisi penurunan sebesar 0,1 poin persentase dari perkiraan *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014. Perubahan terhadap prospek jangka pendek tersebut mencerminkan data perdagangan kuartal pertama 2014 yang lebih buruk dari perkiraan, yang akan menurunkan proyeksi kontribusi dari ekspor bersih terhadap pertumbuhan selama tahun tersebut. Selain itu, perkiraan PDB yang lebih rendah juga memperhitungkan perlambatan pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang tercermin dari pemotongan belanja sebesar Rp 43 triliun pada APBN-P (lihat Bagian 6). Setelah belanja yang tampaknya naik sebelum pemilu, pertumbuhan konsumsi swasta diperkirakan akan sedikit mengalami perlambatan. Relatif lebih ketatnya kondisi kredit dan lebih lambatnya pertumbuhan pendapatan yang terkait dengan komoditas merupakan faktor-faktor utama di belakang penurunan tipis dalam proyeksi belanja konsumsi pada paruh kedua tahun 2014. Investasi tetap yang diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,7 persen telah direvisi untuk mencerminkan data kuartal pertama 2014, dengan risiko-risiko penurunan yang semakin meningkat terhadap prospek tersebut, dengan adanya tren-tren terakhir dalam pertumbuhan kredit (lihat Bagian 5).

Tabel 2: Pada kasus dasar (*base case*), PDB diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2014 dan 5,6 persen pada 2015
(*persen perubahan, kecuali dinyatakan lain*)

	Tahunan			YoY pada Kuartal 4			Revisi pada Tahunan	
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2014	2015
1. Indikator ekonomi utama								
Jumlah belanja konsumsi	5,2	4,9	4,9	5,4	4,8	5,1	0,1	0,0
Belanja konsumsi swasta	5,3	5,0	5,1	5,3	4,7	5,4	0,1	0,0
Konsumsi pemerintah	4,9	4,2	3,7	6,4	5,0	3,2	-0,2	0,0
Pembentukan modal tetap bruto	4,7	4,7	6,4	4,4	5,0	6,8	0,2	-0,2
Ekspor barang dan jasa	5,3	0,3	6,5	7,4	0,2	6,7	-5,0	-0,5
Impor barang dan jasa	1,2	0,2	5,3	-0,6	1,4	4,9	-3,2	-0,1
Produk Domestik Bruto	5,8	5,2	5,6	5,7	5,1	5,7	-0,1	0,0
2. Indikator eksternal								
Neraca pembayaran (AS\$ miliar)	-7,3	-2,0	0,9	-	-	-	0,9	-0,8
Saldo neraca berjalan (AS\$ miliar)	-29,1	-25,6	-23,6	-	-	-	-1,3	-3,4
<i>Sebagai bagian dari PDB (persen)</i>	-3,3	-2,9	-2,4	-	-	-	0,0	-0,3
Neraca perdagangan (AS\$ miliar)	-6,1	-3,1	-4,3	-	-	-	-0,2	-6,9
Saldo neraca modal & keuangan (AS\$ miliar)	22,4	25,3	24,5	-	-	-	3,8	2,6
3. Indikator fiskal								
Pendapatan pem. pusat (% dari PDB)	15,7	15,4	-	-	-	-	-0,1	-
Belanja pem. pusat (% dari PDB)	18,0	18,2	-	-	-	-	0,1	-
Neraca fiskal (% dari PDB)	-2,2	-2,8	-	-	-	-	-0,2	-
Neraca primer (% dari PDB)	-1,1	-1,4	-	-	-	-	0,0	-
4. Pengukuran ekonomi lainnya								
Indeks harga konsumen	6,9	5,8	4,9	8,1	4,6	5,1	-0,4	-0,3
Deflator PDB	4,4	5,7	5,3	7,1	4,8	5,3	-0,9	0,0
PDB nominal	10,4	11,2	11,2	13,2	10,1	11,3	-1,0	0,0
5. Asumsi ekonomi								
Kurs tukar (Rp/AS\$)	10563	11800	11800	-	-	-	-200	-200
Harga minyak mentah Indonesia (AS\$/barel)	106	106	103	-	-	-	1	1
Pertumbuhan mitra dagang utama	3,5	4,0	3,9	-	-	-	0,0	-0,2

Catatan: Angka ekspor dan impor merujuk kepada volume dari neraca nasional. Kurs tukar adalah asumsi dari rata-rata terakhir. Revisi adalah relatif dibanding proyeksi pada IEQ edisi bulan Maret 2014.

Sumber: Kemenkeu; BPS; BI; CEIC; proyeksi Bank Dunia

3. Inflasi tetap melambat, namun terdapat risiko kenaikan

Inflasi IHK dan inti bergerak stabil pada kuartal kedua 2014

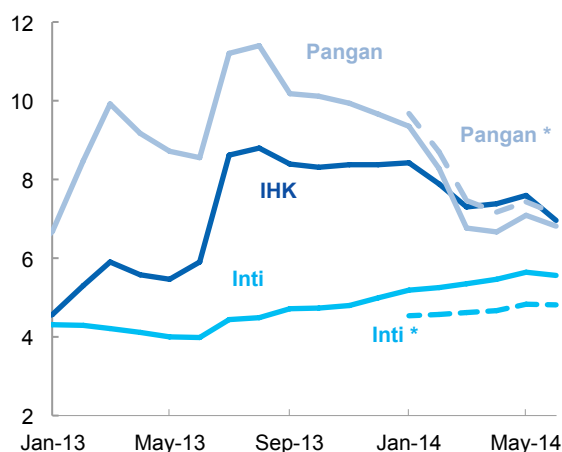
Tekanan harga masih tetap terjaga pada kuartal kedua 2014, dengan inflasi IHK berangsur-angsur turun ke 6,7 persen yoy pada bulan Juni dan inflasi inti bergerak stabil pada kisaran 4,8 persen pada bulan Mei dan Juni (menggunakan IHK baru dengan 2012 sebagai tahun dasar dari BPS) (Gambar 8). Relatif ketatnya kondisi perkreditan pada beberapa bulan terakhir (lihat Bagian 5) kemungkinan mengimbangi dampak inflasi dari depresiasi Rupiah yang signifikan pada paruh kedua tahun 2013 dan peningkatan pertumbuhan konsumsi swasta pada kuartal pertama 2014. Laju inflasi tahun-ke-tahun akan turun secara cukup signifikan pada bulan Juli karena kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013 telah pudar pengaruhnya, walau risiko kenaikannya masih tetap bertahan.

Inflasi bahan pangan juga tetap rendah, dengan turunnya harga beras akibat keberhasilan panen

Inflasi harga bahan pangan terus bertahan di bawah 7,5 persen sejak bulan Maret 2014 (menurut rangkaian berdasar tahun 2012), cukup jauh berada di bawah nilai yang tercatat tahun lalu. Harga sejumlah bahan pangan utama, seperti beras dan cabai, telah menurun, mencerminkan cuaca yang relatif bersahabat yang berpengaruh positif terhadap produksi dan distribusi. Penurunan harga beras dalam negeri memperkecil kesenjangan antara harga beras dalam dan luar negeri (Gambar 9). Namun terdapat risiko-risiko kenaikan harga beras pada jangka pendek, misalnya yang terkait dengan kemungkinan terjadinya kondisi cuaca El Niño menjelang akhir tahun ini (lihat Bagian B.1).

Gambar 8: Tekanan harga tetap terjaga pada kuartal kedua 2014

(laju inflasi yoy, persentase perubahan)

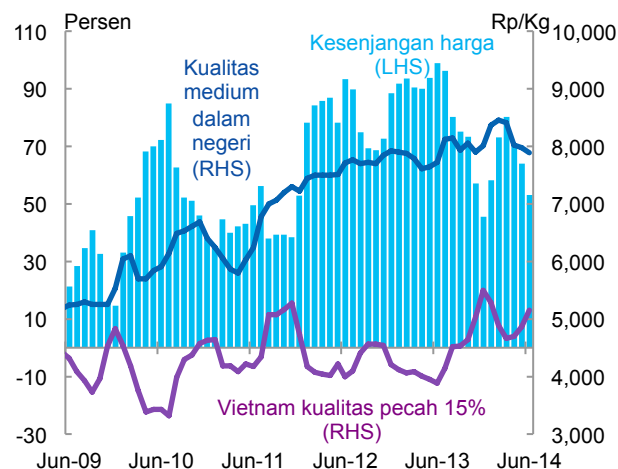


Catatan: * Garis padat menggambarkan inflasi inti dan pangan berdasarkan IHK tahun dasar 2007 dan 2012 yang disambungkan; garis putus-putus menunjukkan laju pertumbuhan yoy yang dihitung hanya menggunakan rangkaian IHK tahun dasar 2012 yang tersedia

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 9: Keberhasilan panen menurunkan harga beras dalam negeri

(harga beras kulakan, Rp per kg)



Catatan: Kesenjangan harga merujuk pada perbedaan antara harga beras dalam dan luar negeri

Sumber: BPS, Pasar Induk Beras Cipinang; perhitungan staf Bank Dunia

Perkiraan dasar (baseline) untuk inflasi adalah melambat, walau terdapat risiko kenaikan

Ke depan, pengaruh dasar yang kuat akan mendorong penurunan inflasi IHK pada paruh kedua tahun 2014, karena kenaikan harga karena peningkatan harga BBM bersubsidi bulan Juni 2013 telah pudar pengaruhnya dalam perbandingan tahun-ke-tahun. Bank Dunia memproyeksikan rata-rata laju inflasi tahunan sebesar 5,8 persen untuk tahun 2014, yang akan turun menjadi 4,9 persen pada tahun 2015. Perkiraan ini menyertakan peningkatan kecil dalam IHK yang disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun ini, serta beberapa perkiraan tekanan kenaikan harga bahan pangan yang disebabkan oleh El Niño. Namun kemungkinan reformasi lebih lanjut terhadap harga yang diatur oleh pemerintah tetap menjadi risiko kenaikan inflasi, dengan adanya tekanan fiskal yang cukup besar (lihat Bagian 6). Risiko lainnya adalah besarnya pengaruh El Niño tahun ini

terhadap harga bahan pangan, dan tanggapan Pemerintah, terutama terhadap kejutan pasokan beras.²

4. Penyesuaian neraca berjalan berlanjut, aliran masuk portofolio angka tertinggi selama dekade

Kemunduran dalam proses penyesuaian neraca berjalan muncul

Neraca pembayaran Indonesia pada kuartal pertama 2014 ditunjukkan oleh stabilnya defisit neraca berjalan secara keseluruhan dan aliran masuk modal portofolio yang mencapai nilai tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Namun terdapat tanda-tanda bahwa proses penyesuaian neraca berjalan tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Seperti telah diperkirakan, larangan ekspor sebagian mineral mentah, yang berlaku mulai bulan Januari, menyebabkan penurunan volume ekspor secara keseluruhan yang signifikan. Hal ini, seiring dengan berlanjutnya penurunan dalam harga-harga komoditas dunia, menjadikan perlemahan ekspor sebagai beban berkepanjangan terhadap keseluruhan neraca berjalan selama tahun berjalan. Sementara itu, seperti disinggung di atas, kuatnya pemulihan aliran modal yang mengalir ke pasar-pasar berkembang mendorong lonjakan aliran portofolio dan penurunan dalam tekanan pembiayaan luar negeri bagi Indonesia pada paruh pertama tahun 2014. Namun gambaran jangka menengah yang diuraikan pada *Triwulanan* yang lalu masih tetap sama: biaya pinjaman luar negeri diperkirakan akan meningkat, yang menegaskan kebutuhan untuk terus mendukung penyesuaian eksternal dan aliran masuk pembiayaan berkualitas tinggi untuk membatasi kerentanan Indonesia terhadap volatilitas pasar dunia pada masa depan.

Defisit neraca berjalan masih tetap berada pada kisaran 2 persen dari PDB pada kuartal pertama 2014

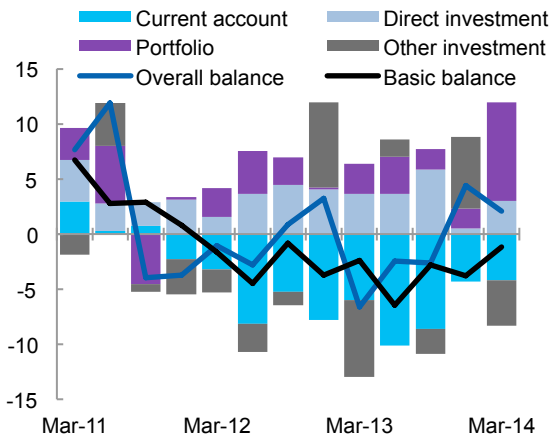
Defisit neraca berjalan mencapai 2,1 persen dari PDB pada kuartal keempat 2013 dan kuartal pertama 2014, mencapai 4,2 miliar dolar AS pada kuartal pertama (Gambar 10). Namun di balik angka IHK yang stabil ini, terdapat perbedaan yang signifikan dalam faktor-faktor pendorong neraca berjalan pada kedua kuartal tersebut. Sementara saldo neraca berjalan meningkat sebesar 0,7 persen dari PDB pada kuartal pertama 2014 dibanding kuartal pertama 2013, penyesuaian terakhir itu didukung oleh terus melemahnya impor yang menurun sebesar 2,7 miliar dolar AS yoy, dibanding penurunan ekspor sebesar 800 juta dolar AS yoy. Sebaliknya, 1,4 persen peningkatan PDB secara tahun-ke-tahun yang tercatat pada kuartal akhir tahun 2013 datang dari penyusutan impor dan peningkatan ekspor. Defisit jasa dan pendapatan yang lebih kecil, yang secara bersama menurun sebesar 1,4 miliar dolar AS antara kuartal keempat 2013 dan kuartal pertama 2014, mendukung stabilitas defisit neraca berjalan walau dengan surplus perdagangan barang yang lebih kecil.

Lemahnya impor dimotori oleh bahan-bahan mentah

Nilai impor menurun sebesar 6,3 persen yoy pada kuartal pertama tahun 2014. Bahan mentah memotori perlemahan tersebut, dengan mencatat penurunan sebesar 2,4 miliar dolar AS antara kuartal keempat 2013 dan kuartal pertama 2014 dan berkontribusi sebesar 5,0 poin persentase terhadap keseluruhan penurunan yoy (Gambar 11). Impor barang-barang modal juga terus menurun secara tahun-ke-tahun, sejalan dengan pertumbuhan investasi tetap yang relatif lemah (lihat Bagian 2). Selain itu, barang konsumen, yang mewakili sekitar 14 persen impor, menurun secara tahun-ke-tahun untuk pertama kali sejak kuartal ketiga 2012, dengan mencatat penurunan sebesar 3,0 persen.

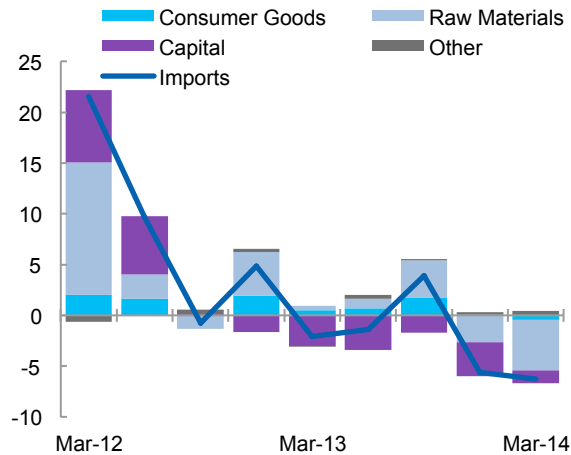
² Mekanisme tanggapan Pemerintah terhadap kejutan harga beras telah dirampingkan. Amandemen Peraturan Kementerian No 06/M-DAG/PER/2/2012 yang diterbitkan pada tahun 2012, menetapkan kriteria yang jelas tentang kewenangan Tim Koordinasi Pangan untuk memberi izin kepada BULOG untuk melakukan impor beras.

Gambar 10: Neraca berjalan tetap stabil, namun neraca dasar masih tetap negatif
(saldo utama neraca pembayaran, miliar USD)



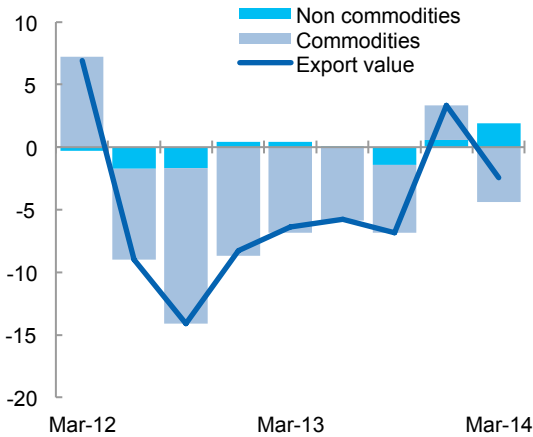
Catatan: Neraca dasar = FDI bersih + saldo neraca berjalan
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 11: Nilai impor terus melemah, didorong oleh barang modal dan bahan mentah
(pertumbuhan dan kontribusi pada pertumbuhan, persen yoy)



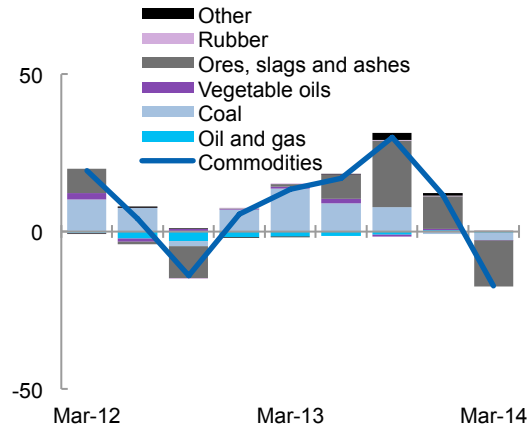
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 12: Komoditas berada di balik pelemahan ekspor...
(pertumbuhan dan kontribusi pada pertumbuhan yoy, poin persentase)



Catatan: Komoditas tidak menyertakan komoditas yang terkait manufaktur
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 13: ...dengan volume komoditas turun sebesar 17,3 persen yoy, didorong oleh mineral
(pertumbuhan dan kontribusi pada pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Aturan baru yang membatasi ekspor mineral mentah sangat membebani ekspor komoditas...

Ekspor enam komoditas utama Indonesia mencatat penurunan sekitar 4,2 miliar dolar AS antara kuartal keempat 2013 dan kuartal pertama 2014, memberikan kontribusi sebesar 4,4 poin persentase terhadap penurunan ekspor sebesar 2,5 persen (Gambar 12). Secara tahunan, ekspor komoditas melemah sebesar 8,3 persen, terutama didorong oleh penurunan volume (turun 17,3 persen yoy). Empat per lima dari penurunan dalam volume ekspor komoditas berasal dari bijih, terak, dan abu (Gambar 13), yang berhenti dengan berlakunya larangan sebagian ekspor mineral pada bulan Januari 2014.

... sementara terdapat tanda-tanda awal peningkatan ekspor manufaktur yang telah lama ditunggu

Pada saat bersamaan, ekspor manufaktur Indonesia telah memperoleh sejumlah momentum sejak bulan Maret 2014 (Gambar 14). Hal ini dibandingkan dengan moderasi umum dalam laju pertumbuhan pada sejumlah negara tetangga yang sebanding dan peningkatan yang terjadi di Malaysia sejak setahun lalu. Namun jika perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia ingin lebih mengambil manfaat dari depresiasi Rupiah sejak pertengahan tahun 2013, dan dari antisipasi berlanjutnya peningkatan permintaan dari ekonomi-ekonomi

berpenghasilan tinggi, maka faktor-faktor penghambat yang telah lama ada harus ditangani, seperti yang berkaitan dengan biaya logistik dan kualitas infrastruktur.

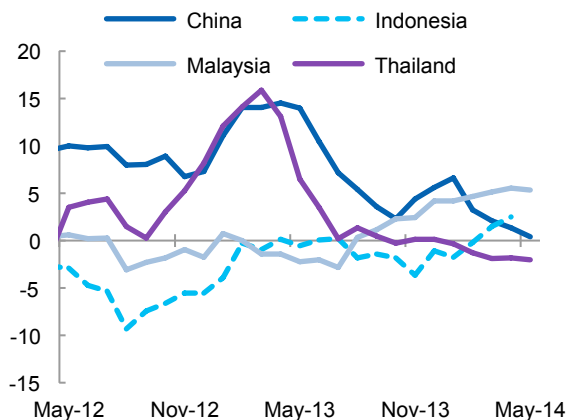
Data bulanan menunjukkan kemungkinan penurunan dalam neraca perdagangan barang pada kuartal kedua, dengan pembayaran pendapatan yang tampaknya akan turut mendorong pelebaran defisit neraca

Data perdagangan bea cukai bulanan menunjukkan penurunan neraca perdagangan yang cukup besar pada bulan April 2014, ketika jumlah impor melampaui ekspor hampir sebesar 2 miliar dolar AS. Jumlah penurunan itu kira-kira setara dengan peningkatan dalam impor bahan mentah bukan bahan bakar dan penurunan dalam ekspor non-migas (terutama batubara dan minyak sawit). Sementara data bea cukai bulan Mei 2014 menunjukkan saldo positif yang kecil sebesar 69,9 juta dolar AS, neraca perdagangan bea cukai kuartal kedua hingga kini masih berada di daerah negatif. Terdapat potensi tambahan tekanan pada neraca berjalan kuartal kedua, menimbang bahwa kuartal kedua cenderung mencatat peningkatan aliran keluar dari neraca pendapatan yang terkait dengan pembayaran dividen. Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, defisit neraca berjalan pada kuartal kedua diperkirakan akan melebar secara signifikan dari tingkat-tingkat yang tercatat pada dua kuartal sebelumnya, dengan sinyal dari Bank Indonesia yang baru-baru ini memperkirakan defisit neraca berjalan akan mencapai 4 persen dari PDB.³

Investasi langsung mencatat sedikit pemulihan pada kuartal pertama, sementara investasi portofolio melonjak ke nilai tertinggi sepanjang dekade...

Saldo neraca modal dan finansial masih tetap mencatat surplus yang sehat pada kuartal pertama 2014, dengan aliran masuk bersih sebesar 7,8 miliar dolar AS dibanding 8,8 miliar dolar AS pada kuartal akhir 2013. Namun, komposisi aliran masuk telah berubah secara signifikan dari kuartal keempat 2013, ketika aliran masuk portofolio dan investasi lain mengimbangi penanaman modal langsung bersih yang melemah di luar kebiasaan (sebagian besar diakibatkan oleh transaksi keluar negeri). Penanaman modal langsung bersih ini sedikit mencatat pemulihan pada kuartal pertama 2014, menjadi 3,0 miliar dolar AS, dan investasi portofolio mencatat aliran masuk modal bersih yang paling tinggi selama satu dekade sebesar 9,0 miliar dolar AS. Pada saat yang sama, saldo sub-neraca "investasi lain" yang volatil berubah menjadi negatif, dengan aliran keluar bersih sebesar 4,1 miliar dolar AS, terutama karena pergeseran simpanan swasta di luar negeri (2,4 miliar dolar AS) dan pembayaran utang oleh Pemerintah (1,4 miliar dolar AS).

Gambar 14: Ekspor manufaktur mencatat peningkatan kecil (pertumbuhan nilai ekspor manufaktur rata-rata bergerak 6-bulanan yoy, persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

³ <http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/16/bi-warns-capital-outflows.html>

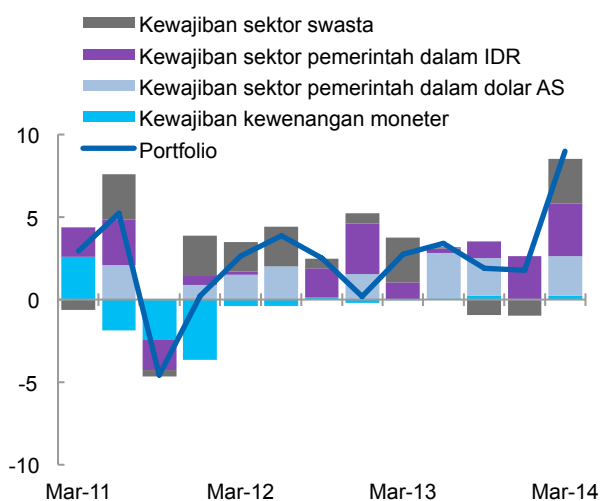
...berkat pulihnya minat terhadap saham dan obligasi EMEs

Aliran masuk modal portofolio tertinggi selama satu dekade yang tercatat pada kuartal pertama 2014 didorong oleh pulihnya minat investor terhadap aset-aset pasar berkembang (seperti dibahas di atas), termasuk saham dan obligasi Indonesia. Aliran masuk utang kewajiban pemerintah bersih berjumlah signifikan dan mencapai 5,6 miliar dolar AS, melampaui nilai-nilai puncak yang tercatat sebelumnya pada aliran masuk kuartalan pada tahun 2010 dan 2011. 2,4 miliar dolar AS mengalir masuk ke obligasi dalam valuta asing dan 3,2 miliar dolar AS mengalir ke obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah. Kewajiban ekuitas swasta bersih juga berjumlah signifikan sebesar 2,1 miliar dolar AS – nilai tertinggi sejak kuartal pertama 2013. Pembelian asing bersih untuk obligasi pemerintah dalam Rupiah, SBI, dan ekuitas tetap bertahan kuat pada kuartal kedua 2014, walau mulai melemah pada bulan Juni.

Kebutuhan pembiayaan luar negeri bruto tahunan melampaui 80 miliar dolar AS

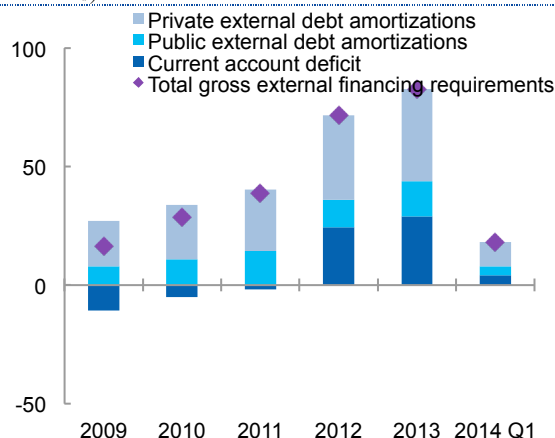
Masalah pembiayaan neraca berjalan harus dilihat dalam konteks kebutuhan pembiayaan bruto secara keseluruhan. Rasio jumlah utang luar negeri terhadap PDB tetap bertahan pada tingkat yang moderat, pada 32,4 persen dari PDB pada kuartal pertama 2014 (seperti diukur oleh BI), namun amortisasi dan tingkat utang luar negeri tumbuh dengan kuat, terutama bagi sektor swasta, dari tahun 2011-2013 (Gambar 16). Karenanya, kebutuhan pembiayaan luar negeri bruto telah meningkat pada beberapa tahun terakhir baik untuk membiayai defisit neraca berjalan dan memenuhi amortisasi utang luar negeri. Bahkan dari perkiraan jumlah kebutuhan pembiayaan luar negeri bruto pada tahun 2013 sebesar 83 miliar dolar AS (berdasar data BI), defisit neraca berjalan hanya mencapai 35 persen, sementara amortisasi utang sektor swasta dan publik masing-masing mencapai 50 persen dan 15 persen. Karenanya, tekanan pembiayaan luar negeri jangka pendek dapat timbul tidak hanya diakibatkan oleh semakin menantang nya pembiayaan neraca berjalan (baik karena pelebaran yang baru terjadi pada neraca berjalan atau karena penurunan aliran masuk investasi asing), namun juga bila terdapat peningkatan yang besar dalam biaya pengguliran utang swasta luar negeri, atau penurunan ketersediaan pembiayaan luar negeri secara lebih umum.

Gambar 15: Aliran masuk portofolio yang tertinggi selama dekade didorong oleh pinjaman pemerintah dan pulihnya minat terhadap aset-aset EMEs (miliar AS\$)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 16: Peningkatan hutang luar negeri swasta telah mendorong sebagian besar kebutuhan peningkatan pembiayaan luar negeri bruto pada beberapa tahun terakhir (miliar AS\$)



Catatan: Amortisasi utang luar negeri terdiri dari jumlah utang luar negeri yang jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang sebagai bulan pertama tahun tersebut

Sumber: BI; Kementerian Keuangan (DJPU); CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

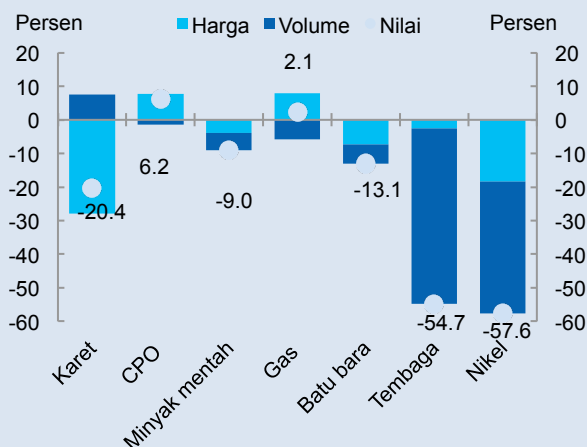
Kotak 1: Tantangan-tantangan terkini pada sektor ekspor komoditas Indonesia

Komoditas adalah bagian utama dari ekspor Indonesia, dengan minyak mentah, minyak sawit (*crude palm oil*, CPO), karet, gas, batubara, dan mineral lain membentuk lebih dari setengah nilai ekspor Indonesia pada tahun 2013. Sektor komoditas mentah juga membentuk sekitar seperlima dari pertumbuhan PDB riil pada periode tahun 2002 hingga 2012. Selain itu, perkiraan berdasarkan tabel masukan-keluaran (*Input-Output*) tahun 2008 menunjukkan bahwa, melalui efek berganda (*multiplier effect*), peningkatan suatu unit dalam *output* sektor komoditas mentah berkaitan dengan peningkatan 1,5 unit dalam jumlah *output* secara keseluruhan. Pengganda (*multiplier*) ini bahkan lebih besar pada sektor komoditas olahan, dimana peningkatan satu unit berkaitan dengan peningkatan 2,1 unit dalam jumlah *output*.

Ekspor komoditas Indonesia sedang menghadapi tantangan yang signifikan, dengan penurunan harga komoditas dunia dan peraturan pelarangan ekspor mineral mentah tertentu dan pajak ekspor pada seluruh ekspor mineral yang belum diolah, yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2014. Secara keseluruhan, persentase komoditas (mentah) terhadap nilai keseluruhan ekspor telah turun dari 60 persen pada tahun 2011 menjadi 53,3 persen pada tahun 2013, dan semakin menyusut ke 50 persen pada kuartal pertama tahun ini. Seperti dibahas di atas, dampak yang dapat diamati dari pelarangan ekspor mineral yang belum diolah bersifat negatif dari sudut pandang perdagangan.¹ Ekspor konsentrat tembaga telah berhenti secara efektif sejak bulan Februari 2014, dengan penghentian ekspor oleh Freeport dan Newmont, yang bertanggung jawab atas 97 persen ekspor konsentrat tembaga Indonesia. Serupa dengan itu, data perdagangan menunjukkan bahwa ekspor nikel, bauksit, timah, dan seng yang belum diolah, yang merupakan mineral-mineral utama lain yang terpengaruh oleh kebijakan itu, turun seperlimanya. Sebagai akibatnya, bagian dari bijih, terak, dan abu (definisi statistika perhitungan yang paling dekat untuk mineral mentah yang tersedia secara tepat waktu) turun dari 2,9 persen dari jumlah ekspor pada kuartal pertama 2013 menjadi 0,7 persen satu tahun berikutnya.

Gambar 17: Komoditas utama Indonesia mencatat penurunan harga dan volume ekspor pada kuartal pertama 2014

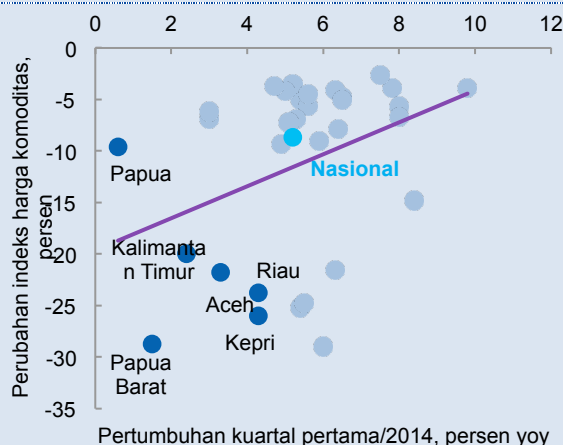
(perbandingan pertumbuhan nilai ekspor kuartal pertama/2014 terhadap kuartal pertama/2013 menurut volume dan harga, tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 18: Provinsi-provinsi yang paling terkait dengan sektor komoditas mencatat perlambatan yang signifikan pada kuartal pertama 2014

(persentase perubahan)



Catatan: Komoditas termasuk minyak, gas, karet, CPO, batubara, tembaga, nikel, aluminium, timah, seng dan biji besi. Indeks harga komoditas, untuk setiap provinsi dan pada tingkat nasional, tertimbang untuk setiap bagian komoditas dalam PDB provinsi dan nasional.

Sumber: BI; BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

Selain pengaruh langsungnya terhadap penerimaan ekspor, larangan ekspor mineral yang belum diolah dan penurunan harga komoditas global tampaknya akan membawa konsekuensi ekonomi makro dan sosial tambahan. Sebagai contoh, menurut data perdagangan bulanan BPS, permintaan untuk impor truk, mesin penggali, dan derek, yang digunakan pada sektor pertambangan, menurun sebesar 60 persen antara kuartal pertama 2012 dan kuartal pertama 2014, yang mengakibatkan penurunan impor barang-barang modal. Selain itu, larangan ekspor mineral mentah juga berkontribusi terhadap peningkatan ketidakpastian peraturan perundangan pada sektor tersebut, dengan potensi tantangan hukum dan adanya negosiasi yang sedang berlangsung untuk sejumlah peraturan utama, terutama yang berkaitan dengan pajak ekspor. Peningkatan ketidakpastian ini pada gilirannya dapat menurunkan investasi dalam sektor komoditas pada masa yang akan datang.

Selain itu, penurunan ketenagakerjaan, pendapatan, dan investasi baru yang disebabkan oleh perlambatan produksi dan ekspor komoditas, diperkirakan akan mempengaruhi sejumlah provinsi di Indonesia secara tidak seimbang dibanding provinsi lain. Daerah-daerah dengan risiko terbesar adalah daerah yang sektor komoditasnya memiliki bagian produksi (*output*) yang besar dan yang komoditas utamanya mencatat penurunan harga terbesar. Menurut perkiraan Bank Indonesia bagi PDB provinsi untuk kuartal pertama 2014 (Laporan Nusantara, bulan Mei 2014), provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Kepri, Papua, Riau, dan Papua Barat mencatat pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun yang cukup jauh berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 18).

Catatan: ¹ Lihat *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014 untuk pembahasan yang lebih mendalam tentang potensi dampak larangan ekspor sebagian mineral.

Proyeksi Bank Dunia masih tetap pada penyusutan bertahap defisit neraca transaksi berjalan Indonesia secara keseluruhan sepanjang tahun 2014

Ke depan, defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan pada 2,9 persen dari PDB atau 25,6 miliar dolar AS pada tahun 2014, tidak berubah dari perkiraan *Triwulanan* bulan Maret 2014. Proyeksi itu berdasar pada berlanjutnya perlemahan ekspor, yang terbebani oleh melemahnya harga komoditas dan larangan ekspor mineral yang belum diolah. Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan menyusut ke 2,4 persen dari PDB pada tahun 2015, mencerminkan data paruh pertama 2014, dibanding proyeksi 2,1 persen dari PDB pada *Triwulanan* bulan Maret 2014. “Neraca dasar”, yaitu jumlah saldo neraca berjalan dan penanaman modal asing langsung, diperkirakan akan tetap negatif melalui cakrawala prakiraan, walau menyusut dari -1,5 ke -1,1 persen dari PDB antara tahun 2014 dan 2015..

Tabel 3: Defisit neraca berjalan sebesar 2,9 persen dari PDB diproyeksikan pada kasus dasar (*base case*)
(miliar AS\$ kecuali dinyatakan lain)

	2013	2014	2015
Keseluruhan neraca pembayaran	-7,3	-2,0	0,9
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-0,8	-0,2	0,1
Neraca berjalan	-29,1	-25,6	-23,6
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-3,3	-2,9	-2,4
Neraca perdag. barang	6,0	6,7	5,8
Neraca perdag. Jasa	-12,1	-9,8	-10,1
Pendapatan	-27,0	-28,1	-26,2
Transfer	4,0	5,6	6,8
Neraca finansial dan modal	22,4	25,3	24,5
<i>Sebagai % dari PDB</i>	2,6	2,6	2,6
Investasi langsung	13,7	12,6	12,9
Investasi portofolio	9,8	15,1	12,4
Investasi lain	-1,1	-2,5	-0,8
Catatan:			
Neraca dasar	-15,4	-13,0	-10,7
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-1,6	-1,5	-1,1

Catatan: Neraca dasar = saldo neraca berjalan + FDI bersih
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

5. Harga-harga aset Indonesia menguat namun kondisi kredit mengalami pengetatan

Harga-harga aset finansial Indonesia telah naik, sementara kondisi kredit semakin menegat

Sebagian konsekuensi dari lebih besarnya aliran masuk modal asing, harga aset-aset finansial di Indonesia secara umum telah meningkat sejak awal tahun ini, menutupi sebagian besar penurunan yang terjadi pada paruh kedua tahun 2013. Namun sebagian besar peningkatan pada tahun 2014 sejauh ini terjadi pada kuartal pertama. Pada saat yang sama, likuiditas bank dalam mata uang dalam negeri masih relatif ketat, berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan kredit yang sedang berlangsung. Penurunan pertumbuhan kredit dan lebih rendahnya harga properti telah menjadi risiko penurunan terhadap prospek ekonomi. Pada saat yang bersamaan, lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan dapat turut mendorong perlemahan lanjutan dari permintaan kredit.

Rupiah melemah terhadap dolar AS pada kuartal kedua tahun 2014, setelah menguat pada tiga bulan pertama tahun 2014

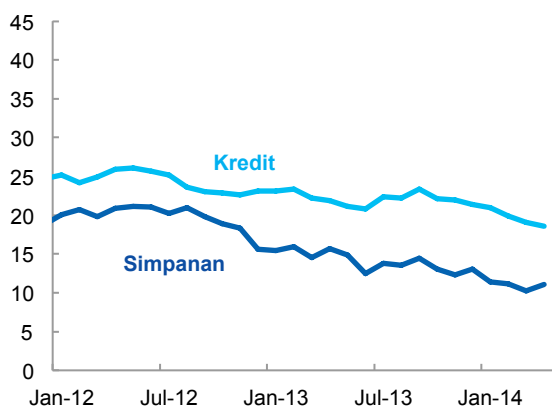
Rupiah melemah sebesar 2,7 persen terhadap dolar AS dari akhir bulan Maret hingga tanggal 15 Juli 2014, membalikkan sebagian peningkatan yang dicapai pada kuartal pertama sebesar 6,8 persen. Depresiasi yang baru terjadi itu mencerminkan tekanan terhadap saldo neraca berjalan pada kuartal kedua seperti telah disinggung di atas, dan tetap terjadi walau dengan derasnya aliran masuk modal. Likuiditas pada pasar mata uang luar negeri telah meningkat dengan rata-rata volume pasar *spot* luar negeri sebesar 1 miliar dolar AS per hari tahun ini, dibanding kurang dari 0,8 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2013. Dibandingkan dengan pertengahan bulan Mei 2013, sebelum terjadinya pembalikan aliran modal yang mengikuti pengumuman Bank Sentral Amerika Serikat tentang kemungkinan penurunan jumlah stimulus pembelian aset, kurs Rupiah lebih lemah 20,1 persen dibanding dolar AS pada tanggal 15 Juli 2014. Namun secara efektif riil (tertimbang perdagangan), terjadi depresiasi yang lebih moderat sebesar 10 persen hingga bulan Mei 2014.

Harga ekuitas dan obligasi telah meningkat tahun ini

Walau mencatat penurunan pada bulan Juni, harga ekuitas dan obligasi dalam negeri Indonesia telah meningkat selama tahun ini, dengan investor asing sebagai pembeli bersih yang signifikan dari ekuitas maupun obligasi pemerintah, seperti dibahas pada Bagian 4. Per tanggal 14 Juli 2014, ekuitas dalam negeri telah meningkat sebesar 5,3 persen sejak akhir bulan Maret dan naik 16 persen selama tahun berjalan. Keduanya telah membalik sebagian

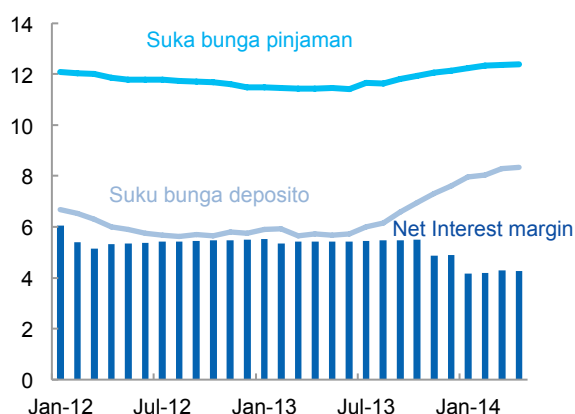
besar penurunan yang terjadi pada tahun 2013. Sejak awal bulan Januari, para investor asing telah membeli ekuitas dalam negeri seharga 41,4 triliun rupiah (atau mendekati 3,6 miliar dolar AS) dan obligasi pemerintah dalam Rupiah sebesar 87,9 triliun rupiah (atau sedikit di atas 7,6 miliar dolar AS). Imbal hasil (*yield*) obligasi pemerintah 10-tahunan mencatat penurunan tipis, sebesar 39 basis poin pada kuartal pertama 2014, namun kemudian meningkat sebesar 6 basis poin antara akhir bulan Maret dan pertengahan bulan Juli. Pada 8,3 persen pada tanggal 15 Juli 2014, *yield* itu masih jauh lebih tinggi dari tingkatan pada pertengahan bulan Mei tahun lalu (5,6 persen), mengikuti *yield* dalam negeri yang melonjak secara tiba-tiba.

Gambar 19: Perlambatan pertumbuhan simpanan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan kredit
(*pertumbuhan yoy, persen*)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 20: Bank-bank belum sepenuhnya membebaskan peningkatan biaya pendanaan mata uang dalam negeri terhadap para peminjam
(*persen*)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Pertumbuhan kredit terus melambat...

Pertumbuhan kredit yang telah melemah dan melambatnya pertumbuhan dalam persetujuan kredit menunjukkan bahwa tren ini akan terus berlanjut. Pertumbuhan kredit melambat ke 18,6 persen yoy pada bulan April 2014, dari 21,4 persen pada bulan Desember 2013 (Gambar 19). Pada periode yang sama, pertumbuhan kredit riil sesungguhnya, setelah penyesuaian dengan realisasi inflasi IHK, turun sebesar 1,8 poin persentase menjadi 10,5 persen yoy. Pertumbuhan kredit yang disesuaikan dengan pengaruh perubahan nilai tukar mencatat penurunan dari 17,3 persen yoy pada bulan Desember menjadi 15,8 persen yoy pada bulan April, dengan pinjaman dolar hanya meningkat sebesar 4,9 persen yoy pada bulan Maret setelah sebelumnya mencatat peningkatan sebesar 10,4 persen yoy pada bulan November lalu. Persetujuan pinjaman yang baru mencatat penurunan sebesar 12,1 persen yoy (rata-rata bergerak 3-bulanan, 3mma) pada bulan Mei, setelah turun sebesar 1,2 persen pada bulan Maret, dan dibandingkan dengan pertumbuhan 17,9 persen yoy (3mma) pada bulan Mei tahun lalu.

...terutama dirintangi oleh syarat pemberian kredit...

Kondisi pendanaan yang lebih ketat akibat melemahnya pertumbuhan simpanan tampaknya merupakan faktor utama di balik perlambatan dalam kredit bank. Pertumbuhan simpanan telah mencatat laju perlambatan yang lebih cepat dari pertumbuhan pinjaman sejak tahun 2012 (Gambar 19). Hal ini terjadi meskipun terdapat peningkatan pada rata-rata tingkat bunga simpanan dari sekitar 5,6 persen pada bulan Juni tahun lalu, menjadi lebih dari 8 persen pada bulan Maret 2014. Rasio utang terhadap simpanan (*loan to deposit ratio*, LDR) sistem perbankan berada pada angka 90,8 pada bulan April, hanya sedikit di bawah batas atas BI bagi masing-masing bank sebesar 92 persen, di atas peningkatan cadangan minimum perbankan. Seperti disinggung pada *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014, LDR bank-bank yang lebih kecil meningkat lebih tinggi dibanding bank-bank yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya segmentasi pasar dalam akses terhadap pendanaan pihak ketiga.

...dengan beragamnya tanda-tanda yang terkait permintaan kredit

Sementara pasokan kredit telah secara jelas menjadi lebih terbatas, bukti terakhir tentang kondisi permintaan kredit lebih bercampur. Sejak bulan Mei 2013, bank-bank tidak mampu atau tidak ingin meneruskan beban peningkatan biaya pendanaan kepada para peminjam, seperti ditunjukkan melalui penurunan pada selisih bunga (*spread*) kredit, di tengah peningkatan bunga simpanan (Gambar 20). Hal ini dapat menunjukkan lebih lemahnya permintaan kredit pada tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi, atau bank-bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dengan bunga yang lebih tinggi, sehingga tidak mendorong peningkatan dalam kredit macet.

Harga properti terus melemah di tengah tanda-tanda perlambatan kredit bank terkait properti

Harga properti perumahan semakin turun ke 7,9 persen yoy pada bulan Maret 2014 dibanding 11,5 persen pada Desember yang lalu, menurut indeks BI untuk 14 kota. Lebih rendahnya rasio pinjaman terhadap nilai (*loan-to-value*) untuk rumah kedua (atau rumah berikutnya), yang berlaku sejak bulan Maret 2013, dan lebih ketatnya likuiditas pasar terus mendorong penurunan dalam permintaan properti, terutama bagi rumah-rumah tinggal kelas menengah-bawah. Harga jual dan sewa perkantoran dan industri juga turun dari sekitar 30 persen yoy pada bulan Desember 2013 menjadi 15 persen pada bulan Maret 2014 (indeks BI 4 kota). Harga penjualan dan sewa apartemen juga mencatat penurunan. Satu alasan penurunan harga properti ini adalah penurunan dalam pembiayaan properti dari bank. Pinjaman properti secara keseluruhan mencatat pertumbuhan sebesar 23 persen yoy pada bulan April, turun dari 27 persen yoy pada akhir tahun 2013. Sejumlah bank dilaporkan telah membatasi kredit bagi sektor properti. Seperti dibahas di atas, prospek perlemahan harga properti merupakan risiko penurunan untuk prospek pertumbuhan jangka pendek, sejauh mana ia dapat mempengaruhi perlemahan investasi khususnya dalam bidang konstruksi.

Sektor korporasi, terutama perusahaan manufaktur, juga menyesuaikan dengan depresiasi Rupiah yang cukup besar selama tahun yang lalu...

Di luar kondisi kredit dan pembangunan sektor properti, sektor korporat Indonesia kini menghadapi empat tantangan utama: peningkatan biaya tenaga kerja dan tenaga listrik, pengetatan likuiditas pasar, dan perlemahan Rupiah. Faktor terakhir tampaknya merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap margin dan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan-perusahaan manufaktur, seperti produsen tekstil dan alas kaki, yang sebagian besar bahan bakunya (*input*) merupakan produk impor, mengalami dampak yang sangat besar dari perlemahan Rupiah. Pelemahan nilai tukar itu juga membawa dampak negatif yang besar terhadap perusahaan-perusahaan barang konsumsi seperti produsen makanan dan minuman. Namun depresiasi riil Rupiah dan peningkatan permintaan negara-negara berpenghasilan tinggi bagaimanapun diharapkan mampu mendorong pendapatan ekspor bagi perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia (seperti dibahas pada Bagian 4 di atas).

6. Sektor fiskal terus mengalami tekanan

DPR menyetujui APBN-P 2014, dengan peningkatan defisit sebagai tanggapan terhadap berlanjutnya tekanan fiskal...

Menanggapi perubahan ekonomi makro, lemahnya pertumbuhan pendapatan, dan meningkatnya biaya subsidi energi, Pemerintah mengusulkan perubahan yang cukup besar pada APBN 2014. Defisit pada APBN-P yang disetujui oleh DPR pada 18 Juni mencapai 2,4 persen dari PDB. Pemotongan anggaran sebesar 43 triliun rupiah bagi Kementerian negara juga disetujui (turun dari 100 triliun rupiah dari usulan awal Pemerintah) bersama-sama dengan penundaan pembayaran tunggakan subsidi energi yang meningkat yang berjumlah sekitar 50 triliun rupiah. Tambahan kebutuhan pembiayaan bersih dari tambahan defisit yang disetujui sebesar 66 triliun rupiah pada tahun 2014 diperkirakan akan didanai melalui penerbitan obligasi Pemerintah. Tanpa langkah-langkah kebijakan dan dengan adanya tunggakan subsidi energi, Pemerintah memproyeksikan bahwa defisit fiskal dapat mencapai sekitar 4,7 persen dari PDB.⁴

...yang sebagian berasal dari lebih lemahnya kinerja penerimaan

APBN-P 2014 menurunkan perkiraan pendapatan sebesar 31,8 triliun rupiah (atau 1,9 persen) dibanding APBN sebelumnya. Hal ini terutama karena penurunan dalam pendapatan non-migas sebesar 24,3 triliun rupiah (4,8 persen lebih rendah dari APBN sebelumnya) dan penurunan perkiraan pendapatan PPN sebesar 17,4 triliun rupiah (revisi turun sebesar 3,5

⁴ <http://finance.detik.com/read/2014/06/09/172547/2603338/4/kalau-apbn-tak-diubah-defisit-anggaran-2014-bisa-469-pdb>.

persen). Walau dengan produksi minyak yang lebih rendah secara signifikan pada 818.000 barel per hari (*barrels per day*, bpd) dari APBN awal (870.000 bpd), revisi proyeksi pendapatan pajak dan bukan pajak dari migas telah lebih tinggi dari APBN awal, sebagian besar karena depresiasi Rupiah. APBN-P 2014 tidak mengasumsikan perubahan kebijakan pendapatan yang signifikan pada tahun 2014 dan hanya memfokuskan pada peningkatan administrasi pajak untuk mencapai sasaran penerimaan pajak tahun 2014, misalnya melalui tagihan PPN dan penyerahan pajak penghasilan secara elektronik. Lemahnya kinerja penerimaan akan melanjutkan tren yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir (Kotak 2).

Kotak 2: Lemahnya kinerja penerimaan membawa dampak yang besar pada neraca fiskal selama beberapa tahun terakhir

Saat sebagian besar kekhawatiran tentang tren fiskal ada di sisi belanja, pelemahan kinerja penerimaan juga menjadi sumber utama tekanan fiskal. Pertumbuhan belanja dan penerimaan nominal telah sangat melambat sejak pertengahan tahun 2012 (Gambar 21). Melihat perincian perubahan dalam neraca fiskal pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2011 dan 2012, maka terlihat bahwa sebagian besar peningkatan dalam rasio defisit-terhadap-PDB berasal dari peningkatan belanja, yang sebagian besar mengalir ke subsidi. Namun pada tahun 2013, pelemahan penerimaan-terhadap-PDB menjadi bagian terbesar dari kenaikan defisit fiskal, yang menurun sebesar 0,9 poin persentase dari PDB dibanding penurunan belanja sebesar 0,6 poin persentase dari PDB (Gambar 22).

Total pertumbuhan pendapatan nominal menurun secara signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari pertumbuhan 21,6 persen yoy di tahun 2011 menjadi 10,5 persen yoy pada 2012, dan 6,8 persen yoy pada tahun 2013. Pertumbuhan PDB nominal juga turun selama periode tersebut, namun tak sebesar penurunan pertumbuhan pendapatan nominal: PDB nominal naik 15,1 persen pada tahun 2011, 10,9 persen pada 2012, dan 10,4 persen pada tahun 2013. Sebagai akibatnya penerimaan-terhadap-PDB telah turun dari 16,3 persen dan 16,2 persen pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 15,3 persen pada tahun 2013, yang merupakan angka paling rendah sejak tahun 1998/1999. Hal yang bisa menggambarkan sisi penerimaan adalah “*buoyancy* (kemampuan mengapung)”. Hal ini mengukur ketanggapan dari total penerimaan terhadap pertumbuhan pendapatan agregat, yang ditetapkan sebagai rasio persentase perubahan dalam penerimaan nominal terhadap persentase perubahan dalam PDB nominal. Jumlah *buoyancy* penerimaan adalah 1,4 pada tahun 2011, yang kemudian turun menjadi 0,9 dan 0,5 pada tahun 2012 dan 2013.

Gambar 21: Pertumbuhan belanja dan penerimaan nominal telah melambat sejak pertengahan tahun 2012...

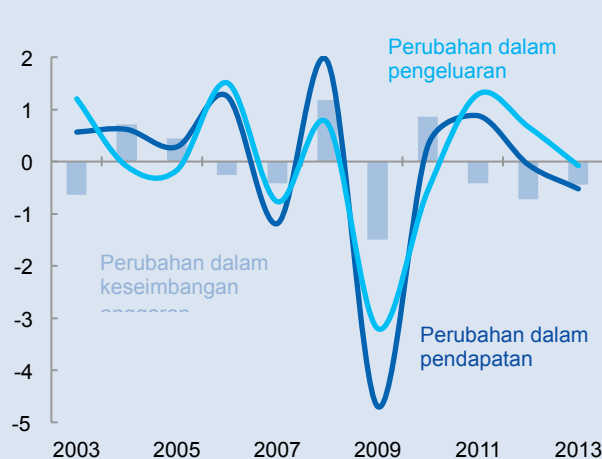
(jumlah 12 bulan, persen yoy)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 22: ...dengan turunnya penerimaan/PDB sebagai pendorong utama peningkatan defisit anggaran 2013

(perubahan tahunan dalam poin persentase dari PDB)

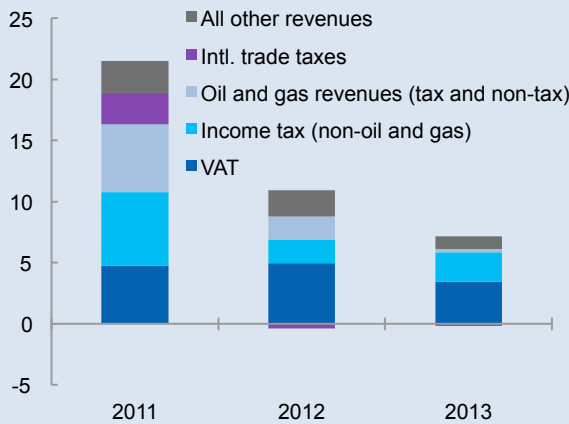


Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Pendorong utama dari pelemahan penerimaan adalah penerimaan migas (baik pajak dan bukan pajak) (Gambar 23). Pertumbuhan pajak pendapatan dari migas telah melambat dengan tajam, meningkat sebesar 6,3 persen yoy pada 2013, yang merupakan penurunan dari 14,2 persen dan 24,2 persen pada tahun 2012 dan 2011. Sementara itu, penerimaan non-migas mencatat kontraksi sebesar 1,1 persen pada tahun 2013, setelah sebelumnya naik sebesar 6,4 persen yoy (2012) dan 26,7 persen yoy (2011). Penerimaan dari sektor itu terkena dampak tren penurunan produksi minyak selama dua dekade terakhir serta sejumlah serangan volatilitas harga (termasuk pada tahun 2008/9), namun penerimaan pajak dan bukan pajak pada beberapa tahun terakhir menerima dampak paling besar dari penurunan produksi migas, dan bukan karena harga migas yang umumnya baik dalam Rupiah (Gambar 24).

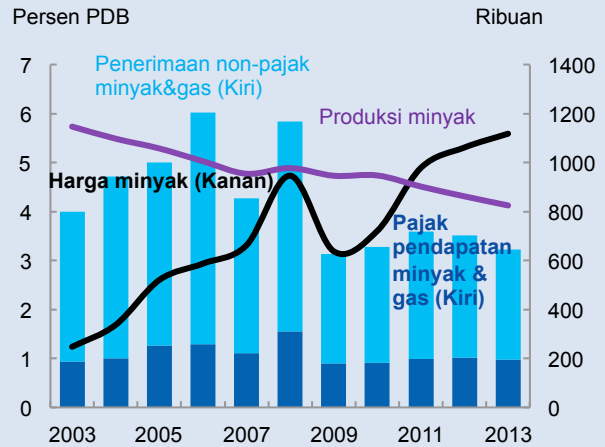
Pelemahan pertumbuhan penerimaan secara keseluruhan mencakup tidak hanya penerimaan migas. Pertumbuhan pajak pendapatan non-migas mencatat pelemahan tajam pada tahun 2012 (sebesar 6,6 persen yoy) dan pada tahun 2013 (sebesar 8,5 persen) dibanding tahun 2011 (sebesar 20,1 persen), walau kinerja relatif seperti diukur oleh *buoyancy* pajak pendapatan non-migas tetap stabil pada tahun 2012 dan 2013 (sebesar 0,6). Bersama-sama dengan penurunan umum dalam pertumbuhan PDB nominal, penurunan harga komoditas non-energi yang signifikan sejak tahun 2011, yang berdampak kepada pendapatan dan profitabilitas korporat, telah menjadi salah satu pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan dari sumber ini.

Gambar 23: Pelemahan pertumbuhan pendapatan bersifat keseluruhan namun sangat penting termasuk penerimaan migas...
(kontribusi terhadap keseluruhan pertumbuhan pendapatan nominal, poin persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 24: ...yang berdampak dari tren penurunan produksi minyak dan fluktuasi harga minyak
(pendapatan bukan pajak dan pajak pendapatan dalam persen dari PDB; harga minyak dalam ribuan Rupiah/barel; produksi minyak dalam ribu barel per hari)



Catatan: Sumbu vertikal kanan mengukur harga minyak dalam ribu Rupiah/barel dan produksi minyak dalam ribu barel per hari
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

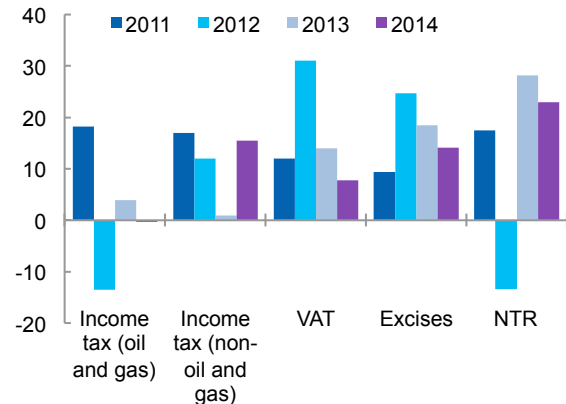
Penerimaan pendapatan tahun berjalan pada 2014 melanjutkan tren penurunan tahun lalu

Pelemahan pertumbuhan penerimaan jangka menengah yang dibahas pada Kotak 2 terus berlanjut ke kuartal pertama 2014, namun dengan peningkatan kecil dalam penerimaan pajak pendapatan non-migas dan pajak perdagangan internasional pada bulan April dan Mei. Seluruh komponen utama lain mencatat penurunan dalam pertumbuhan nominal tahun-ke-tahun dibanding periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya (Gambar 25). Data untuk kuartal pertama menunjukkan penerimaan-terhadap-PDB pada tingkat yang sama dengan periode-periode yang sebanding selama tiga tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pada umumnya didorong oleh pertumbuhan basis pajak. Penerimaan PPN melambat secara cukup signifikan (sebesar 7,8 persen yoy pada bulan Januari-Mei 2014), yang tampaknya terpengaruh oleh penyusutan impor (lihat Bagian 4).

Biaya subsidi energi yang cukup tinggi juga berkontribusi terhadap peningkatan defisit fiskal pada APBN-P yang telah disetujui...

Pada sisi pengeluaran, belanja hanya meningkat sebesar 34 triliun rupiah (atau lebih tinggi 2 persen dari APBN sebelumnya). Namun hal ini menyamakan besarnya potongan anggaran kementerian demi mengimbangi biaya subsidi energi yang lebih besar yang terus menjadi beban signifikan terhadap sektor fiskal. Walau dengan peningkatan harga BBM bersubsidi sebesar rata-rata 33 persen pada bulan Juni 2013, biaya subsidi energi masih terus meningkat, terutama karena pelemahan Rupiah sejak pertengahan tahun 2013, yang sekali lagi melebarkan kesenjangan antara harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah

Gambar 25: Peningkatan pertumbuhan pajak pendapatan non-migas tercatat pada Januari-Mei 2014 dan juga kinerja PPN yang lebih lemah
(pertumbuhan nominal pada bulan Januari-Mei dibanding periode yang lalu, persen)

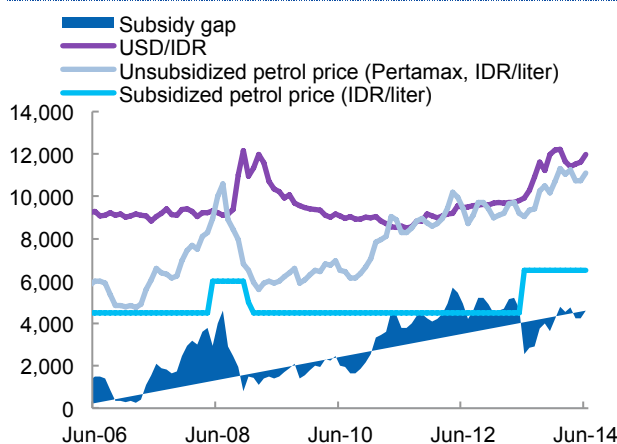


Catatan: NTR = penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

(Gambar 26). Menurut APBN-P 2014, dengan tidak adanya reformasi subsidi BBM, belanja subsidi energi akan meningkat sebesar 68 triliun rupiah dibanding APBN awalnya, sehingga mencapai 350 triliun rupiah (atau 3,5 persen dari PDB). Belanja subsidi BBM direvisi naik sebesar 36 triliun rupiah menjadi 246 triliun rupiah, sementara subsidi listrik meningkat sebesar 32 triliun rupiah menjadi 104 triliun rupiah (walau dengan peningkatan tarif yang signifikan, seperti dibahas di bawah). Namun semua itu masih jauh berada di bawah usulan pemerintah, sejalan dengan APBN-P yang disetujui, pembayaran untuk akumulasi tunggakan subsidi energi sebesar 50 triliun rupiah dibawa ke tahun 2015 (Gambar 27). Selain itu, APBN-P yang disetujui juga mengasumsikan kurs tukar yang sedikit lebih kuat (11.600 rupiah per dolar AS dibanding 11.700 rupiah seperti usulan Pemerintah).

Gambar 26: Perbedaan harga BBM bersubsidi dan harga pasar tetap tinggi...

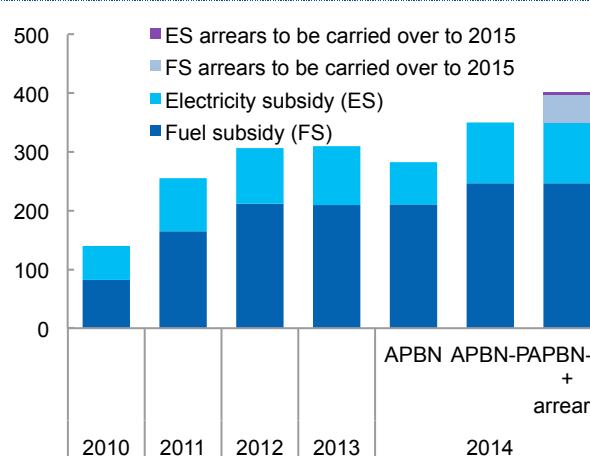
(Rupiah)



Catatan: Bensin bersubsidi (Premium, RON 88) memiliki oktan yang lebih rendah dari bensin tidak bersubsidi (Pertamax, RON 92)
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 27: ...yang akan meningkatkan belanja subsidi BBM pada tahun 2014

(triliun Rupiah)



Catatan: APBN adalah APBN awal, APBN-P adalah APBN dengan Perubahan
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

...dan sejauh mana kuota BBM bersubsidi mengikat akan mempengaruhi realisasi fiskal

APBN-P yang disetujui itu menurunkan volume BBM bersubsidi menjadi 46 juta kiloliter dibanding 48 juta kiloliter yang awalnya diusulkan oleh Pemerintah. Asumsi ini bersifat optimistis, karena angka ini berada di bawah realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun 2013 sebesar 46,4 juta kiloliter. Untuk tahun 2014, Pemerintah hendak menekankan pada langkah-langkah pembatasan kuantitatif (pengendalian volume konsumsi BBM) seperti pelaksanaan yang lebih ketat akan larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, negara dan pertambangan, transportasi laut bukan penumpang dan program konversi dari BBM ke gas. Pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut menghadapi tantangan penerapan dan memiliki tingkat efektivitas yang terbatas.⁵ Namun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, APBN-P 2014 menyertakan revisi terhadap Pasal 14, yang mempersempit keleluasaan Pemerintah dalam mengelola belanja subsidi energi. Pada UU APBN sebelumnya, Pemerintah dapat, dengan persetujuan DPR, menyesuaikan belanja subsidi energi menurut realisasi dan perubahan dalam proyeksi ekonomi makro dan persyaratan subsidi energi. Dalam UU APBN-P, rujukan terhadap persyaratan subsidi energi telah dihilangkan dan asumsi-asumsi ekonomi makro yang mana perubahan belanja subsidi energi diperkenankan kini secara jelas terbatas kepada dua indikator: harga minyak mentah (*Indonesian Crude Price*, ICP) dan kurs tukar. Hal ini berarti bahwa Pemerintah tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan belanja subsidi energi sesuai perubahan dalam persyaratan subsidi energi, termasuk kuotanya. Dengan menambahkan tekanan untuk mengendalikan volume konsumsi, perubahan ini dapat membuat kuota lebih mengikat dibanding sebelumnya. Jika hal itu memang mengikat, maka hal ini akan mengurangi sekitar 0,1 poin persentase dari proyeksi dasar (*baseline*) Bank Dunia tentang defisit anggaran 2014 sebesar 2,8 persen dari PDB (dibahas di bawah).

⁵ <http://www.antaraneews.com/berita/438835/pemerintah-optimistis-kuota-bbm-46-juta-kiloliter>.

Tabel 4: Tarif listrik meningkat secara signifikan untuk hampir seluruh kelompok pengguna besar, kecuali rumah tangga dengan konsumsi yang rendah...

(tarif dasar dan baru yang final setelah penerapan bertahap, sesuai pengumuman bulan Mei dan Juli)

	Tarif dasar (Rp/kWh)	Tarif akhir menurut pengumuman: (Rp/kWh)		Perubahan tarif (%)
		Mei atrn.	Juli atrn.	
RT R-1 (1300 VA)	979	--	1.352	38,1
RT R-1 (2200 VA)	1.004	--	1.352	34,7
RT R-2 (3500-5500 VA)	1.145	--	1.352	18,1
RT R-3 (>6600 VA)*	1.352	1.530	--	13,1
Industri I-3 (>200 kVA; tidak terdaftar)	864	--	1.200	38,9
Industri I-3 (>200 kVA; terdaftar)	864	1.200	--	38,9
Industri I-4 (>30000 kVA)	732	1.191	--	62,7
Usaha B-2 (6600 VA-200 kVA)*	1.352	1.530	--	13,1
Usaha-B-3 (>200 kVA)*	1.117	1.264	--	13,1
Pemerintah P-1 (6600 VA-20 kVA)*	1.352	1.530	--	13,1
Pemerintah P-2 (>200 kVA)	1.026	--	1.200	17,0
Pemerintah P-3 (penerangan jalan)	997	--	1.352	35,6

Catatan: Angka-angka adalah tarif akhir baru (setelah penerapan bertahap), masing-masing sesuai peraturan bulan Mei dan Juli (atrn.); "RT": rumah tangga; status terdaftar adalah terdaftar pada bursa saham; * adalah penyesuaian tarif otomatis, yang mana tarif baru tidak akan disubsidi dan akan ditentukan setiap bulan oleh PLN berdasar inflasi, kurs tukar, dan harga minyak.

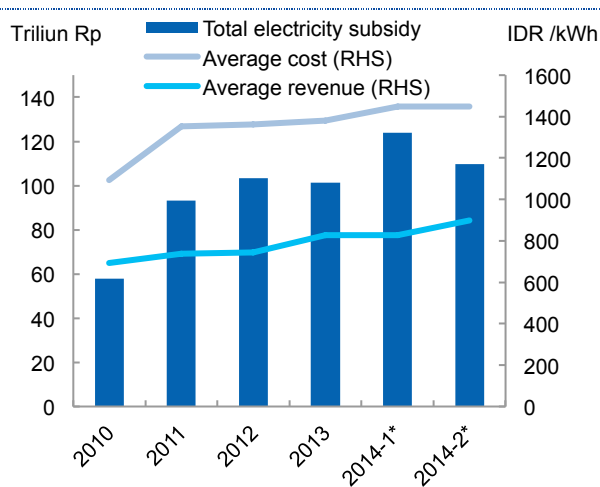
Sumber: Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 9/2013; perhitungan staf Bank Dunia

Penyesuaian tarif listrik mencatat kemajuan

Mengikuti penyesuaian tarif untuk kelompok industri dan usaha besar pada bulan Mei, Pemerintah menetapkan penyesuaian tarif lanjutan untuk enam kelompok pelanggan tambahan sebagai bagian dari APBN-P 2014, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014. Penyesuaian itu akan berlaku secara bertahap pada bulan Juli, September, dan November, dan bersama-sama dengan peningkatan yang diumumkan pada bulan Mei, akan menghasilkan peningkatan tarif listrik yang signifikan bagi hampir seluruh kelompok pengguna besar (Tabel 4). Melalui penyesuaian tarif tambahan ini, Pemerintah memproyeksikan penghematan anggaran negara sebesar 8,5 triliun rupiah pada APBN tahun 2014, namun besaran belanja subsidi listrik masih tetap signifikan, seperti dibahas di atas, dengan proyeksi sebesar 103,8 triliun rupiah pada tahun 2014 menurut APBN-P, naik sebesar 45,5 persen dari APBN yang belum mengalami perubahan, dan naik sebesar 3,8 persen dari realisasi belanja pada tahun 2013 (Gambar 28), akibat meningkatnya biaya masukan (*input*).⁶ Penghematan biaya subsidi setahun penuh dapat digambarkan dengan menggunakan penyesuaian tarif yang diumumkan pada bulan Mei dan Juli secara hipotetis terhadap tarif setahun penuh (2014), yang menunjukkan bahwa penghematan tahunan berada pada kisaran 37,2 triliun rupiah dibanding skenario tanpa perubahan. Namun dengan mekanisme penyesuaian harga otomatis yang hanya berlaku untuk beberapa pelanggan saja sebagai bagian dari peraturan baru pada bulan Mei (namun bukan Juli), penghematan itu masih rentan terhadap tekanan kenaikan baru yang terkait dengan biaya pasokan listrik, terutama yang berasal dari depresiasi lanjutan Rupiah atau kenaikan biaya energi internasional. Dampak kenaikan tarif tersebut terhadap biaya, tanggapan perusahaan dan harga-harga, akan bervariasi bergantung kepada struktur industri dan perusahaan, namun

Gambar 28: ...yang menurunkan kesenjangan harga subsidi yang ada dan menghasilkan penghematan yang besar dibanding skenario tanpa perubahan tarif

(triliun Rupiah dan Rupiah/kilowatt per jam, kWh)



Catatan: *2014-1: tidak ada perubahan tarif; 2014-2: mengikuti kenaikan sesuai peraturan

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

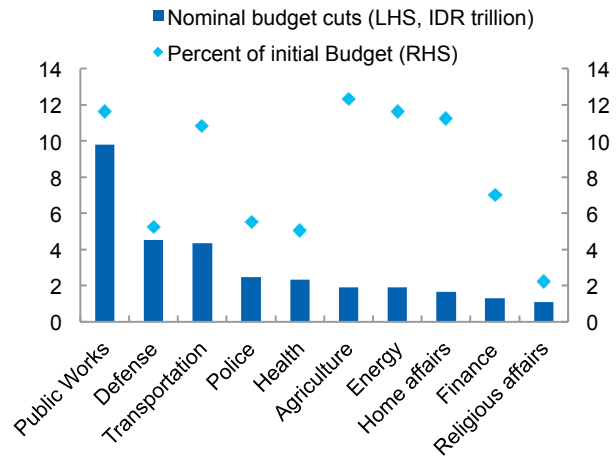
⁶ <http://nasional.kontan.co.id/news/banggar-sepakati-subsidi-listrik-ap-billion-p-2014>.

dengan besarnya ukuran peningkatan selama setahun, maka hal ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

APBN-P menyertakan pemotongan anggaran kementerian sebesar 43 triliun rupiah untuk mengurangi defisit anggaran, dengan tidak adanya reformasi subsidi BBM

Dengan tidak adanya pemotongan yang memadai berbasis kebijakan, APBN-P menyertakan pemotongan anggaran kementerian negara sebesar 43 triliun rupiah, yang merupakan 7 persen dari alokasi anggaran kementerian pada APBN awal. Pemotongan yang disetujui kurang dari setengah dibandingkan usulan pemotongan sebesar 100 triliun rupiah yang diajukan oleh Pemerintah pada RAPBN-P dan difokuskan pada jenis belanja seperti perjalanan dinas, rapat, dan seminar seperti yang diatur dalam Inpres.⁷ Namun pemotongan itu juga mempengaruhi sejumlah belanja kementerian utama, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan (Gambar 29). Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pemotongan anggaran yang paling besar, yaitu hampir mencapai 10 triliun rupiah (hampir 12 persen dari anggaran awalnya) dan merupakan 23 persen dari seluruh pemotongan anggaran, diikuti oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan. Belum jelas apakah pemotongan itu dapat secara realistis dipertahankan pada anggaran-anggaran berikutnya, yang akan menambah risiko-risiko fiskal masa depan.

Gambar 29: Kementerian-kementerian utama menghadapi pemotongan anggaran yang signifikan
(potongan anggaran dalam IDR triliun; potongan anggaran sebagai bagian APBN awal, persen)

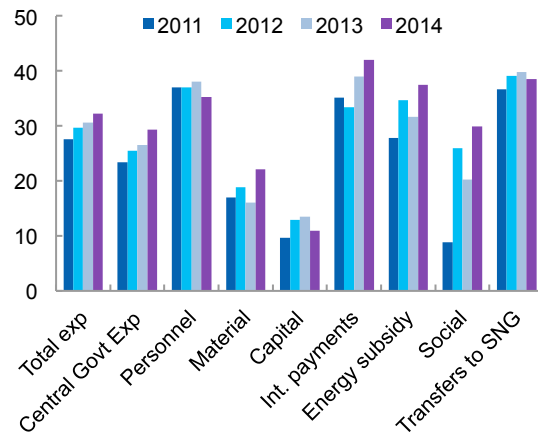


Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Selama lima bulan pertama di tahun 2014, hampir sepertiga dari APBN-P telah dihabiskan, dimana tingkat pencairan subsidi energi, sosial dan pembayaran bunga melebihi tingkatan sebelumnya

Pada akhir bulan Mei 2014, 605 triliun rupiah atau 32 persen dari alokasi APBN-P telah dibelanjakan, menunjukkan tingkat pencairan yang sedikit lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian penyebabnya adalah kenaikan subsidi energi dan pembayaran bunga karena depresiasi Rupiah, dan kenaikan belanja sosial akibat pencairan premi jaminan sosial kesehatan yang tepat waktu kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun pelaksanaan belanja modal masih menghadapi tantangan. Per bulan Mei, tingkat pencairan belanja modal masih berada pada 11 persen dari APBN-P, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya (Gambar 30).

Gambar 30: Pada tahun 2014 hingga bulan Mei, pencairan belanja inti pemerintah masih tetap rendah
(bagian APBN-P, persen)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

⁷ Instruksi Presiden No. 4/2014.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru membatasi peran DPR dalam pembahasan APBN pada tingkat teknis

Pada tanggal 22 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan bagaimana DPR bekerja sama dengan Pemerintah dalam penyusunan APBN. Mahkamah itu menerima dua dari empat petisi dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan keputusan itu membatasi keterlibatan DPR pada tingkat teknis dari anggaran, serta menghapus kewenangan DPR dalam memberikan persyaratan pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (yang dikenal dengan pemberian tanda bintang). Keputusan-keputusan tersebut dipandang sebagai perkembangan positif, misalnya dengan pernyataan dari Wakil Kepala Bappenas bahwa, penghapusan kewenangan DPR dalam pelaksanaan APBN dan penghentian DIPA (memberikan tanda bintang) akan mendukung langkah-langkah percepatan pencairan anggaran. Keputusan itu juga diperkirakan akan dapat membantu meningkatkan keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran hingga ke tingkat kebijakan dan program. Keputusan itu berlaku segera, dimulai dengan penyusunan RAPBN-P 2014.

Bank Dunia telah menaikkan proyeksi defisit fiskal Indonesia menjadi 2,8 persen dari PDB untuk tahun 2014

Memperhitungkan perkembangan ekonomi makro terbaru, dan APBN-P yang baru disahkan, Bank Dunia telah menaikkan proyeksi defisit fiskalnya untuk tahun 2014 menjadi 2,8 persen dari PDB pada skenario dasar (*baseline*) (Tabel 5), dari 2,6 persen pada *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014. Namun proyeksi ini tidak menyertakan tunggakan subsidi energi sebesar 50 triliun rupiah dan juga mengasumsikan realisasi anggaran kementerian yang tidak sepenuhnya dieksekusi (dengan belanja modal tahun 2014 kini diproyeksikan akan turun dari tingkat awal tahun 2013). Bila menyertakan tunggakan subsidi energi dan mengasumsikan realisasi penuh anggaran kementerian maka proyeksi defisit fiskal akan meningkat menjadi 4,0 persen terhadap PDB. Bank Dunia memperkirakan penerimaan negara pada tahun 2014 akan terus mengalami pelemahan dan telah menurunkan proyeksi penerimaan negara sebesar 2,6 persen, terutama karena turunnya perkiraan penerimaan pajak, dengan adanya produksi migas yang lebih rendah, perlambatan dalam penerimaan PPN (akibat perkiraan moderasi impor dan konsumsi swasta), dan penurunan pajak pendapatan badan akibat larangan ekspor mineral yang belum diolah.

APBN-P meningkatkan kebutuhan pembiayaan bruto secara signifikan, namun pembiayaan obligasi pemerintah sampai pertengahan bulan Juli baru mencapai lebih dari 60 persen dari revisi sasaran selama setahun penuh

Rencana defisit fiskal yang lebih besar mengakibatkan peningkatan yang signifikan, sebesar 66,1 triliun rupiah, dalam kebutuhan pembiayaan bersih selama sisa tahun 2014. Amortisasi utang resmi luar negeri juga telah meningkat sebesar 5,4 triliun rupiah, yang mencerminkan depresiasi Rupiah. Pemerintah berencana untuk memenuhi peningkatan keseluruhan kebutuhan pembiayaan bruto terutama dengan penambahan penerbitan sekuritas, bersama-sama dengan peningkatan pencairan pinjaman program resmi. Sasaran pembiayaan sekuritas bruto untuk tahun 2014 meningkat sebesar 60,7 triliun rupiah menjadi 430,2 triliun rupiah. Sebelum peningkatan sasaran pembiayaan tersebut, penerbitan sekuritas sudah berada jauh melebihi sasaran, dengan penerbitan obligasi sebesar 231,9 triliun rupiah pada paruh pertama tahun 2014. Penerbitan pada paruh kedua juga dimulai dengan kuat, dengan penerbitan obligasi 7-tahun dalam mata uang Euro untuk pertama kali dengan nilai 1 miliar euro, yang mencatat kelebihan pesanan hampir tujuh kali, dengan penetapan imbal hasil (*yield*) di bawah 3 persen. Hingga tanggal 11 Juli, Pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai 280,9 triliun rupiah selama tahun 2014, yang merupakan 65 persen dari sasaran penerbitan selama setahun penuh. Pembiayaan dengan sekuritas masih berjalan sesuai jadwal untuk tahun 2014, namun peningkatan pasokan memang meningkatkan risiko-risiko pembiayaan, dan berlanjutnya ketahanan *yield* dalam negeri akan bergantung sebagian pada tetap kuatnya pembelian obligasi dalam negeri oleh investor asing. Para investor asing telah melampaui perbankan sebagai kelompok kelembagaan terbesar yang memiliki obligasi pemerintah yang dapat diperdagangkan dalam mata uang dalam negeri, dengan tingkat kepemilikan 34,3 persen dari keseluruhan; investor asing telah memiliki hingga 54 persen dari kenaikan obligasi pemerintah dalam negeri yang beredar pada tahun 2014 sebesar 85,6 triliun rupiah per tanggal 11 Juli 2014.⁸

⁸ Seluruh angka-angka pada paragraf ini berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.

Tabel 5: Bank Dunia telah menaikan proyeksi defisit APBN-nya menjadi 2,8 persen dari PDB
(triliun Rp, kecuali dinyatakan lain)

	2013	2014		2014	
	Realisasi awal	APBN	APBN-P	IEQ Mar 2014	IEQ Jul 2014
A. Penerimaan	1.430	1.667	1.635	1.581	1.540
1. Penerimaan pajak	1.072	1.280	1.246	1.216	1.188
Pajak pendapatan	503	586	570	561	543
Migas	89	76	84	95	87
Non-migas	414	510	486	466	456
PPN	383	493	476	448	440
2. Penerimaan bukan pajak	353	385	387	362	351
B. Pengeluaran	1.639	1.842	1.877	1.845	1.821
1. Pemerintah pusat, terdiri dari	1.126	1.250	1.280	1.259	1.229
Pegawai	221	263	259	261	244
Barang	168	216	178	184	169
Modal	172	184	186	185	165
Pembayaran bunga	113	121	135	126	136
Subsidi, terdiri dari	355	334	403	416	410
Subsidi energi	310	282	350	370	363
Subsidi BBM	210	211	246	267	259
Subsidi listrik	100	71	104	103	104
Non-energi	45	52	53	46	47
Hibah	1	4	3	4	3
Sosial	92	92	88	55	85
Lain-lain	4	37	28	29	17
2. Transfer ke daerah	513	593	597	586	593
C. Neraca primer	-97	-54	-106	-138	-145
D. Saldo keseluruhan	-210	-175	-241	-264	-281
<i>sebagai persen dari PDB</i>	-2,3	-1,7	-2,4	-2,6	-2,8
<i>Asumsi ekonomi utama</i>					
Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,7	6,0	5,5	5,3	5,3
IHK (yoy, persen)	8,4	5,5	5,3	6,2	5,8
Kurs tukar (Rp/AS\$)	10.542	10.500	11.600	12.000	11.800
Harga minyak (AS\$/barel)	106	105	105	105	106
Produksi minyak (ribu barel/hari)	825	870	818	n.a	n.a
Konsumsi BBM bersubsidi (juta KL)	46,4	48,0	46,0	47,9	47,8

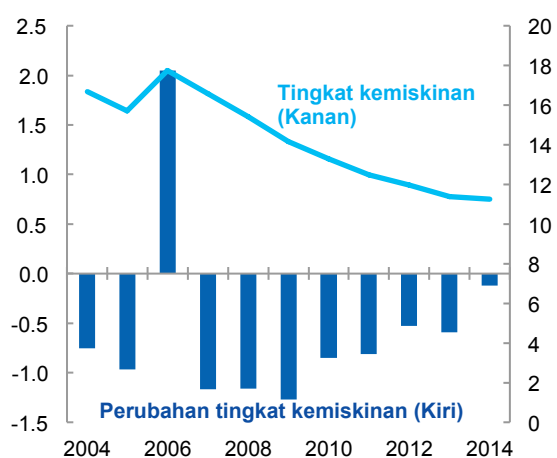
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

7. Laju pengentasan kemiskinan telah melambat

Sasaran tingkat kemiskinan Pemerintah untuk tahun 2014 tampaknya tidak akan tercapai yang diakibatkan oleh melambatnya laju pengentasan kemiskinan

Tingkat kemiskinan resmi, seperti diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 11,3 persen pada bulan Maret 2014, yang merupakan penurunan tipis sebesar 0,1 poin persentase dari 11,4 persen yang tercatat pada bulan Maret 2013. Laju penurunan itu melanjutkan tren perlambatan dalam pengentasan kemiskinan selama lima tahun terakhir, dengan penurunan tingkat kemiskinan tahunan hanya mencapai kurang dari 1 poin persentase setiap tahun, dan selama tiga tahun terakhir hanya mencatat penurunan tingkat kemiskinan yang kecil. Penurunan yang hampir mendekati nol pada tahun 2014 itu merupakan yang paling kecil selama satu dekade, dengan pengecualian peningkatan yang hampir mencapai 2 poin persentase pada tahun 2006 yang terutama disebabkan oleh kejutan harga bahan pangan (Gambar 31). Dengan tingkat kemiskinan yang kini berada pada 11,3 persen, sasaran tingkat kemiskinan pemerintah untuk tahun 2014 pada 8-10 persen menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjalan untuk periode 2009-14, tampaknya tidak akan tercapai saat tingkat kemiskinan bulan September 2014 diumumkan (pengumuman diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2015).

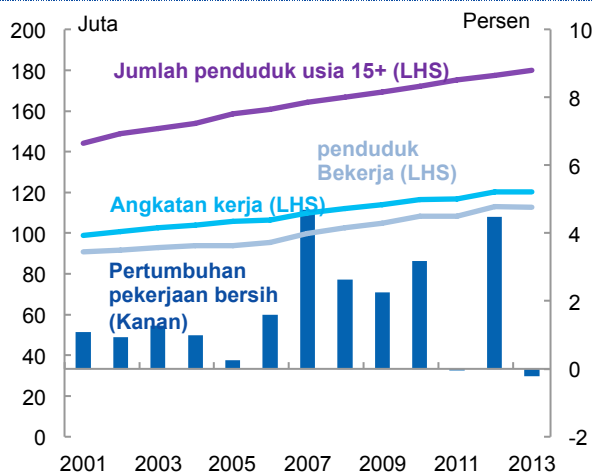
Gambar 31: Laju pengentasan kemiskinan pada tiga tahun terakhir adalah yang paling lambat selama satu dekade... (persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 32: ...dan data pasar tenaga kerja terakhir pada Agustus menunjukkan perlambatan pertumbuhan ketenagakerjaan pada tahun 2013

(juta orang, dan pertumbuhan ketenagakerjaan bersih, persen)



Catatan: Perhitungan dari pembobotan balik dari sensus penduduk 2010, seperti diterapkan oleh BPS pada awal Februari 2014, yang menyiratkan revisi terhadap rangkaian tahun 2011, 2012, dan 2013. Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Faktor-faktor yang berkontribusi adalah penduduk miskin yang masih ada semakin sulit dijangkau, dan pertumbuhan ekonomi semakin terbagi secara tidak merata...

Terdapat sejumlah alasan di balik perlambatan pengentasan kemiskinan.⁹ Satu faktor yang penting adalah ketika kemiskinan mendekati 10 persen, posisi penduduk miskin yang masih ada akan semakin jauh di bawah garis kemiskinan, yang berarti bahwa akan dibutuhkan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi pada bagian dasar distribusi pendapatan untuk menjaga laju pengentasan kemiskinan seperti yang lalu. Selain itu, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang melambat, namun keterlibatan kaum miskin dan lemah di dalam pertumbuhan tersebut juga semakin menyusut, dibandingkan penduduk Indonesia yang lebih mampu, sehingga berkontribusi terhadap pelebaran ketimpangan, yang dibahas pada Bagian C.

...di tengah-tengah tanda-tanda pada data ketenagakerjaan terakhir yang

Faktor lain yang dapat menghambat pengentasan kemiskinan adalah perlambatan dalam pertumbuhan ketenagakerjaan. Data pasar tenaga kerja terakhir yang diterbitkan oleh BPS pada bulan Mei 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja mencapai 112,8 juta pada bulan Agustus 2013, turun sebesar 0,2 persen dari satu tahun lalu (Gambar 32).

⁹ Lihat *Triwulanan* bulan Desember 2013 untuk pembahasan terperinci tentang perlambatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

menunjukkan perlambatan penciptaan lapangan kerja

Penurunan ini terkait dengan pertumbuhan yang stagnan dalam ketenagakerjaan formal pada periode 2012-2013, setelah mengalami pertumbuhan kuat pada periode 2010-2012. Karenanya, tingkat pengangguran meningkat menjadi 6,2 persen pada bulan Agustus 2013, naik dari 6,1 persen pada tahun 2012, sementara porsi penduduk usia kerja yang ada dalam penduduk yang berkerja turun sebesar satu poin persentase menjadi 62,7 persen.

8. Risiko-risiko fiskal telah menjadi fokus

Risiko-risiko internasional yang mengancam prospek Indonesia telah menjadi lebih berimbang untuk jangka pendek

Skenario dasar (*baseline*) Bank Dunia untuk prospek Indonesia adalah sedikit perlambatan dalam pertumbuhan PDB dan berlanjutnya peningkatan pada saldo neraca berjalan. Terdapat sejumlah risiko-risiko dalam dan luar negeri yang mengancam keadaan dasar (*base case*). Walau risiko-risiko jangka pendek pada pasar-pasar finansial internasional, yang berasal dari normalisasi kebijakan moneter pada negara-negara maju, telah menurunkan tekanannya, mereka belum sepenuhnya lenyap. Selama jangka menengah, gejolak lebih lanjut mungkin terjadi, karena pasar sedang menunggu keputusan moneter selanjutnya oleh negara-negara berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, konflik di Irak dan potensinya yang akan mempengaruhi harga minyak dunia merupakan risiko penurunan yang bersifat langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia memiliki risiko menderita kerugian dari peningkatan harga minyak karena kenaikan itu akan menambah beban defisit fiskal lewat dampak langsung yang cukup besar dari kenaikan belanja subsidi BBM. Selain itu, sebagai eksportir komoditas yang besar, Indonesia selalu peka terhadap perkembangan di Tiongkok, yaitu pada proses yang terus berlangsung di negara itu dalam upayanya menyeimbangkan kembali ekonominya dengan sasaran untuk meminimalkan risiko-risiko stabilitas finansial.

Transisi ke Pemerintahan yang baru, dan prioritas kebijakan jangka pendeknya, terutama yang terkait dengan posisi fiskal, akan menggambarkan risiko-risiko jangka pendek dalam negeri

Sementara prospek pertumbuhan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014, sejumlah risiko-risiko jangka pendek, terutama yang berkaitan dengan posisi fiskal Indonesia, menunjukkan peningkatan. Belanja investasi tetap dan konsumsi swasta, terutama bangunan, mencatat perlambatan yang melebihi proyeksi pada kasus dasar (*base case*), jika kondisi kredit dan harga properti mengalami penurunan yang melampaui perkiraan. Setelah hasil resmi pemilu Presiden diumumkan, perhatian investor akan beralih kepada prioritas kebijakan Pemerintahan yang baru, terutama yang berkaitan dengan subsidi energi, karena adanya pelemahan neraca fiskal. Reformasi apapun yang terkait dengan subsidi BBM, bersama dengan dampak yang lebih besar dari proyeksi yang terkait dengan peningkatan tarif listrik, merupakan risiko yang dapat menaikkan inflasi harga konsumen. Pengaruh kondisi El Niño terhadap harga bahan pangan, yang mewakili 35 persen dari keranjang IHK, adalah risiko kenaikan inflasi lainnya serta kemungkinan risiko negatif yang signifikan terhadap konsumsi penduduk miskin.

Seperti pada banyak EMEs lainnya, terdapat keprihatinan yang besar akan jalur lintasan potensi pertumbuhan (*output*) di masa depan

Melihat lebih jauh dari prospek global jangka pendek yang lebih ramah, dan transisi dunia politik dalam negeri, prospek ekonomi jangka menengah dan jangka panjang mengandung faktor ketidakpastian yang cukup besar. Setelah mencatat prestasi yang kuat selama tiga tahun pascakrisis, pertumbuhan pembentukan modal tetap riil mulai mencatat pelemahan yang cukup besar sejak tahun 2012. Di tengah-tengah pelemahan harga-harga komoditas, investasi tampaknya akan semakin melambat dengan semakin ketatnya likuiditas internasional dan semakin tingginya biaya modal. Seperti pada banyak EMEs lainnya, dan walau terdapat potensi “bonus demografis” selama dua dekade berikut, pertumbuhan angkatan kerja juga melambat. Seluruh faktor-faktor tersebut merupakan risiko-risiko yang signifikan terhadap potensi pertumbuhan produksi (*output*). Mereka juga menjadi faktor penentu reformasi kebijakan yang memiliki sasaran pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat, sebagai landasan bagi peningkatan pertumbuhan pendapatan yang akan mendorong upaya Indonesia untuk terus meningkatkan status negara berpenghasilan menengahnya.¹⁰

¹⁰ Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Bank Dunia (2014), Tinjauan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2014: “Menghindari Perangkap”, <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/06/23/indonesia-2014-development-policy-review>.

B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia



1. El Niño, kebakaran hutan dan kabut: Tindakan konkrit yang mendesak untuk dilakukan

Kebakaran lahan dan hutan, yang bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia, mencatat peningkatan frekuensi dan area

Indonesia mencatat terjadinya kebakaran lahan dan hutan skala besar secara tahunan sejak tahun 1982,¹¹ bersama-sama dengan kerusakan lingkungan dan dampak ekonomi yang signifikan. Sesungguhnya kebakaran hutan bukanlah hal baru di Indonesia – catatan-catatan historis yang dirangkum oleh Kementerian Kehutanan¹ menunjukkan terjadinya kebakaran hutan, walau dalam skala yang lebih kecil, dan adanya musim kemarau yang rawan kebakaran antara bulan Mei dan November, sudah tercatat sejak masa penjajahan Belanda. Namun sementara kebakaran bukanlah hal yang baru, kebakaran dalam skala besar secara berulang setiap tahun merupakan tren yang terjadi hanya baru-baru ini. Bagian ini memberikan tinjauan singkat tentang masalah yang rumit ini, menggunakan kebakaran besar di provinsi Riau (bagian timur pulau Sumatra) pada awal tahun 2014 sebagai studi kasus, terutama dengan peningkatan risiko-risiko jangka pendek dan kemungkinan terjadinya kondisi El Niño pada tahun ini.

a. Penyebab utama berulangnya kebakaran lahan dan hutan

Penyebab kebakaran hutan di Indonesia telah dipahami dengan baik...

Sejumlah penelitian telah mendokumentasikan penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia. sebagai contoh, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (*Center for International Forestry Research*, CIFOR) telah meneliti penyebab utama dan dampak kebakaran di Asia Tenggara, yang mempelajari praktik pengembangan lahan tradisional di dataran rendah dan tinggi di Pulau Sumatra. Penelitian itu menemukan sejumlah penyebab utama kebakaran hutan, termasuk penyiapan lahan bagi pertanian, pembalakan liar, jaminan kepemilikan lahan masyarakat yang tidak pasti dan spekulasi lahan.¹²

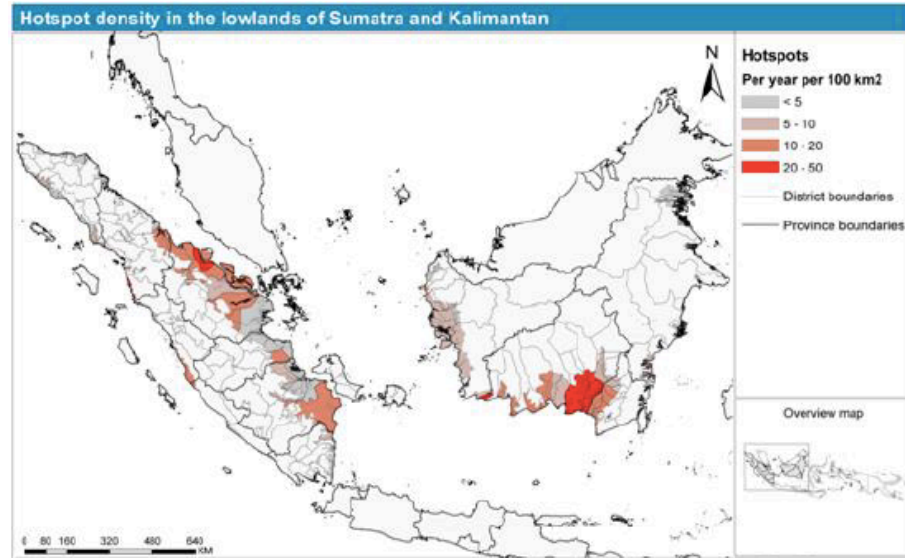
¹¹ Kementerian Kehutanan, 25 September 2013, “Sejarah Kebakaran Hutan di Indonesia”.

¹² CIFOR, Maret 2001, “Penyebab utama dan dampak kebakaran di Asia Tenggara”.

...dan termasuk lahan gambut yang rusak

Kebakaran lahan gambut juga menjadi penyebab utama kebakaran hutan baru, selain pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan (lihat Kotak 3). Di Pulau Sumatra, sebagian besar lahan gambut terletak pada pesisir timur, dimana masih tersisa enam hutan berukuran besar. Lima dari hutan tersebut berada di Provinsi Riau. Secara keseluruhan 72 persen dari tutupan hutan gambut, yang sebelumnya memiliki luas 6,5 juta hektar (ha.) di dataran rendah Sumatra, diperkirakan telah hilang pada tahun 2010. Jumlah tutupan hutan tersebut kini hanya mencapai 2,4 juta ha., dengan sekitar 1,5 juta ha. telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan.

Gambar 33: Kepadatan *hotspot* satelit menunjukkan frekuensi kebakaran tahun 2001-10, menurut daerah



Catatan: Data satelit dari MODIS (*Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer*)

Sumber: Bank Dunia, Februari 2012, "Makalah Tematis 4: Pola Kemarau dan Kebakaran Lahan Gambut di Dataran Rendah Sumatra dan Kalimantan".

Data satelit menunjukkan bahwa daerah gambut memiliki prevalensi yang lebih tinggi akan titik panas, yang dikaitkan dengan kebakaran

Terjadinya kebakaran pada lahan gambut dapat digambarkan dengan peta frekuensi titik-titik panas (*hotspot*) yaitu titik-titik yang memiliki suhu yang lebih hangat dibanding daerah sekitarnya. Dengan menggunakan data satelit dari tahun 2001 hingga 2010, jelas terlihat bahwa daerah-daerah disepanjang pesisir timur Sumatra pada provinsi Jambi, Riau dan Sumatra Utara, dan juga bagian selatan dari Kalimantan Tengah, memiliki frekuensi *hotspot* yang paling tinggi, yang umumnya terkait dengan kebakaran (Gambar 33). Membandingkan peta *hotspot* dengan peta lahan memperlihatkan daerah-daerah yang memiliki kepadatan *hotspot* yang lebih tinggi ternyata juga merupakan lahan gambut.

Kotak 3: Gambut, lahan gambut dan kebakaran gambut

Gambut adalah akumulasi bahan organik atau vegetasi yang telah sebagian membusuk. Gambut terbentuk ketika bahan tumbuhan, biasanya di daerah tanah yang basah, terhambat dari pembusukan sepenuhnya karena genangan air merintang aliran oksigen dari atmosfer, sehingga melambatkan laju dekomposisi. Gambut memiliki ciri lingkungan yang basah, akan tetapi pada musim kemarau terjadi penguapan dan menurunnya kadar kelembaban tanah dan ketinggian air tanah. Karenanya, kemarau meningkatkan kerawanan kebakaran terhadap lahan gambut, yang risikonya semakin meningkat bila lahannya dikeringkan.

Drainase (pengeringan atau mengalirkan air) pada lahan gambut dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan aksesibilitas lahan. Namun pengeringan juga meningkatkan paparan lahan terhadap oksigen, yang kemudian terjadi oksidasi, sehingga mempercepat penurunan ketinggian lahan gambut. Pengeringan lahan gambut juga meningkatkan kerawannya terhadap kebakaran, karena menurunkan tingkat kelembaban dan menstimulasi pasokan oksigen.

Gambut memiliki kadar karbon yang tinggi dan sekali menyala dapat membara dan bahkan terbakar di bawah tanah, selama terdapat sumber oksigen. Kebakaran gambut dapat membara hampir tanpa batas atau setidaknya hingga bahan bakarnya habis atau pasokan oksigen terganggu. Bara api itu dapat menyala tanpa diketahui selama waktu yang sangat panjang (dalam hitungan bulan, tahun dan bahkan abad) dan menyebar melalui lapisan gambut bawah tanah.

Kebakaran gambut muncul sebagai ancaman global dengan dampak ekonomi, sosial dan ekologis yang signifikan, tidak hanya karena kabut yang timbul, namun karena tingginya emisi gas CO₂ yang dihasilkan. Lebih dari 100 kebakaran gambut di Kalimantan dan Sumatra Timur masih terus menyala sejak tahun 1997. Setiap tahun, kebakaran gambut di Kalimantan dan Sumatra Timur memicu kebakaran hutan baru di atas tanah. Pengelolaan air pada lahan gambut yang dikembangkan merupakan hal yang penting dalam menemukan keseimbangan antara tingkat pengeringan dan praktik budidaya dan juga untuk menurunkan risiko-risiko kebakaran, dan melindungi lahan gambut bagi generasi penerus.

Sumber: Masyarakat Gambut Internasional (2014), lihat <http://www.peatsociety.org>

Selama ini kebakaran lahan dan hutan terjadi secara alami, kini diketahui bahwa kebakaran yang berulang dan berskala besar di Indonesia disebabkan oleh campur tangan manusia

Peningkatan kebutuhan lahan perkebunan bagi kayu bubur kertas dan tanaman industri, terutama kelapa sawit, telah mendorong pembukaan lebih banyak daerah hutan gambut, bersama-sama dengan tindakan pengeringan lahan gambut dengan membangun kanal-kanal sehingga lahan dapat dibudidayakan. Sementara itu, api juga digunakan sebagai cara pembukaan lahan baik oleh petani rakyat maupun perusahaan besar. Pola terjadinya kebakaran selama sepuluh tahun terakhir secara jelas menunjukkan bahwa sebagian besar pembakaran dilakukan secara sengaja pada daerah pinggir hutan, dengan menggunakan arah angin untuk membakar daerah-daerah yang masih tertutup oleh hutan atau semak, dan pembakaran dilakukan dari arah yang jauh dari daerah-daerah yang telah dibudidayakan. Lebih dari setengah kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2013 terletak di dalam daerah-daerah konsesi, yaitu lahan-lahan yang izin penggunaannya telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Enam puluh persen kebakaran tersebut berasal dari daerah-daerah perusahaan yang dihuni oleh petani-petani kecil/plasma.

Pembukaan lahan dengan pembakaran adalah cara termurah, dengan biaya sekitar dua puluh persen dari cara bukan dibakar

Undang-undang melarang penggunaan api sebagai alat pembuka lahan dan menggolongkan tindakan itu sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana.¹³ Namun penelitian menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan besar memilih mengambil risiko membayar denda dibanding menggunakan metode alternatif pembukaan lahan dengan biaya yang lebih tinggi.¹⁴ Menurut UU, pemegang hak konsesi bertanggung jawab bagi kebakaran yang terjadi di dalam daerah konsesi mereka, tidak peduli siapa yang memulai kebakaran tersebut. Penegakan peraturan perundangan ini sangatlah sulit, dan sementara petani kecil cenderung yang disalahkan ketika kebakaran terjadi, kejelasan keadaan masih sulit dicapai.

Kebakaran hutan dan lahan gambut juga dapat dikaitkan dengan pengalihan lahan secara terorganisasi

Sejumlah investor ukuran menengah menyewa tenaga sejumlah kelompok 'petani'—dengan jumlah antara 100 dan 200 pekerja/keluarga per kelompok—untuk menempati lahan hutan berukuran sekitar 2 ha. per pekerja atau keluarga, menebang pohon-pohon dan membakarnya, sementara alat-alat berat digunakan untuk penyesuaian dan menyiapkan lahan bagi perkebunan kelapa sawit. Pencegahan tindakan seperti ini terbukti sulit dilakukan karena melawan insentif ekonomi yang kuat. Dalam satu hingga dua bulan, daerah-daerah yang

¹³ Lihat UU No. 32/2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah No. 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

¹⁴ CIFOR, 2014, "Fact File on Fire and Haze in Southeast Asia".

ditempati umumnya menjelma menjadi perkebunan kecil yang diakui oleh petani kecil pemukim yang hidup pada daerah-daerah kantong di dalam daerah hutan. Dengan berjalannya waktu, sebagian besar lahan itu berganti pemilik dan menjadi milik perusahaan-perusahaan berukuran menengah. Dalam hal petani kecil yang independen, diperkirakan satu hektar perkebunan kelapa sawit dengan biaya investasi kurang dari IDR 2 juta dapat berganti pemilik setelah 4 hingga 5 tahun (setelah buah pertama telah terbukti) dengan kisaran nilai sebesar IDR 30-35 juta. Besarnya keuntungan finansial, bersama-sama dengan lemahnya kapasitas penegakan UU, telah menjadi penyebab utama kebakaran lahan dan hutan. Juga penting untuk mengetahui bahwa pendorong lain di belakang kebakaran lahan dan hutan adalah pertikaian tentang lahan. Walau dengan skala yang jauh lebih kecil, terdapat kasus-kasus di mana api digunakan sebagai senjata dalam sengketa atau sebagai cara untuk merebut lahan yang menjadi sengketa.¹⁵

b. Apa yang mungkin dibawa oleh El Niño di tahun 2014

Tahun 2014 diperkirakan akan menjadi tahun El Niño dengan kemungkinan kemarau yang panjang

Institut Penelitian Iklim dan Masyarakat Internasional (*International Research Institute for Climate and Society*) memperkirakan 70 persen kemungkinan terjadinya El Niño (lihat Kotak 4) pada tahun ini, dari bulan Juli hingga Agustus dan seterusnya, dan kemungkinan itu meningkat menjadi 80 persen pada bulan September. Secara historis, El Niño membawa masalah-masalah signifikan yang berkaitan dengan iklim ke negara-negara Asia Tenggara, dengan India, Indonesia, Filipina dan Australia yang seringkali mengalami kekurangan curah hujan atau kemarau. Dengan besarnya jumlah penduduk di wilayah tersebut, kebergantungannya terhadap pertanian dan perkebunan berskala kecil sebagai sumber nafkah, maka anomali iklim apapun yang mempengaruhi hasil pertanian dapat memiliki potensi yang serius terhadap ketahanan pangan.¹⁶

Kotak 4: El Niño dan ENSO

El Niño adalah fenomena alam pada daerah khatulistiwa Samudra Pasifik yang disebabkan oleh peningkatan berkepanjangan pada suhu permukaan laut. Pada daerah tropik Samudra Pasifik, angin pasat biasanya bertiup dari timur ke barat, membawa air hangat dan melepaskannya di bagian barat dalam bentuk topan dan badai. Proses ini mendorong ketidakseimbangan dengan air dingin di timur dan air hangat di barat (di sekitar Indonesia). Sebagai akibatnya, air hangat mengalir ke pantai Amerika Selatan dan angin pasat mulai melemah dan sesekali berubah arah sama sekali. Fenomena ini juga sering disebut sebagai ENSO (*El Niño Southern Oscillation*). El Niño terjadi ketika suhu permukaan air pada bagian timur dan tengah lautan meningkat dan suhu di bagian barat mengalami penurunan, yang menyebabkan penurunan penguapan dan pasokan kelembaban dari bagian timur, sehingga menyebabkan penurunan pembentukan awan dan lebih kecilnya hujan.

Umumnya anomali ini terjadi secara tidak beraturan dalam dua hingga tujuh tahun, dan berlangsung selama sembilan bulan hingga dua tahun. Pengaruh utama El Niño adalah perubahan pola cuaca, seperti perubahan suhu, curah hujan, jalur badai dan arus. Sebagai contoh, selama El Niño suhu secara umum akan meningkat, dan dari bulan Juni ke Agustus bagian timur Indonesia akan mengalami kemarau karena daerah hujan akan bergeser ke arah timur ke pulau-pulau pada daerah khatulistiwa Samudra Pasifik. Pengaruh terbesar dari El Niño terhadap curah hujan akan paling besar pada periode dari September hingga November ketika hampir seluruh daerah Indonesia akan mengalami kekeringan yang lebih dari biasanya. Bagian timur Indonesia juga akan tetap kering pada bulan Desember-Februari.

Sumber: *International Research Institute for Climate and Society* (IRI); Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG); Institut Meteorologi Belanda (*Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut*, KNMI)

Secara historis, El Niño terkait dengan defisit curah hujan di Indonesia, yang memicu kebakaran hutan dengan skala besar

Dalam 120 tahun sejak 1877 telah tercatat 20 peristiwa *El Niño Southern Oscillations* (ENSO). ENSO paling akhir sangat terkait dengan kebakaran hutan di Indonesia. Kebakaran besar tahun 1982-83 terjadi bersamaan dengan ENSO, dan menjadi titik awal terjadinya kebakaran hutan besar secara teratur di Indonesia. Kebakaran ENSO tahun 1991 membantu mendorong keinginan untuk memahami peran kegiatan manusia dalam menyebabkan dan kontribusinya kepada kebakaran, sementara kebakaran hutan ENSO tahun 1994 mendorong tanggapan wilayah ASEAN dengan pembentukan komite khusus dan perjanjian polusi asap

¹⁵ Paragraf ini mengambil dari CIFOR, 2 Juli 2014, Presentasi pada seminar *Jakarta Foreign Correspondents Club* tentang kebakaran hutan.

¹⁶ USDA Foreign Agricultural Service, Juni 2014, "Southeast Asia: Historical El Niño-related Crop Yield Impact".

lintas batas yang mengikat secara hukum. Kebakaran hutan ENSO tahun 1997 sejauh ini merupakan yang paling signifikan secara ukuran dan dampak, karena untuk pertama kalinya, Pemerintah meminta bantuan dunia internasional untuk memerangi kebakaran tersebut.¹⁷

c. Pelajaran dari kebakaran Februari-Maret 2014 di Riau

Provinsi Riau, yang mengalami kebakaran hutan besar pada bulan Februari hingga Maret 2014, dan Kalimantan Tengah, adalah dua daerah paling rawan kebakaran hutan di Indonesia

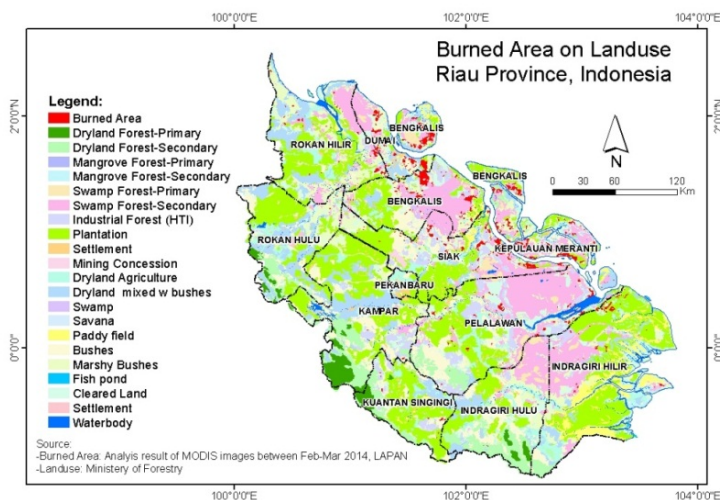
Tanpa menindahkan debat publik akan siapa yang memulai kebakaran, distribusi daerah terbakar dan tumpang-tindih perbatasan dapat dipetakan dengan mudah

Ketika mempertimbangkan risiko-risiko kebakaran hutan yang terkait dengan kondisi El Niño yang akan datang, pelajaran dan biaya ekonomi dari kebakaran di Riau pada bulan Februari dan Maret 2014 dapat dipelajari. Di Riau dan Kalimantan Tengah, dua provinsi dengan potensi tertinggi kebakaran gambut, kebakaran gambut yang besar dilaporkan pada musim panas hampir setiap tahun. Di Kalimantan kebakaran ini terpusat hanya pada beberapa bulan yang sangat kering. Sedangkan di Riau, kebakaran hutan lebih tidak teratur, karena bulan-bulan musim kering lebih sulit untuk diperkirakan dan tidak terlalu berat. Pada periode tanpa hujan yang berlangsung sebentar tersebut mendorong dilakukan proses pembersihan lahan dengan membakar hutan (seperti pada bulan Februari dan Maret 2014).

Terdapat set data dan keahlian yang memadai di Indonesia untuk menganalisis penyebaran dan dampak kebakaran hutan dan memetakannya secara cepat terhadap fungsi penggunaan lahan dan batas-batas konsesi. Analisis cepat yang dilakukan oleh para peneliti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menggunakan teknik yang praktis dan digunakan secara luas yang disebut Rasio Normalisasi Daerah Terbakar (*Normalized Burned-area Ratio*, NBR) dapat mengungkapkan informasi-informasi penting yang berguna untuk menentukan tipologi kebakaran dan dampaknya terhadap bentangan lahan.

Gambar 34: Lahan terbakar di Riau menurut penggunaan lahan

(peta daerah terbakar dan anatomi daerah yang terpengaruh kebakaran)



Sumber: LAPAN dan BPPT (2014)

Kebakaran di Riau bulan Februari-Maret 2014 menghabiskan lebih dari 176.000 ha. lahan

Kebakaran di Riau selama bulan Januari hingga Maret 2014, yang menghabiskan lebih dari 176.000 ha. lahan, terutama terjadi pada dataran rendah pesisir dan tepian hutan rawa gambut (Gambar 34). Sekitar 24 persen daerah yang terbakar merupakan semak-semak rawa (bekas penebangan hutan), sementara sekitar 22 persen berada pada hutan rawa sekunder. Perbandingan dengan peta sistem lahan menunjukkan bahwa 143.000 ha. daerah yang terbakar merupakan lahan yang digolongkan sebagai lahan gambut. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan peta izin penggunaan hutan menunjukkan bahwa 1.300 ha. lahan yang

¹⁷ Neil Byron dan Gill Shepherd, April 1998, "Indonesia and the 1997-98 El-Niño: Fire Problems and Long Term Solutions" (Natural Resources Perspective. Overseas Development Institute).

terbakar adalah hutan lindung yang dapat digunakan, dan 68.500 ha. merupakan lahan untuk hutan industri, dan 30.000 ha. merupakan daerah dengan izin perkebunan kelapa sawit. Analisis ini konsisten dengan pola yang tercatat sebelumnya dengan kebakaran yang mulai dari daerah tepi hutan dataran rendah dan perkebunan di mana perluasan perkebunan dapat berlangsung.

Jumlah kerusakan dan kerugian karena kebakaran hutan di Riau pada bulan Februari-Maret 2014 saja diperkirakan mencapai 935 juta dolar AS

Menurut perkiraan Bank Dunia, jumlah kerugian dan kehilangan dari kebakaran di Riau pada bulan Februari-Maret 2014 diperkirakan mencapai 935 juta dolar AS, atau 2,8 persen dari PDB provinsi Riau 2014 (proyeksi PDRB pemerintah daerah). Jumlah kerusakan diperkirakan mencapai 73 juta dolar AS (7,8 persen dari jumlah kerusakan dan kerugian), sementara jumlah kerugian diperkirakan mencapai 862 juta dolar AS (92,2 persen dari jumlah total). Kerusakan adalah jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali dan rehabilitasi, sementara kerugian adalah penurunan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang timbul pada bulan-bulan atau tahun-tahun berikut yang disebabkan oleh bencana tersebut (Tabel 6). Lebih dari 73 persen dari seluruh kerusakan dan kerugian merupakan beban pihak swasta, yang terutama terjadi pada daerah-daerah konsesi hutan dan tanaman kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta.¹⁸

Tabel 6: Perkiraan kerusakan dan kerugian dari kebakaran hutan di Riau, bulan Februari-Maret 2014
(perkiraan kehilangan dan kerugian, juta dolar AS)

	Pengaruh bencana			Kepemilikan	
	Kehilangan	Kerusakan	Jumlah	Publik	Swasta
Kehutanan	9	292	301	133	168
Tanaman pertanian	64	196	260	91	169
Pertambangan	0	12	12	0	12
Perdagangan	0	76	76	0	76
Manufaktur	0	219	219	0	219
Pariwisata	0	20	20	0	20
Transportasi, komunikasi	0	22	22	6	16
Kesehatan	0	11	11	8	4
Lingkungan*	0	0.1	0.1	0.0	0.1
Biaya kemanusiaan dan pemadaman kebakaran	0	14	14	13	1
Jumlah	73	862	935	251	684

Catatan: *Perkiraan kerugian lingkungan hanya menyertakan kerugian keanekaragaman hayati langsung saja, dan tidak termasuk emisi

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

Tanaman pertanian dan kehutanan mengalami kerusakan terbesar, diikuti sektor manufaktur dan perdagangan

Tanaman pertanian dan kehutanan mengalami kerusakan yang terbesar selama kebakaran, dengan perkiraan kerusakan dan kerugian masing-masing sebesar 301 juta dan 260 juta dolar AS. Dampak ini terkait dengan terbakarnya 34.300 ha. lahan hutan dan 25.400 ha. lahan pertanian, dengan rincian perkebunan kelapa sawit dan pertanian tanah kering sebesar masing-masing 75 persen dan 25 persen dari jumlah tanah pertanian. Kerusakan langsung terhadap kehutanan relatif terbatas, dengan perhitungan dari biaya penanaman kembali. Namun kerugian tersebut menjadi signifikan karena pohon-pohon yang terbakar memiliki nilai jual yang tinggi. Kerugian manufaktur juga signifikan, mencapai 219 juta dolar AS. Kehilangan hutan industri di Riau menjadi kerugian besar bagi industri penggergajian kayu, kayu lapis dan pabrik bubur kertas dan kertas di daerah itu. Sejumlah industri manufaktur memiliki sumber bahan mentah atau alternatif pengganti yang terbatas, yang dalam hal ini adalah kayu. Sektor perdagangan diperkirakan mencatat kerugian sebesar 10 persen dari jumlah *output* tahunan sektor perdagangan provinsi, akibat dari kegiatan sektor migas dan pertambangan menghentikan operasi mereka lebih dari satu minggu, dan turis dalam dan luar

¹⁸ Penilaian ini dilakukan pada awal bulan April 2014 dengan menggunakan metodologi yang dirancang oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) untuk menentukan nilai aset yang hilang, dan menilai dampaknya ke tiap sektor.

negeri membatalkan atau menunda kunjungan mereka ke Riau. Selain itu, karena tebalnya kabut asap, bandara dan pelabuhan ditutup selama beberapa hari, dan transportasi darat berkurang selama sehari-hari.

Secara keseluruhan, kebakaran Riau diperkirakan telah menyebabkan penurunan yang material pada pertumbuhan PDB provinsi

Kebakaran Riau diperkirakan telah menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan PDB provinsi itu untuk beberapa tahun. Untuk tahun 2014, pemerintah daerah Riau telah memperkirakan akan mencatat pertumbuhan PDB daerah sebesar 3,0 persen, dengan pertumbuhan PDB non-migas sebesar 6,0 persen dan penurunan PDB yang terkait dengan minyak sebesar 0,7 persen. Namun berdasarkan penilaian dampak yang diringkas di atas, pertumbuhan PDB daerah Riau untuk tahun 2014 dapat diturunkan sebesar 0,4 hingga 0,6 poin persentase, ke sekitar 2,5 persen yoy, dengan semua hal lain tetap sama. Sektor non-minyak (yang merupakan 63 persen dari PDB provinsi) menerima dampak yang paling besar, dengan jumlah kerugian yang diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan PDB non-minyak dari 6,0 menjadi 4,9 persen. Karena Riau merupakan salah satu dari “lima besar” daerah penghasil PDB daerah tertinggi, bersama-sama dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dampak tersebut juga menjadi kepentingan ekonomi nasional.

Namun perkiraan kerugian tidak mencakup dampak penting lainnya, seperti biaya kesehatan dan lingkungan jangka panjang...

Karena terbatasnya waktu dan sumber daya, penilaian tersebut tidak menyertakan sektor pendidikan (seperti gangguan jadwal sekolah). Penilaian itu juga tidak sepenuhnya mencakup pengaruh kesehatan akibat bencana tersebut, dan hanya menilai belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk peralatan kesehatan dan obat-obatan, dan tidak menyertakan pengaruh kesehatan jangka panjang manusia akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran. Penelitian dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan, yang terkait dengan peningkatan jumlah partikulat halus, menunjukkan bahwa dampak ekonomi pada jangka panjang yang berkaitan dengan kesehatan adalah cukup besar, pada urutan kedua setelah kerugian akibat terbakarnya kayu.¹⁹ Selain itu, karena hutan memiliki berbagai fungsi, sangat sulit untuk menyatakan nilai ekonomi sesungguhnya dari seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang berasal dari sumber daya kehutanan. Khususnya, sebagai contoh, dampak ekonomi dari kerugian lingkungan dalam penilaian ini hanya menyertakan nilai kerugian pendapatan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, dan tidak menyertakan emisi yang dihasilkan dari kebakaran tersebut.

...dan kebakaran yang berulang menjadi risiko jangka panjang bagi industri CPO di Indonesia dan reputasi Indonesia di pasar internasional

Penilaian dampak kebakaran hutan yang komprehensif juga seharusnya menyertakan risiko-risiko utama jangka panjang terhadap industri minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*, CPO), baik untuk Riau maupun nasional. Indonesia kini merupakan produsen CPO terbesar di dunia dan industri itu menghasilkan pendapatan ekspor tahunan lebih dari 15,8 miliar dolar AS²⁰. Banyak pemain industri yang menjadi lebih proaktif dalam menerapkan produksi yang berkelanjutan termasuk menerapkan kebijakan tidak ada penebangan dan tidak ada pembakaran dalam persiapan lahan bagi perkebunan mereka. Namun, sementara para pemilik perkebunan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi tanaman produktif mereka, pola kebakaran juga tetap terjadi dengan pola perluasan perkebunan, dengan menggunakan komunitas setempat untuk melakukan pembakaran untuk mempersiapkan lahan (seperti dibahas di atas). Praktik penggunaan komunitas setempat sebagai tameng menyulitkan pembuktian keterlibatan perusahaan-perusahaan yang telah menerima sertifikasi dalam penerapan produksi berkelanjutan sebagai pendorong pembakaran lahan, suatu keadaan yang dapat mengancam reputasi industri global tersebut secara keseluruhan.

¹⁹ Lihat, misalnya, R. Ritmaster dan W.L. Adammowicz, Mei 2001, “Economic Analysis of health effects from forest fires in Chisholm, Canada”.

²⁰ Pendapatan ekspor CPO Indonesia pada tahun 2013 mencapai 15,8 miliar dolar AS (BPS).

d. Pentingnya lebih banyak tindakan konkrit

Kebakaran hutan adalah risiko yang besar dan merugikan dengan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan...

Penilaian dampak ekonomi, seperti untuk Riau seperti disinggung di atas, jelas-jelas memperlihatkan besarnya potensi biaya kebakaran hutan. Walau lebih sulit untuk dikuantisir, mereka juga membawa risiko-risiko jangka panjang terhadap dunia usaha dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Risiko-risiko utama jangka panjang lainnya, walau bukan merupakan fokus dari pembahasan singkat bagian ini, termasuk ancaman terhadap sasaran perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan (melalui dampak ekonomi, sosial dan lingkungan), pengentasan kemiskinan. Karenanya risiko-risiko dan biaya-biaya kebakaran hutan biasa dengan skala besar, memiliki jumlah yang signifikan, dan harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pencegahan risiko dan mitigasi bencana yang lebih luas.

...dan secara umum dapat dicegah, tidak seperti bencana-bencana lain yang terus terjadi di Indonesia

Dalam kaitannya dengan bencana alam, Indonesia berada pada urutan teratas dunia untuk negara-negara yang paling rawan terhadap berbagai bahaya, seperti gempa bumi dan tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan dan tanah longsor. Belanja fiskal nasional tahunan yang terkait dengan bencana, yang utamanya bagi rekonstruksi pasca-bencana untuk memperbaiki aset-aset masyarakat yang rusak dan memberikan bantuan keuangan terhadap populasi yang terkena bencana, mencapai rata-rata 500 juta dolar AS per tahun.²¹ Sebagian besar belanja ini digunakan untuk menanggapi bencana alam yang tidak dapat dicegah. Namun, tidak seperti terjadinya gempa bumi atau meletusnya gunung berapi, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia seharusnya dapat diturunkan secara sangat signifikan. Kebakaran di provinsi Riau pada awal tahun 2014, setelah kebakaran tidak terkendali lagi, pemerintah harus menghabiskan 13 juta dolar AS untuk pemadaman kebakaran hutan yang terjadi selama dua bulan. Masyarakat yang terlibat di dalam pembebasan lahan dengan membakar umumnya memiliki penghasilan sebesar 5 dolar AS per hari, serupa dengan program-program umum bekerja untuk menerima upah. Menggunakan tingkat pembayaran ini sebagai contoh, ketika direncanakan dengan melalui pendekatan pemberdayaan komunitas—yang bekerja dengan baik pada pencegahan, tanggapan dan pemulihan bencana di daerah-daerah lain di Indonesia—belanja 13 juta dolar AS untuk dua bulan dapat digunakan untuk mempekerjakan lebih dari 30.000 anggota komunitas selama tiga bulan untuk menguasai pembakaran hutan dan persiapan lahan, semuanya tanpa penggunaan kebakaran untuk persiapan lahan.

Penanganan kebakaran hutan sudah mendesak; El Niño dan musim kebakaran tampaknya akan bersamaan dengan minggu-minggu awal pemerintahan yang baru

El Niño tahun ini dapat memiliki tingkat keparahan yang serupa dengan El Niño tahun 1997, ketika kebakaran hutan besar pertama terjadi. Puncak musim panas diperkirakan akan terjadi pada bulan Oktober hingga Desember 2014, bersamaan dengan waktu mulai bertugasnya presiden yang baru dipilih. Karena masa transisi antar pemerintahan dapat menjadi waktu di mana proses pengambilan kebijakan juga melambat, sangatlah penting untuk pemerintahan yang menyerahkan dan yang menerima pucuk pimpinan untuk bekerja bersama secara erat untuk memastikan bahwa kebakaran besar dapat dicegah. Sebagai contoh, langkah-langkah yang sistemik untuk menentukan waktu dimulainya musim kebakaran dengan menggunakan parameter-parameter seperti indeks kemarau, terjadinya titik panas (*hotspot*) (dengan batas yang lebih tinggi), dan penurunan indeks kualitas udara, harus disusun. Pemerintah pusat dan daerah dapat menetapkan keadaan siaga darurat jauh lebih awal dengan menggunakan praktik penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dengan baik pada UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan keadaan siaga darurat akan memungkinkan Pemerintah untuk menggerakkan dana siaga (*on-call*) secara cepat dari APBN tanpa meminta persetujuan khusus dari DPR, yang memungkinkan langkah-langkah pencegahan melalui peningkatan penegakan UU, dan keterlibatan masyarakat setempat. Kemajuan dalam langkah-langkah tersebut selama beberapa bulan ke depan dapat membantu memastikan bahwa kebakaran dan kabut asap tidak menjadi kerugian besar dalam bidang lingkungan hidup dan ekonomi, yang akan membebani masa permulaan pemerintahan yang baru.

²¹ Bank Dunia/GFDRR, Oktober 2011, “Indonesia: Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration”.

2. Perkiraan baru paritas daya beli yang disesuaikan untuk perekonomian Indonesia

Membandingkan ukuran perekonomian dan rata-rata belanja hanya berdasarkan nilai tukar pasar dapat menghasilkan kesimpulan yang salah...

Seberapa besar perekonomian Indonesia relatif terhadap perekonomian negara lain? Guna melakukan perbandingan tersebut, penting untuk mengubah nilai menjadi unit yang setara. Salah satu pilihan adalah dengan menggunakan nilai tukar pasar: contoh, untuk membandingkan ukuran perekonomian Indonesia dengan Amerika Serikat, PDB Indonesia dalam Rupiah dapat dikonversikan ke dolar AS menggunakan nilai tukar pasar (sekitar Rp 12.000 per Dolar AS, pada saat penulisan). Namun, nilai tukar pasar mungkin bukan merupakan ukuran yang baik untuk daya beli relatif satu dolar di Amerika Serikat dengan satu dolar, yang telah dikonversikan ke Rupiah, di Indonesia, karena cara ini tidak menerapkan penyesuaian pada tingkat-tingkat harga yang berbeda. Jika harga barang dan jasa, terutama yang tidak diperdagangkan, pada umumnya lebih murah di Indonesia dibandingkan di Amerika Serikat, maka penggunaan nilai tukar pasar akan meremehkan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia dan mengecilkan ukuran perekonomian. International Comparison Program (ICP), sebuah inisiatif internasional yang diprakarsai Bank Dunia, mengatasi masalah akurasi dari perbandingan nilai barang dan jasa yang diproduksi negara-negara yang berbeda. Pada bulan Juni 2014, hasil perbandingan lengkap telah diterbitkan berdasarkan perkiraan pada putaran terakhir, yang dirintis sejak tahun 2011 (“ICP 2011” atau putaran 2011). Bagian ini membahas hasil-hasil tersebut terkait dengan Indonesia.

...relatif terhadap penggunaan perbandingan berdasarkan paritas daya beli (“PPP”)...

Yang dibutuhkan adalah sebuah pengukuran yang menyesuaikan perbedaan tingkatan harga yang terjadi di Indonesia dan di AS. Perkiraan paritas daya beli (*purchasing power parity*, PPP)—yaitu rasio harga-harga barang dan jasa yang sama dalam mata uang nasional di negara-negara berbeda—dapat digunakan untuk memberikan perkiraan besaran PDB maupun belanja berbagai negara di seluruh dunia dengan menggunakan tingkat harga yang sama.²² Sebagai contoh, dengan menggunakan harga yang berlaku di Indonesia, volume barang dan jasa yang dapat dibeli dengan satu dolar di AS pada tahun 2011 ternyata dapat dibeli hanya dengan Rp 3.607 di Indonesia (dan bukan seharga Rp 8.770, yang merupakan nilai tukar pasar per-dolar AS pada tahun 2011), maka perkiraan barang dan jasa yang dihasilkan oleh Indonesia, setelah disesuaikan dengan perbedaan daya beli, akan berlipat menjadi hampir tiga kali lebih besar dibanding bila menggunakan nilai tukar pasar. Terdapat sejumlah alasan teoritis yang menjelaskan mengapa PPP dapat menjadi determinan penting dari kurs tukar pasar, terutama pada jangka waktu yang lebih panjang. Namun pada satu waktu tertentu, kecil kemungkinan nilai tukar dapat menangkap PPP, sehingga perbandingan ekonomi internasional berdasar nilai tukar pasar berpotensi memberikan informasi yang keliru.

... seperti diperkirakan secara komprehensif oleh ICP 2011

ICP 2011 memberikan perkiraan baru dari faktor-faktor konversi PPP untuk hampir semua negara di dunia. ICP 2011 merupakan pembaruan komprehensif pertama sejak ICP tahun 2005, dengan metodologi yang telah banyak disempurnakan, serta dengan menambahkan sejumlah negara baru ke dalam penelitian yang dilakukan (ICP 2011 menyertakan 199 negara, dibanding 146 pada tahun 2005). Perbedaan metodologi antara perkiraan ICP 2005 dan ICP 2011, serta perubahan perekonomian dalam rentang waktu itu, sangat menyulitkan perbandingan lintas tahun pada data tersebut. Dengan demikian, hasil-hasil yang tertera dalam ICP 2011 harus dipandang sebagai sebuah perkiraan terbaik yang baru dalam perbedaan daya beli lintas negara.

²² Untuk tinjauan lengkap akan konsep PPP, dan metodologi ICP 2011, lihat <http://icp.worldbank.org/>

a. Hasil untuk Indonesia: 10 Perekonomian Terbesar

Dalam konteks global: porsi negara-negara berkembang berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dunia

Hasil-hasil ICP 2011 untuk Indonesia (diringkas pada Tabel 7) hendaknya dilihat dalam konteks global.²³ Porsi negara-negara berkembang dalam perekonomian global ternyata jauh lebih besar daripada perkiraan sebelumnya. Porsi perekonomian negara berpenghasilan menengah dalam PDB dunia mencapai 48 persen bila menggunakan PPP dan hanya 32 persen bila menggunakan nilai tukar. Enam dari dua belas ekonomi terbesar dunia merupakan negara-negara yang berada di kelas penghasilan menengah (menurut definisi Bank Dunia). Jika digabungkan, kedua belas perekonomian terbesar dunia membentuk dua per tiga dari ekonomi dunia, dan mewakili 59 persen dari total penduduk dunia. Sekitar 28 persen dari penduduk dunia hidup dalam perekonomian dengan belanja PDB per kapita di atas 13.460 dolar AS rata-rata dunia, sementara 72 persennya berada di bawah rata-rata tersebut. Median belanja per kapita per tahun dunia adalah PPP 10.057 dolar AS.

Berdasar PPP ekonomi Indonesia berada pada peringkat sepuluh terbesar dunia – ekonomi berkembang terbesar setelah negara-negara BRICs...

Perkiraan ICP 2011 dari kurs tukar PPP Indonesia terhadap dolar AS pada tahun 2011 adalah 3.607, yang menghasilkan perkiraan PDB berdasar PPP sebesar 2,06 triliun dolar internasional. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia merupakan ekonomi terbesar nomor sepuluh di dunia (Gambar 35) dan ekonomi negara berkembang terbesar setelah negara-negara “BRICs” (Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok). Indonesia membentuk 2,3 persen dari jumlah belanja dunia (versus 3,6 persen dari penduduk dunia). Sebaliknya, dengan menggunakan nilai tukar pasar, peringkat ekonomi Indonesia adalah nomor sembilan belas dunia pada tahun 2011, dengan hanya 1,2 persen dari jumlah belanja dunia. Perbedaan ini didorong oleh lebih murah harga-harga di Indonesia, dengan indeks harga yang digunakan untuk perhitungan hanya mencapai 53 persen dari indeks global.

...dan konsumsi per orang hanya 13 persen dari belanja di AS, dibanding kurang dari 6 persen bila menggunakan nilai tukar pasar

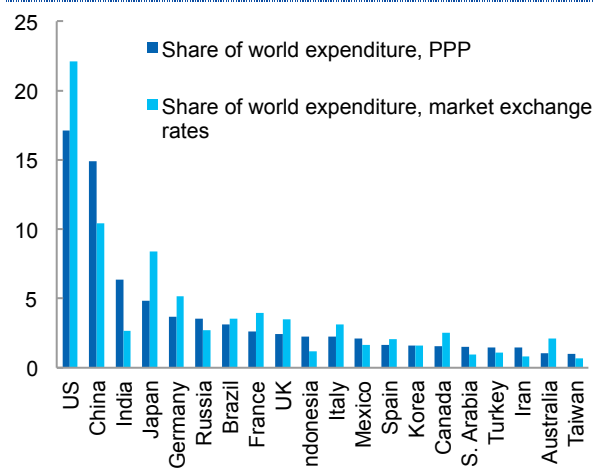
Secara rata-rata, Indonesia berada dalam posisi yang relatif lebih baik, bila dibandingkan, misalnya, dengan rata-rata konsumsi di Amerika Serikat, ketimbang bila menggunakan perbandingan berdasar nilai tukar pasar. Pada nilai tukar pasar, belanja konsumsi per kapita di Indonesia pada tahun 2011 hanyalah 5,5 persen dibanding di Amerika Serikat, namun angka ini meningkat menjadi 12,9 persen bila menurut PPP. Namun, perlu dicatat bahwa walau dengan penyesuaian harga relatif, konsumsi per kapita di Indonesia masih tetap relatif rendah (Gambar 36). Indonesia memiliki peringkat 127 dalam konsumsi per kapita menurut PPP dari 187 negara di mana data ini tersedia (dan nomor 126 menurut nilai tukar pasar).

Berdasarkan PPP, ekonomi Indonesia berukuran raksasa di ASEAN, dan belanja per orang mendekati rata-rata wilayah

Dalam konteks wilayah, perkiraan ICP 2011 mendukung anggapan bahwa Indonesia merupakan raksasa di ekonomi Asia Tenggara. Namun, tidak seperti peringkat dunianya berdasarkan ukuran ekonomi, hampir tak ada perbedaan antara perkiraan berdasar nilai tukar pasar dan berdasar PPP, dengan ekonomi Indonesia diperkirakan berkontribusi sedikit di bawah 40 persen dari jumlah PDB ASEAN. Hal ini disebabkan karena perkiraan PPP juga meningkatkan perkiraan PDB dari negara-negara tetangga Indonesia di ASEAN dengan margin setara. Belanja per penduduk dalam dolar internasional di Indonesia kira-kira setara dengan rata-rata per-kapita ASEAN (sebesar 8.549 dolar AS pada tahun 2011).

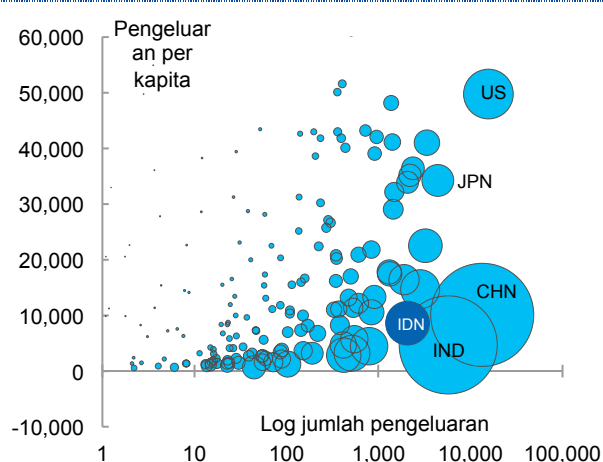
²³ Paragraf ini mengutip langsung dari siaran pers ICP 2011, tersedia pada <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/29/2011-international-comparison-program-results-compare-real-size-world-economies>

Gambar 35: Ekonomi Indonesia menurut PPP termasuk sepuluh terbesar...
(dua puluh ekonomi terbesar menurut belanja PPP, bagian belanja dunia, persen, 2011)



Sumber: ICP

Gambar 36: ...namun belanja per kapita menurut PPP masih tetap relatif rendah
(belanja keseluruhan dan per kapita PPP, 2011)



Catatan: Sampel ICP seluruhnya kecuali 3 outlier; gelembung menunjukkan ukuran populasi.
Sumber: ICP; perhitungan staf Bank Dunia.

Tabel 7: Hasil utama ICP 2011 untuk Indonesia

	Belanja per kapita				Ukuran relatif ekonomi		Struktur ekonomi dalam negeri		Catatan: PPP (dolar AS = 1.000)
	Nilai		Perbandingan dengan AS (=100)		Bagian (Dunia = 100.0)				
	Menurut PPP	Menurut XR	Menurut PPP	Menurut XR	Menurut PPP	Menurut XR	Menurut PPP	Menurut XR	
PDB Keseluruhan	8.539	3.511	17,2	7,1	2,3	1,2	100%	100%	3.607
Konsumsi Individu aktual	4.805	2.044	12,9	5,5	2,0	1,1	56%	58%	3.731
Konsumsi Individu berdasarkan Rumah Tangga	4.110	1.917	12,0	5,6	2,1	1,1	48%	55%	4.092
Konsumsi Individu berdasarkan Pemerintah	637	127	20,8	4,1	1,3	0,5	7%	4%	1.745
Konsumsi Bersama berdasarkan Pemerintah	564	189	11,2	3,8	1,6	0,8	7%	5%	2.947
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.701	1.122	29,8	12,4	3,1	1,7	32%	32%	3.645

Sumber: ICP

b. Keterbatasan dan hal-hal yang tidak terungkap oleh data baru

Hasil-hasil ini adalah perkiraan statistika semata, yang memiliki aspek ketidakpastian...

Hasil-hasil ICP 2011 memiliki sejumlah keterbatasan penting, yang secara singkat ditinjau pada bagian ini. Pertama, faktor-faktor penyesuaian PPP merupakan perkiraan statistika. Perhitungan ini merupakan upaya terbaik untuk menemukan angka sebenarnya yang tentunya memiliki beberapa kesalahan dalam batas-batas yang dapat diterima. Penyesuaian yang dihasilkan kemudian diterapkan kepada data, seperti dalam *output* berdenominasi mata uang domestik dan jumlah penduduk, yang juga adalah perkiraan yang tak lepas dari kemungkinan kesalahan pengukuran. Dengan adanya kekurangtepatan ini, serta sifat ekonomi yang terus berubah, fokus lebih baik ditetapkan pada implikasi kualitatif dari perkiraan-perkiraan tersebut (seperti penyesuaian untuk tingkat harga relatif menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berukuran jauh lebih besar dibanding perkiraan yang didapat dengan menggunakan nilai tukar pasar), dibanding pada kuantum perkiraan itu sendiri (misalnya, Indonesia memiliki ekonomi sebesar 2,06 triliun dolar AS dan jelas-jelas lebih besar dari ekonomi Meksiko).

...dan hasil itu sebaiknya tidak digunakan untuk menyimpulkan kinerja ekonomi relatif dibanding ICP tahun 2005...

Kedua, karena perbedaan metodologi antara survei-survei tersebut, dan karena pergeseran pada harga relatif lintas waktu, perbedaan antara hasil-hasil pada ICP tahun 2005 dan 2011 tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kinerja ekonomi Indonesia antar waktu. Sebagai contoh, kenyataan bahwa PDB Indonesia yang disesuaikan PPP diperkirakan mencapai 707,9 miliar dolar AS pada tahun 2005, dibanding dengan 2,06 triliun dolar AS pada tahun 2011, tidak berarti bahwa ekonomi meningkat sebesar 1,4 triliun dolar AS (191 persen) selama periode kedua tahun tersebut. Untuk perbandingan lintas waktu, perkiraan yang terbaik adalah perkiraan statistika resmi dari BPS untuk pertumbuhan PDB riil, yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia meningkat sebesar 41 persen dalam nilai riil selama periode tahun 2005-2011.

...dan hasil itu hanya merupakan informasi belanja, bukan gambaran kesejahteraan secara keseluruhan

Keterbatasan ketiga bersifat lebih umum. ICP 2011 memberikan cara yang lebih akurat dalam membandingkan tingkatan harga, dan belanja relatif untuk barang dan jasa, lintas ekonomi. Data yang dihasilkan dengan sendirinya akan mengikuti keterbatasan PDB dalam hal perbandingan kesejahteraan, misalnya, dengan mengesampingkan masalah distribusi—ketimpangan (seperti dibahas di bagian C)—dan penentu kesejahteraan lainnya, seperti kualitas lingkungan.

c. Implikasi bagi para penyusun kebijakan

ICP 2011 menegaskan relevansi global terhadap ekonomi Indonesia...

Hasil-hasil ICP 2011 jelas bersifat relevan bagi para penyusun kebijakan Indonesia, setidaknya dalam empat hal utama. Pertama, hasil-hasil itu menegaskan bahwa ekonomi Indonesia memang signifikan secara global. Indonesia adalah produsen barang dan jasa terbesar nomor sepuluh di dunia, sehingga perkembangan ekonominya terkait secara langsung dengan ekonomi global, dengan potensi yang jelas untuk berperan sebagai “kutub pertumbuhan” regional dan dunia (sejalan dengan temuan Bank Dunia pada laporan *Global Development Horizons* tahun 2011).

...dan menunjukkan kemajuan yang kuat dalam meningkatkan standar hidup relatif terhadap standar di Amerika Serikat...

Kedua, hasil-hasil itu menunjukkan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang lebih banyak dalam mengejar tingkat standar hidup di negara-negara maju dibanding yang sebelumnya ditunjukkan oleh perkiraan belanja PPP per kapita. Walau jelas merupakan hal yang positif, namun tetap tidak mengubah kebutuhan untuk pencapaian kemajuan lebih lanjut dalam peningkatan standar hidup rata-rata, serta dalam memecahkan masalah kerentanan dan ketimpangan. Yang kini harus ditekankan adalah dukungan untuk kemajuan berkelanjutan, yang sangat dapat membantu Indonesia menghindari dari terjatuh ke dalam “perangkap negara berpenghasilan menengah” (seperti dipaparkan dalam laporan Tinjauan Kebijakan Pembangunan 2014 Indonesia, yang diringkas dalam *Triwulanan* edisi bulan Maret 2014)

...dan memberikan pembaruan perkiraan tingkat kemiskinan di Indonesia...

Ketiga, hasil-hasil ICP 2011 akan dipertimbangkan dalam perhitungan perkiraan kemiskinan Indonesia berikutnya, yang akan menyesuaikan daya beli relatif penduduk miskin selaras dengan konsep serupa terkait penyesuaian dolar internasional terhadap belanja yang dipaparkan dalam catatan ini. Namun, PPP ICP 2011 yang baru tidak dapat secara otomatis dipetakan ke perkiraan kemiskinan yang baru, karena mereka belum tentu menangkap harga-harga yang dihadapi oleh kaum miskin (penyesuaian harga untuk perbandingan kemiskinan internasional harus secara khusus mencerminkan biaya relatif keranjang konsumsi rumah tangga miskin lintas negara). Karenanya, PPP dari ICP 2005 akan tetap digunakan dalam statistik kemiskinan global dari Bank Dunia, namun hasil dari ICP 2011 akan digunakan sebagai masukan untuk pembaruan pada masa yang akan datang. Perkiraan PPP juga dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan memahami konsumsi kelas menengah yang berkembang di negara-negara seperti Indonesia.²⁴

²⁴ Lihat, misalnya, Homi Kharas, 2010, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, OECD Working Paper 285.

...serta menjadi masukan berguna bagi pengelolaan ekonomi makro jangka panjang

Keempat, ICP 2011 menunjukkan bahwa tingkatan harga-harga di Indonesia berada jauh di bawah rata-rata dunia. Setelah diterbitkannya data terperinci ICP baru-baru ini, sangatlah penting untuk menyelidiki sumber-sumber utama dari perbedaan harga tersebut. Hal ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan harga lintas sektor, misalnya antara investasi dan konsumsi, mempengaruhi struktur ekonomi dan dapat mencerminkan masalah kebijakan yang lebih dalam. Dengan semakin berkembang dan majunya ekonomi Indonesia, wajar untuk memperkirakan bahwa harga-harga secara umum akan naik setara dengan harga-harga global yang lebih tinggi. Hal ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi tren apresiasi mata uang riil (dengan menurunkan daya beli valuta asing di Indonesia). Karenanya, sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi perkiraan baru ini secara lebih luas guna memperkirakan pertumbuhan harga masa depan dan dampaknya terhadap nilai tukar.

C. Indonesia tahun 2015 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan



1. Ketimpangan dan kesempatan di Indonesia

a. Sekilas: Peningkatan ketimpangan merupakan hal penting untuk diperhatikan

Ketimpangan menjadi isu utama yang dibahas oleh media menjelang pemilihan presiden Indonesia

Ketimpangan menjadi isu utama menjelang pemilihan presiden di Indonesia. Media nasional dan internasional utama melaporkan peningkatan ketimpangan di Indonesia. Kedua calon presiden membuat pernyataan publik tentang keprihatinan mereka akan peningkatan ketimpangan dan strategi mereka untuk menghadapi hal itu pada debat capres pertama yang disiarkan oleh televisi dengan topik pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Sebagian besar responden berpendapat Indonesia telah menjadi sangat tidak merata

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2014 menemukan bahwa, sementara sebagian responden bersedia mentolerir adanya ketimpangan hingga tingkat tertentu, sebagian besar merasa ketimpangan di Indonesia kini telah jauh melebihi yang seharusnya and Indonesia telah semakin timpang akhir-akhir ini.²⁵ Mereka yang disurvei memiliki kecenderungan kuat terhadap pemerataan pendapatan yang lebih baik dan bersedia menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat secara keseluruhan demi mencapai pemerataan tersebut.

Ketimpangan di Indonesia dan pendorong utamanya belum sepenuhnya dipahami; Analisis lebih lanjut menjadi kunci rancangan kebijakan yang sesuai

Penelitian akademis dan kebijakan pada masa lalu cenderung memberikan penekanan terhadap kemiskinan dibanding ketimpangan. Bersama dengan institusi lainnya yang menekankan pada ketimpangan, Bank Dunia meluncurkan proyek penelitian tentang ketimpangan di Indonesia. Penelitian ini masih berjalan dan hasilnya akan diterbitkan pada tahun 2015. Bagian ini mengungkapkan sejumlah temuan awal tentang penyebab terjadinya peningkatan ketimpangan di Indonesia dan mengapa hal itu penting untuk kebijakan. Penelitian selanjutnya akan menyelidiki faktor-faktor penyebab ketimpangan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan pemerintah dapat dibentuk untuk memitigasi atau membalikkan tren ini.

²⁵ Lembaga Survei Indonesia, 2014, *Inequality Perceptions Survey*

Ketimpangan di Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2000 dan lebih tinggi dibanding perkiraan masyarakat

Ketimpangan, seperti diukur dengan koefisien Gini, meningkat sebesar 11 poin persentase antara tahun 2000 dan 2013. Tingkat ketimpangan ekonomi yang sesungguhnya di Indonesia tampaknya lebih tinggi karena data yang digunakan untuk pengukuran tidak mewakili rumah tangga mampu secara memadai. Namun, ketimpangan yang terukur di Indonesia berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibanding perkiraan sebagian besar masyarakat, dan secara mencolok lebih tinggi dari yang diharapkan menurut survei tersebut di atas. Survei itu juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyadari betapa besarnya bagian dari pendapatan nasional yang dinikmati oleh kaum berada.

Akses yang tidak setara terhadap aset dan kesempatan kerja yang baik mendorong terjadinya ketimpangan, dan hal ini merintang pertumbuhan serta pengentasan kemiskinan yang tengah berjalan

Kaum berada di Indonesia memiliki akses ke aset-aset, seperti saham dan properti, yang memungkinkan kekayaan mereka meningkat dengan cepat. Sejalan dengan itu, dengan pendidikan yang lebih baik, mereka dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik pula dan meningkatkan pendapatan mereka. Mereka yang datang dari rumah tangga yang lebih miskin tidak memiliki aset dan hanya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan bekerja. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia di Indonesia sejak tahun 2001, dan bahkan sebagian besar pekerjaan yang ada sekarang, berada pada sektor-sektor dengan produktivitas rendah, sehingga menekan pendapatan riil tenaga kerja, terutama bagi penduduk miskin dan rentan. Selain itu, para pekerja itu memiliki akses terbatas terhadap perlindungan yang resmi untuk tenaga kerja. Terbatasnya akses ke kesempatan kerja yang baik juga merintang pertumbuhan ekonomi Indonesia karena Indonesia tidak memaksimalkan angkatan kerja yang ada sekarang dalam hal potensi produktivitasnya, justru pada saat dividen demografis memuncak. Ketika mereka berupaya untuk memperbaiki tingkat kehidupan mereka, banyak rumah tangga yang rentan terhadap kejutan dan kejadian tak terduga dan, tanpa adanya mekanisme untuk mengatasi hal tersebut, berisiko jatuh kembali dalam kemiskinan.

Kesenjangan kesempatan pada masa kecil juga berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan pada masa depan

Sepertiga dari ketimpangan berasal dari keadaan yang berada di luar kendali individu-individu, seperti tempat lahir dan pendidikan orangtua mereka—yaitu hal-hal yang disebabkan oleh ketimpangan kesempatan. Banyak dari perbedaan-perbedaan tersebut berasal dari masa kecil, ketika anak-anak tumbuh tanpa fasilitas perumahan, air, dan sanitasi yang memadai, ataupun layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Kegagalan dalam mewujudkan potensi sepenuhnya dari anak-anak Indonesia pada hari ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masa depan serta pengentasan kemiskinan lebih lanjut.

Ketimpangan tidak selalu harus terjadi dalam proses pembangunan...

Negara-negara lain dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan taraf ketimpangan secara signifikan. Secara historis, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mencatat pertumbuhan yang kuat selama beberapa dekade dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Di lain pihak, Indonesia mencatat peningkatan ketimpangan yang tertinggi secara regional selama tahun 1990an dan 2000an, setelah Cina. Selama periode yang sama, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina menikmati masa-masa pertumbuhan yang cukup tinggi dengan tingkat ketimpangan yang stabil atau bahkan menurun.

...dan sebagian besar penduduk Indonesia menghendaki pemerintah baru untuk menangani masalah ketimpangan ini

Dari sekitar 83 persen penduduk Indonesia yang disurvei, 39 persen menganggap keadaan sudah 'mendesak' dan 44 persen menyatakan sudah 'sangat mendesak' bagi pemerintah untuk menangani masalah ketimpangan.²⁶ Laporan Bank Dunia yang akan datang tentang ketimpangan akan memberikan pilihan kebijakan berdasarkan analisis dari pendorong ketimpangan dan berbagai pembelajaran dari negara-negara lain, berdasarkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada. Secara umum, prioritas kebijakan utama mencakup peningkatan akses ke sumber nafkah produktif, penjaminan akses ke pendidikan dasar, kesehatan, air dan sanitasi yang berkualitas bagi seluruh penduduk, serta perluasan perlindungan sosial.

²⁶ Lihat catatan kaki sebelumnya

b. **Ketimpangan di Indonesia tercatat tinggi dan kesenjangan antara kelompok miskin-kaya semakin melebar**

Ketimpangan di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2000

Ketimpangan di Indonesia seperti diukur oleh koefisien Gini (lihat Kotak 5) hanya sedikit berubah antara tahun 1980 dan 1996. Koefisien itu bergerak antara 32 dan 34 poin, dan meningkat sedikit menjadi 36 pada tahun 1996 (Gambar 37).²⁷ Angka ini berubah dengan adanya krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Penduduk Indonesia yang lebih mampu dan yang tinggal di daerah perkotaan tidak hanya merasakan dampak paling besar dari krisis itu, namun juga merupakan kelompok yang mencatat pemulihan paling lambat. Karenanya, koefisien ketimpangan turun dari 36 poin pada tahun 1996 menjadi 30 poin pada tahun 1999. Setelah masa pemulihan dari krisis, Indonesia mencatat masa pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang sebagian didorong oleh lonjakan harga komoditas dan kuatnya konsumsi dalam negeri. Selama periode ini, koefisien ketimpangan, yang dihitung berdasarkan koefisien Gini, meningkat dari 30 pada tahun 2000 menjadi 42 pada tahun 2013. Bila dibandingkan, pada tahun 2002, rata-rata konsumsi per penduduk dari 10 persen rumah tangga paling kaya di Indonesia berjumlah 6,6 kali dibanding 10 persen rumah tangga yang paling miskin; pada tahun 2013, angka perbandingan tersebut meningkat menjadi 10,3 kali. Karenanya, konsumsi dari 10 persen rumah tangga paling kaya tersebut hampir mencapai sepertiga dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia, dengan konsumsi 20 persen yang paling kaya hampir mencapai setengah dari seluruh konsumsi (Tabel 8). Konsumsi dari 40 persen rumah tangga yang paling miskin, di sisi lain, hanya seperlima dari seluruh konsumsi dan semakin menyusut sejalan dengan waktu.

Kotak 5: Tantangan pengukuran ketimpangan dan perbandingan lintas negara

Koefisien Gini adalah pengukuran ketimpangan yang paling umum digunakan. Angkanya berkisar dari 0 (pemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna), dengan kisaran umum antara 0,3 dan 0,5. Koefisien ini juga seringkali dinyatakan dalam poin persentase antara 0 dan 100. Koefisien Gini umumnya dihitung dari distribusi pendapatan atau konsumsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang koefisien Gini dan pengukuran Theil (yang digunakan pada sejumlah analisis berikut), lihat Houghton dan Khandker, 2009, “*Handbook on Poverty and Inequality*” dan Triwulanan Perekonomian Indonesia bulan Maret 2011.

Perbandingan Gini atau pengukuran ketimpangan manapun secara lintas negara merupakan hal yang sangat sulit. Pertama, masing-masing negara menggunakan pengukuran kesejahteraan berbeda. Beberapa negara, seperti Malaysia dan banyak negara Amerika Latin, menggunakan pendapatan rumah tangga, sementara negara lain, seperti Indonesia dan sebagian besar negara-negara di Asia, menggunakan konsumsi rumah tangga. Karena rumah tangga yang lebih mampu tidak menghabiskan seluruh pendapatan mereka, dan menabung sebagian pendapatan itu, koefisien Gini pendapatan umumnya lebih tinggi dari koefisien Gini konsumsi di negara manapun. Rata-rata perbedaan adalah 7,5 poin; di Indonesia perbedaan itu berkisar pada 6 poin (berdasar perbedaan rata-rata antara koefisien Gini pendapatan dan konsumsi dari tahun 1984 hingga 1993, yang merupakan saat terakhir tersedianya data pendapatan), yang mengindikasikan bahwa Gini konsumsi yang ada, yaitu sebesar 41, dapat merepresentasikan koefisien Gini pendapatan sekitar 47. Karenanya, ketimpangan di Indonesia sering terlihat lebih rendah dibanding negara-negara lain yang menggunakan koefisien Gini pendapatan, walau sesungguhnya besarnya sebanding atau lebih tinggi.

Bahkan ketika negara-negara menggunakan pengukuran kesejahteraan yang sama pun, seringkali definisi dan pengukuran yang digunakan berbeda. Sebagai contoh, Indonesia menyertakan belanja perumahan bagi pemilik rumah, pembelian barang tahan lama tidak rutin, dan konsumsi bahan pangan yang diproduksi sendiri. Vietnam juga melakukan hal yang sama, namun menggunakan metode depresiasi tahunan untuk barang tahan lama, sementara India sama sekali tidak menyertakan biaya sewa dan konsumsi produksi sendiri. Selain itu, cara konsumsi ditanyakan pada survei rumah tangga juga mempengaruhi hasilnya. Karena itu, perbandingan ketimpangan di dalam satu negara selama suatu periode tertentu jauh lebih mudah dibanding perbandingan tingkatannya secara lintas negara.

Sebagian besar masyarakat merasakan peningkatan ketimpangan, namun

Lebih dari 90 persen responden dari survei persepsi tentang ketimpangan (*Inequality Perceptions Survey*) menyatakan bahwa Indonesia ‘ timpang’, dan 40 persen bahkan menyatakan ‘sangat timpang’. Mereka memperkirakan bahwa 20 persen penduduk paling mampu menerima 38 persen dari seluruh jumlah pendapatan nasional, hampir empat kali dari jumlah

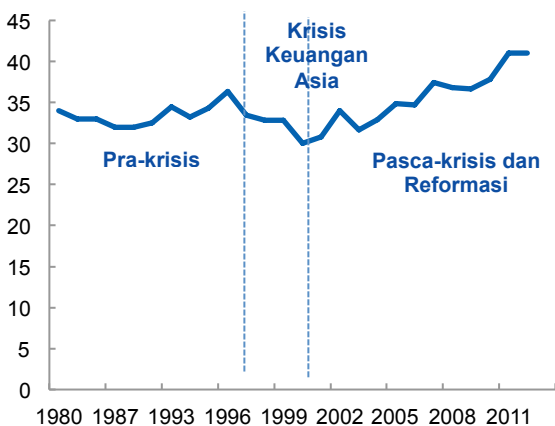
²⁷ Catatan: perubahan dalam metodologi survei berarti data tidak selalu konsisten sepanjang waktu

tingkat ketimpangan
sebenarnya lebih tinggi
dari yang dibayangkan
...

yang mereka perkirakan diterima oleh 20 persen penduduk paling miskin (7 persen dari pendapatan nasional). Sementara penduduk miskin memiliki proporsi konsumsi yang serupa dengan yang diperkirakan oleh para responden survei, 20 persen penduduk Indonesia yang paling mampu mengkonsumsi hampir 48 persen dari jumlah pendapatan nasional. Angka ini 10 poin persentase lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh para responden.

Gambar 37: Ketimpangan di Indonesia meningkat sejak tahun 2000

(konsumsi rumah tangga per kapita koefisien Gini, poin)



Sumber: Susenas dan Perhitungan staf Bank Dunia

Tabel 8: 20 persen rumah tangga paling mampu kini mengkonsumsi hampir setengah dari seluruh konsumsi

(bagian dari seluruh konsumsi rumah tangga, persen)

	2002	2006	2010	2013
Kuintil termiskin	10,8	10,2	9,3	8,9
Kuintil 2	13,7	13,2	12,5	11,8
Kuintil 3	16,5	16,0	16,1	15
Kuintil 4	20,4	21,4	21,6	20,6
Kuintil terkaya	38,5	39,1	40,6	43,7
Desil terkaya	25,2	24,6	26,0	28,7

Sumber: Susenas dan Perhitungan staf Bank Dunia

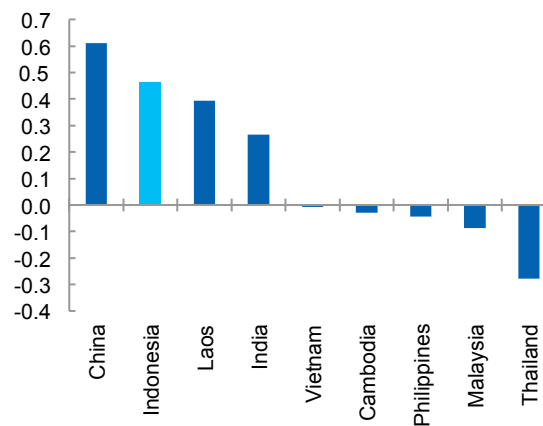
...dan tingkat yang
diukur tampaknya
masih lebih rendah
dari tingkat
sesungguhnya

Tingkat ketimpangan yang sesungguhnya di Indonesia tampak lebih tinggi. Pengukuran ketimpangan secara akurat membutuhkan pengumpulan data dari sampel yang mewakili seluruh rumah tangga, dari yang paling miskin hingga yang paling mampu. Namun di Indonesia tampaknya rumah tangga yang paling mampu melaporkan konsumsi yang lebih rendah atau tidak terwakili sama sekali dari data yang ada. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang digunakan untuk memperkirakan ketimpangan, hanya 5 juta penduduk (atau 2 persen dari populasi) mengkonsumsi lebih dari Rp 2 juta per bulan selama tahun 2012, dan 1,3 juta (0,5 persen) penduduk mengkonsumsi lebih dari Rp 4 juta per bulan. Sementara itu hanya sekitar setengah pemilik mobil penumpang pribadi yang terdaftar di kepolisian dapat dijumpai pada Susenas. Jika setengahnya tidak tercatat, maka nilai koefisien Gini yang sesungguhnya tampaknya akan jauh lebih tinggi. Laporan ketimpangan yang akan datang berusaha untuk memperbaiki hal ini dengan menggunakan metode-metode non-survei guna memperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang berada pada bagian atas dari distribusi pendapatan.

Ketimpangan di Indonesia meningkat lebih cepat dari negara tetangga dikawasan, yang sebagian besar mencatat tren ketimpangan yang stabil atau menurun

Walau perbandingan tingkat ketimpangan lintas negara merupakan hal yang sulit, akibat perbedaan dalam definisi dan pengukuran (lihat Kotak 5), Indonesia terlihat berbeda dari banyak negara tetangganya. Indonesia mencatat peningkatan koefisien Gini kedua tercepat (dan tertinggi) di wilayahnya selama dua dekade terakhir, meningkat sekitar 0,5 poin persentase per tahun antara tahun 1990 dan 2011, hampir semua timbul sejak tahun 2000. Hanya Tiongkok yang mencatat peningkatan yang lebih cepat dengan 0,6 poin persentase per tahun (Gambar 38). Selain itu, negara-negara lain di wilayah tersebut yang mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat pada periode yang sama, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, mencatat ketimpangan yang menurun atau tetap stabil.

Gambar 38: Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan kedua tercepat secara regional setelah Cina antara tahun 1990an dan 2000an
(rata-rata perubahan tahun Gini selama 1990- 2011, poin)



Catatan: Gini konsumsi untuk seluruh negara kecuali Malaysia, yang menggunakan pendapatan. Periode untuk tiap negara adalah: Indonesia 1990-2011; Malaysia 1992-2009; Laos 1992-2008; Tiongkok 1990-2008; Vietnam 1992-2008; Thailand 1990-2009; Filipina 1991-2009; dan Kamboja 1994-2008.
Sumber: Kanbur, Rhee dan Zhuang, 2014, "Inequality in Asia and the Pacific", from PovCalNet (tersedia di <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet>); Perhitungan staf Bank Dunia

c. Sebagian peningkatan ketimpangan didorong oleh peningkatan ketimpangan upah dan non-upah

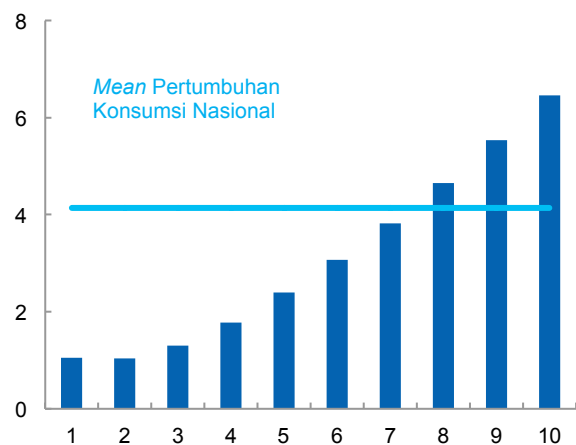
Kelompok kaya menerima manfaat yang jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi dibanding penduduk lainnya

Di Indonesia, seluruh rumah tangga mencatat peningkatan konsumsi riil, namun kaum berada mencatat peningkatan tertinggi, jauh meninggalkan bagian penduduk yang lain. Antara tahun 2003 dan 2010, konsumsi bagi 40 persen penduduk paling miskin hanya bertumbuh 1-2 persen per tahun, sementara 10 persen penduduk paling mampu menikmati pertumbuhan sebesar 6,5 persen dan kelompok penduduk kedua paling mampu mencatat 5,5 persen (Gambar 39). Pertumbuhan yang dicatat oleh tujuh desil paling bawah berada di bawah nilai *mean* pertumbuhan nasional.

Selain itu, kelompok kaya cenderung tetap kaya seiring dengan waktu, pergerakan kelompok miskin membaik

Rumah tangga yang lebih kaya akan relatif lebih bisa mempertahankan posisi mereka dibanding kuintil-kuintil lain di dalam distribusi. Di kalangan 20 persen penduduk Indonesia dengan pendapatan pribadi tertinggi yang berusia antara 25 dan 34 tahun pada tahun 1993, hampir dua per tiga tetap berada pada 20 persen tertinggi itu setelah 14 tahun kemudian. Sebaliknya, para individu pada kuintil-kuintil lain mengalami pergerakan yang relatif lebih besar selama periode itu, baik naik maupun turun (Tabel 9). Namun, penduduk miskin memiliki kemungkinan yang cukup baik untuk bergerak naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi selama hidupnya. Dari mereka yang berada pada kuintil paling miskin pada tahun 1993, 65 persen telah naik ke kuintil dengan penghasilan yang lebih tinggi pada tahun 2007, dengan 19 persen berhasil mencapai dua kuintil paling atas.

Gambar 39: Rumah tangga paling kaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang jauh lebih tinggi dibanding rumah tangga yang lebih miskin
(pertumbuhan konsumsi riil yang disetahunkan 2003-10, persen, menurut desil rumah tangga)



Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia

Tabel 9: Komposisi kuintil paling kaya relatif tetap; lebih banyak pergerakan pada kuintil lain
(persen kuintil pendapatan tahun 1993 pada kuintil tahun 2007)

	07 Q1	07 Q2	07 Q3	07 Q4	07 Q5
93 Q1	35	32	15	15	4
93 Q2	34	25	27	9	4
93 Q3	23	25	34	14	3
93 Q4	14	15	24	26	21
93 Q5	6	4	8	19	64

Catatan: Jumlah kuintil pendapatan bagi individu usia 25-34 pada 1993, di luar mereka yang tidak memiliki pendapatan.
Sumber: IFLS dan Perhitungan staf Bank Dunia

Rumah tangga yang lebih kaya menerima manfaat dari akses ke berbagai aset ...

Berdasarkan data pada tahun 2007, pendapatan pekerja membentuk sekitar setengah dari seluruh pendapatan rumah tangga, dengan sekitar seperempat lainnya berasal dari usaha pertanian dan seperempat sisanya dari usaha non-pertanian.²⁸ Laporan pendapatan yang berasal dari sektor permodalan sangatlah minim. Namun banyak penduduk mampu yang tidak disertakan di dalam data survei, sehingga hanya sedikit catatan tentang pendapatan dalam bentuk pengembalian modal dari saham dan properti. Hanya penduduk Indonesia yang lebih mampu yang memiliki akses ke aset-aset tersebut, dan pendapatan dari sektor ini cukup besar. Sejak awal tahun 2002 hingga akhir tahun 2013, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (indeks seluruh saham) mencatat peningkatan nilai nominal hampir 11 kali lipat, dengan rata-rata pengembalian gabungan sebesar 22 persen per tahun. Indeks properti yang terkait mencatat peningkatan nilai sebesar 12,5 kali, dengan rata-rata tingkat pengembalian tahunan sebesar 23 persen.

... dan dari peningkatan persentase pendapatan modal, sementara proporsi pendapatan tenaga kerja mencatat penurunan

Tidak hanya sebagian besar penduduk Indonesia tidak turut serta di dalam lonjakan pasar modal dan aset-aset, namun upah dan gaji yang menjadi sumber nafkah mereka mencatat penurunan persentase dalam pendapatan nasional. Sebagai contoh, bagian pendapatan tenaga kerja industri mencatat penurunan sebesar 3-4 poin persentase antara awal tahun 2000an dan pertengahan tahun 2000an di Indonesia, yang mencerminkan pola yang lebih umum di Asia.²⁹ Karena penduduk miskin tidak memiliki modal, semakin banyak persentase pendapatan modal yang dinikmati oleh rumah tangga yang lebih mampu, sehingga semakin memperbesar ketimpangan.

²⁸ Survei Kehidupan Keluarga Indonesia tahun 2007

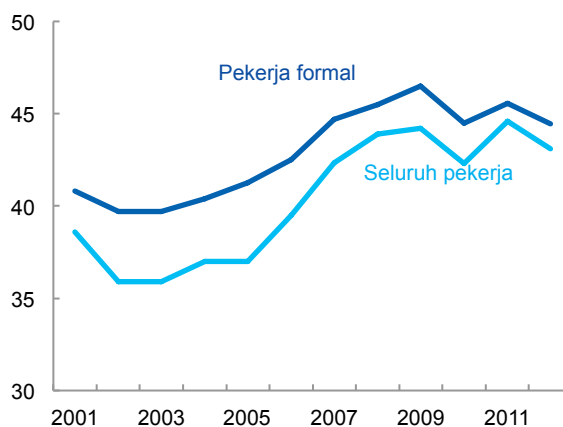
²⁹ Zhuang, Kanbur dan Maligalig, 2014, "Asia's income inequalities: recent trends", pada Kanbur, Rhee dan Zhuang (eds.), "Inequality in Asia and the Pacific"

Ketimpangan upah, gaji, dan pendapatan pekerjaan lainnya semakin meningkat

Koefisien Gini pendapatan upah meningkat dari 41 ke 45 poin persentase antara tahun 2001 dan 2012, dan dari 39 ke 43 pada pekerja formal saja (Gambar 40). Tren serupa berlaku bila hanya pekerja penuh waktu yang disertakan. Dengan sebagian besar pendapatan rumah tangga bergantung pada pendapatan dari bekerja, peningkatan ketimpangan yang signifikan dalam pendapatan tenaga kerja akan berdampak besar terhadap ketimpangan jumlah pendapatan rumah tangga.

Gambar 40: Peningkatan ketimpangan konsumsi sebagian disebabkan oleh peningkatan ketimpangan pendapatan tenaga kerja

(Koefisien Gini pendapatan tenaga kerja, 2001-12, poin)



Sumber: Sakernas; Perhitungan staf Bank Dunia

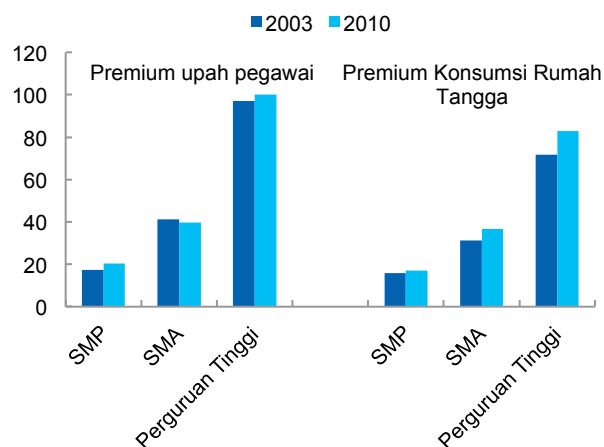
...yang didorong oleh pelebaran kesenjangan dalam hasil pendidikan

Tantangan dalam mencari pekerjaan yang baik semakin meningkat, sehingga semakin memperlebar kesenjangan antara pekerja dari rumah tangga yang lebih mampu dan mereka yang berasal dari rumah tangga yang lebih miskin. Permintaan akan pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi berarti bahwa mereka menikmati upah yang lebih tinggi. Dibanding pekerja dengan pendidikan dasar atau kurang, mereka yang memiliki pendidikan SMP menerima rata-rata 20 persen upah yang lebih tinggi, mereka dengan pendidikan SMA pada 40 persen lebih tinggi, dan mereka dengan pendidikan tinggi menikmati upah dua kali lebih besar (Gambar 41). Peningkatan penerimaan upah ini kian meningkat. Kesenjangan penghasilan antara mereka yang berpendidikan lebih rendah dan lebih tinggi akan mempengaruhi ketimpangan konsumsi. Rumah tangga yang memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan lebih tinggi mencatat konsumsi yang lebih tinggi, sementara kesenjangan dengan rumah tangga yang berpendidikan lebih rendah pun semakin melebar seiring berjalannya waktu (Gambar 41).

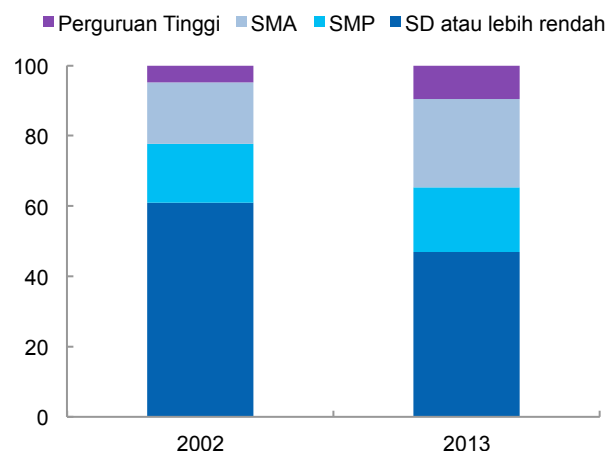
Tiga per empat dari seluruh pekerjaan baru sejak tahun 2001 menuntut pendidikan SMA atau lebih tinggi...

Sekitar 19 juta pekerjaan baru (net) telah dibuka sejak tahun 2002. Dari angka itu, 5,1 juta pekerjaan adalah untuk lulusan SMP; 11,7 juta untuk lulusan SMA; dan 6,1 juta ke lulusan pendidikan tinggi. Pekerjaan bagi mereka dengan pendidikan dasar atau kurang mencatat penurunan bersih sebesar 3,8 juta pekerjaan. Pada tahun 2013, pekerja dengan pendidikan dasar telah menyusut dari mayoritas menjadi minoritas (Gambar 42). Penurunan permintaan akan pekerja dengan pendidikan yang lebih rendah memberikan tekanan terhadap upah mereka, dibanding para pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 41: Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menerima upah yang lebih besar, dan hidup di rumah tangga dengan konsumsi yang lebih besar
(lebih besarnya upah dan konsumsi dibanding pendidikan di atas pendidikan dasar, persen kenaikan dibanding pendidikan dasar)



Gambar 42: Dunia kerja semakin membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi
(pekerja menurut tingkat pendidikan, persen dari jumlah)



Catatan: Lebih tingginya upah pekerja menunjukkan seberapa lebih tingginya upah pekerja pada setiap tingkat pendidikan dibanding pekerja dengan pendidikan dasar atau kurang, di luar pengalaman, gender, status pekerjaan, lokasi dan faktor lainnya. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga menunjukkan hal yang serupa bagi konsumsi per kapita dan pendidikan kepala rumah tangga
Sumber: Sakernas, Susenas dan Perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: Sakernas dan Perhitungan staf Bank Dunia

d. **Kesenjangan akses terhadap kesempatan juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan**

Ketimpangan dalam usia dewasa sering disebabkan oleh ketimpangan kesempatan pada masa kecil; sepertiga jumlah ketimpangan disebabkan oleh keadaan ketika anak lahir atau perkembangan selanjutnya

Sejumlah ketimpangan disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kendali individu, seperti gender, etnis, tempat lahir, maupun latar belakang keluarga. Jenis perbedaan tersebut merintang para individu dalam mewujudkan potensi mereka sepenuhnya, sesuatu yang tidak adil bagi mereka dan menurunkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan, serta membebani pertumbuhan dan produktivitas. Karenanya kesetaraan kesempatan berupaya untuk memberi peluang yang lebih adil sehingga keadaan-keadaan tersebut tidak merintang peluang keberhasilan seseorang. Bahkan dengan tiga faktor saja—gender kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan tempat tinggal (perdesaan atau perkotaan, dan wilayah di Indonesia)—sudah memiliki kaitan dengan 33 persen dari ketimpangan jumlah konsumsi pada tahun 2012.³⁰ Keadaan ini diukur ketika dewasa, karena keterbatasan data, namun sangat terkait dengan kesempatan yang diperoleh oleh mereka ketika mereka masih kanak-kanak—yaitu di mana mereka lahir dan kesempatan pendidikan yang tersedia bagi mereka. Laporan ketimpangan yang akan datang akan secara lebih akurat mengkuantifikasi taraf pencapaian ketika dewasa terkait dengan kesenjangan kesempatan ketika masa kecil.

Perbedaan kehidupan anak-anak dengan latar belakang yang berbeda di Indonesia sangat mencolok

Kesenjangan kesempatan dapat ditunjukkan dengan membandingkan seorang anak yang lahir di Jakarta dari orangtua yang mampu dan berpendidikan setidaknya sekolah menengah atas dengan seorang anak yang lahir di daerah perdesaan di Papua atau Maluku oleh orangtua yang tidak mampu dan berpendidikan rendah. Yang lahir di perkotaan hanya memiliki 6 persen kemungkinan menerima sanitasi yang tidak layak, dibanding 98 persen untuk anak

³⁰ Merupakan komponen antar-kelompok dari dekomposisi Indeks Theil menjadi komponen antaran dan di dalam-kelompok menggunakan gender dan pendidikan kepala rumah tangga, lokasi perdesaan atau perkotaan, dan wilayah di Indonesia berdasar kelompok pulau. Perkiraan ini barulah permulaan, dan penelitian masih berlangsung untuk lebih memahami bagaimana keadaan lahir berkontribusi terhadap ketimpangan secara keseluruhan, dan bagaimana evolusinya seiring berjalannya waktu.

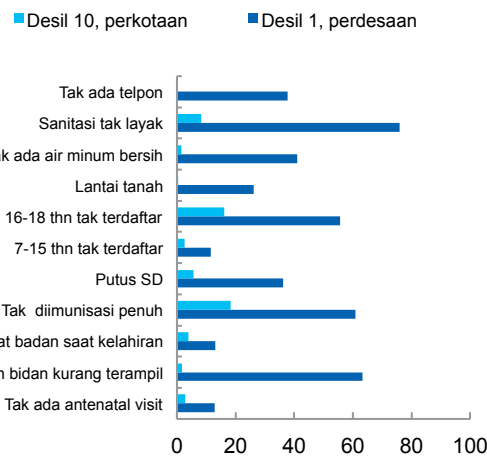
yang lahir di perdesaan (Gambar 43). Perbedaan ini juga mencakup seluruh indikator kesempatan lainnya, seperti akses ke air bersih, memiliki rumah dengan lantai yang bukan tanah, pendidikan sekolah dasar, persalinan yang dibantu oleh tenaga berpengalaman, dan cakupan imunisasi. Hal ini berlaku tidak hanya ketika membandingkan antara Jakarta dan Papua. Anak-anak dari rumah tangga yang lebih miskin secara konsisten tertinggal dari anak-anak dari rumah tangga yang lebih mampu di daerah perkotaan pada hampir seluruh indikator (Gambar 44).

Gambar 43: Terdapat perbedaan mencolok pada akses ke kesempatan hidup bagi anak-anak di Indonesia...
(kurangnya akses, persen)



Sumber: Susenas 2012, DHS 2007; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 44: ... dan ada kesenjangan yang besar terhadap kesempatan antara anak desa yang lahir pada desil paling miskin dan anak kota yang lahir ke desil paling mampu
(kurangnya akses, persen)

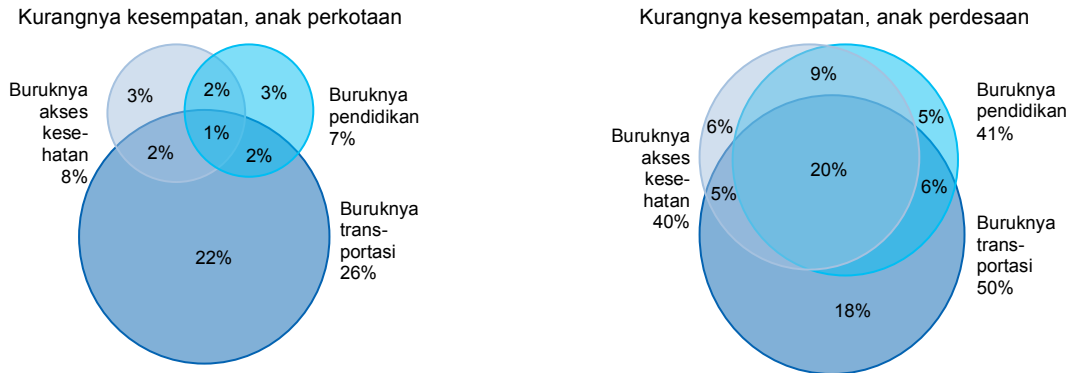


Catatan: Desil adalah desil konsumsi rumah tangga riil per kapita yang disesuaikan menurut wilayah nasional.
Sumber: Susenas 2012, DHS 2007; perhitungan staf Bank Dunia

Anak-anak di daerah terpencil dan perdesaan cenderung menghadapi ketimpangan kesempatan dalam berbagai segi

Ketika kesenjangan kesempatan dalam berbagai segi dialami oleh anak-anak yang sama, pengaruhnya kepada hasil di kemudian hari tampaknya akan semakin buruk. Anak-anak di daerah perdesaan lebih mungkin mengalami kekurangan akses ke layanan pendidikan, kesehatan dan transportasi dibanding anak-anak perkotaan. Anak-anak di perdesaan juga lebih mungkin mengalami kekurangan seluruh kesempatan itu pada waktu yang bersamaan. Dari 35 persen anak perkotaan yang mengalami kekurangan akses dari setidaknya salah satu dari tiga segi tersebut, 20 persen dari mereka mengalami kekurangan akses dalam dua segi (Gambar 45, yang ditunjukkan dengan daerah irisan dua lingkaran) dan hanya sekitar 3 persen mengalami kekurangan akses dalam ketiga segi itu (daerah irisan ketiga lingkaran). Sebaliknya, 58 persen anak-anak perdesaan mengalami kekurangan akses setidaknya dalam satu segi, dan sepertiga dari mereka mengalami kekurangan akses dalam dua segi dan sepertiga lagi mengalami kekurangan akses dalam ketiga segi itu. Keadaan di beberapa daerah, seperti Papua, bahkan lebih buruk lagi, dengan hampir seluruh anak-anak mengalami kekurangan air bersih, sanitasi yang layak, atau tenaga listrik mengalami kekurangan setidaknya dalam dua dari tiga segi, dan sebagian besar mengalami kekurangan dalam ketiga segi tersebut.

Gambar 45: Sebagian besar anak perdesaan yang tak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi mengalami kekurangan dalam lebih dari satu segi
(lingkaran yang tumpang tindih menunjukkan kurangnya akses pada dua atau tiga dimensi)

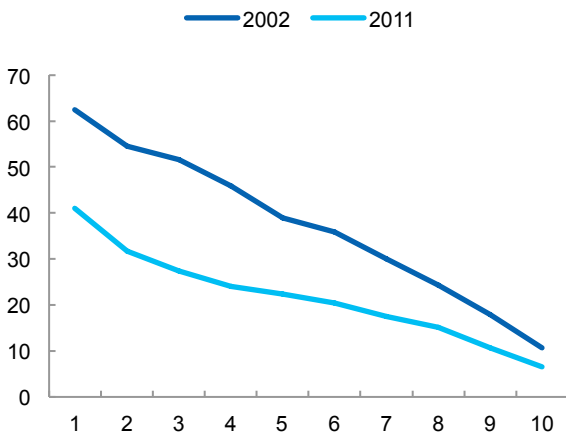


Catatan: Ukuran lingkungan diagram Venn sesuai dengan besarnya kekurangan kesempatan.
Sumber: Hadiwidjaja, Paladines dan Wai-Poi (2013) dari Susenas 2012, Podes 2011

Sejumlah kesenjangan akses terhadap kesempatan telah membaik dalam dekade terakhir, memungkinkan anak untuk mencapai hasil yang lebih baik dibanding orangtuanya

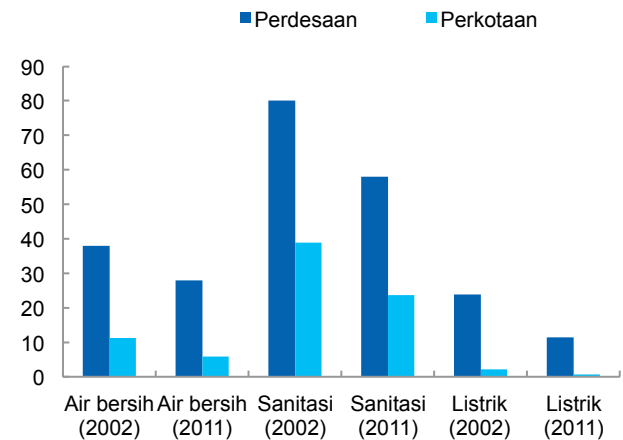
Dalam sejumlah segi, kesenjangan antar anak-anak dari keluarga mampu dan tidak mampu mengalami penurunan antara tahun 2002 dan 2011,³¹ termasuk sebagian besar untuk hasil dan kesempatan segi kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sebagai contoh, pada tahun 2002 kelahiran 63 persen anak-anak pada desil konsumsi yang paling rendah dibantu oleh tenaga yang tidak terlatih, dibanding hanya 11 persen pada desil yang paling mampu, suatu kesenjangan sebesar 52 poin persentase. Pada tahun 2011, kesenjangan ini telah menyusut ke 34 poin persentase (Gambar 46). Seperti kesenjangan antara anak-anak mampu dan tidak mampu, kesenjangan perdesaan-perkotaan juga semakin menyempit pada banyak segi, seperti akses ke air bersih, sanitasi yang layak, dan tenaga listrik (Gambar 47). Namun penyempitan kesenjangan perkotaan-perdesaan mencatat laju yang lebih lambat.

Gambar 46: Anak-anak dari rumah tangga yang lebih miskin tertinggal dalam kehidupan, namun kesenjangan telah menyusut
(bantuan persalinan oleh tenaga terlatih per desil konsumsi per kapita rumah tangga, persen)



Sumber: Hadiwidjaja, Paladines dan Wai-Poi (2013) dari Susenas

Gambar 47: Kesenjangan kesempatan antara rumah tangga perkotaan dan perdesaan menyusut dengan lebih lambat
(kurangnya akses per desil, persen)



Sumber: Hadiwidjaja, Paladines dan Wai-Poi (2013) dari Susenas

Kesenjangan dalam akses ke pendidikan pun menyusut, namun

Upaya Pemerintah yang substansial dan berkelanjutan untuk memperluas akses ke pendidikan bagi semua penduduk selama 40 tahun terakhir telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga lebih miskin atau berpendidikan lebih rendah

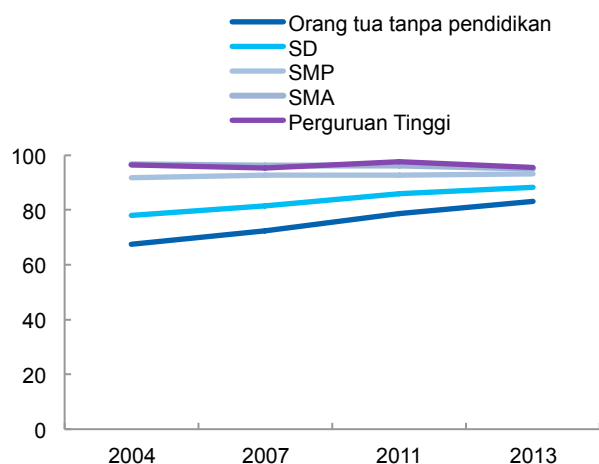
³¹ Hadiwidjaja, Paladines, dan Wai-Poi (2013), "Child Multidimensional Poverty in Indonesia".

ketimpangan terkait kualitas pelayanan tetap terjadi

untuk mengenyam pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Angka partisipasi untuk usia 13-15 tahun (Gambar 48) yang orangtuanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau kurang telah meningkat pada dekade lalu. Mereka bergabung dengan anak-anak yang orangtuanya memiliki pendidikan SMP atau lebih tinggi, yang memang telah memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi. Penyempitan kesenjangan partisipasi sekolah memberikan kesempatan bagi anak-anak miskin untuk meningkatkan hasil pendidikan mereka selama bertahun-tahun. Orang dewasa yang orangtuanya hanya mengenyam sedikit pendidikan pun semakin memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, hampir 60 persen mereka yang lahir antara tahun 1952 dan 1961 pada keluarga yang orangtuanya tidak pernah mengenyam pendidikan, juga tidak menerima pendidikan. Untuk mereka yang lahir pada tahun 1962-71, angkanya menurun menjadi 45 persen, dan hanya sebesar 21 persen bagi mereka yang lahir pada tahun 1972-81 (Gambar 49). Namun, pengukuran akses dan kesempatan, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan, tidak mencerminkan kualitas dari layanan yang diberikan. Anak-anak pada daerah yang lebih sulit atau lebih terpencil tidak hanya menerima layanan yang lebih sedikit, bahkan ketika mereka mendapatkannya pun, kualitasnya seringkali lebih rendah.

Gambar 48: Tingkat pendaftaran anak yang orangtuanya berpendidikan rendah mulai menyusul...

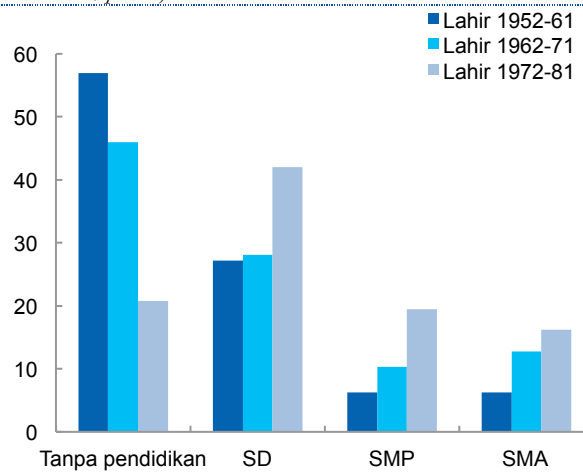
(tingkat pendaftaran anak usia 13-15 menurut pendidikan orangtua, persen)



Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 49: ...dan anak-anak dengan orangtua tanpa pendidikan meraih pendidikan yang lebih tinggi

(pencapaian pendidikan terakhir anak dengan orangtua tanpa pendidikan, persen)



Sumber: IFLS 2007

e. Kurangnya perlindungan yang memadai dari guncangan juga mempersulit rumah tangga pada bagian bawah distribusi pendapatan untuk naik

Rumah tangga menghadapi sejumlah risiko pada tingkat individu, rumah tangga, daerah, dan nasional

Rumah tangga di Indonesia telah menghadapi sejumlah guncangan ekonomi dan bencana alam pada 15 tahun terakhir. Indonesia mengalami dampak terburuk dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997-98, dan mencatat perlambatan pertumbuhan selama krisis keuangan dunia tahun 2008-09, walau tidak separah sebagian besar negara-negara lain. Indonesia menghadapi masa-masa lonjakan harga bahan pangan, seperti pada tahun 2005-06, 2008, dan 2010. Indonesia belakangan ini juga ditimpa sejumlah bencana alam, termasuk tsunami tahun 2004 yang memporakporandakan Aceh, gempa bumi di sejumlah lokasi, dan meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Bencana dan kejutan ekonomi tersebut menyoroti besarnya risiko yang dihadapi oleh rumah tangga di Indonesia secara berkelanjutan. Risiko-risiko yang khusus dihadapi oleh individu atau rumah tangga tertentu juga sama pentingnya. Risiko-risiko itu termasuk kehilangan pekerjaan, penyakit dan kecelakaan, kematian pasangan hidup, atau perceraian. Bagi banyak rumah tangga, kejutan demikian sudah cukup untuk mendorong mereka jatuh kembali ke kemiskinan.

Banyak rumah tangga tidak memiliki akses ke mekanisme penanggulangan yang dimiliki oleh rumah tangga yang lebih mampu

Ketika suatu rumah tangga mengalami suatu kejutan, mereka harus menemukan cara untuk menanggapinya. Namun banyak rumah tangga tidak memiliki akses ke sejumlah mekanisme penanggulangan yang lebih baik seperti yang dimiliki oleh rumah tangga yang lebih mampu. Sebagai contoh, asuransi kesehatan yang memberi jaminan terhadap biaya pengobatan untuk penyakit berat atau kecelakaan akan membantu rumah tangga dalam menanggung besarnya biaya yang dikeluarkan saat ditimpa kejadian tersebut. Rumah tangga tanpa asuransi menghadapi pilihan untuk tidak mengobati yang sakit, menggunakan sedikit tabungan yang dimiliki, menjual harta benda (yang seringkali menjadi tumpuan nafkah mereka), atau menurunkan pengeluaran yang akan memberi pengaruh negatif bagi generasi berikutnya, seperti pengeluaran untuk pendidikan. Mereka juga dapat meminjam dari teman-teman dan keluarga, namun di Indonesia hal ini bisa jadi tidak cukup untuk menghadapi kejutan yang besar (Kotak 6), terutama bila kejutan itu dialami oleh banyak orang di masyarakat pada waktu yang sama, seperti dalam bencana alam.

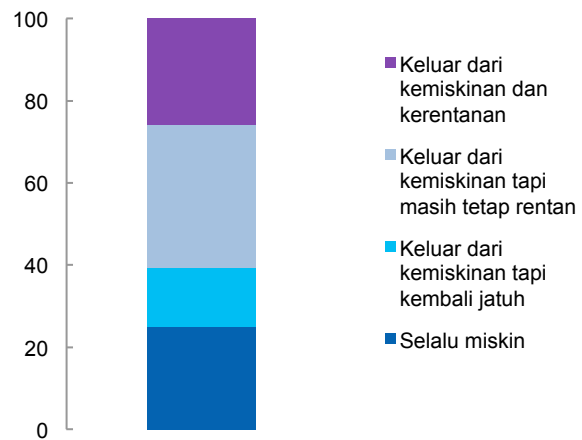
Karenanya, mereka dapat menemui kesulitan berjuang naik secara ekonomi karena guncangan-guncangan baru melempar mereka kembali ke bawah

Meski individu mendapat pendidikan yang baik dan menemukan pekerjaan yang baik, adanya kejutan dan tidak adanya mekanisme penanggulangan yang memadai akan menyulitkan mereka untuk mencapai peningkatan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terutama berlaku bagi penduduk miskin, yang memiliki mekanisme penanggulangan paling lemah. Dari jumlah penduduk miskin tahun 2008, 75 persen akan gagal keluar dari keadaan rentan atau miskin pada tahun 2010 (Gambar 50). Walau seringkali penyebabnya adalah tidak adanya lapangan kerja yang produktif, namun sebagian dari penyebabnya adalah kejutan. Limabelas persen dari penduduk miskin sesungguhnya berhasil keluar dari kemiskinan pada tahun 2009, namun kembali miskin pada tahun 2010. Tanpa cara yang efektif untuk menghadapi kejutan, kemampuan untuk memperoleh lebih banyak dan menaiki jenjang yang lebih tinggi dalam tingkat distribusi pendapatan akan tetap terbatas. Hal ini berlaku tidak hanya bagi penduduk miskin, namun juga bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Risiko juga dapat mendorong rumah tangga mengambil pilihan yang aman namun berpenghasilan rendah

Guncangan tidak hanya merintangi mereka yang memiliki sumber nafkah produktif dari peningkatan, namun rasa takut akan risiko—serta tidak adanya mekanisme efektif untuk menghadapinya—dapat mengakibatkan individu untuk cenderung menghindari kegiatan yang berisiko walau berpotensi hasil yang besar. Hal ini ditekankan pada Laporan Pembangunan Dunia tahun 2014: *Risiko dan Kesempatan: Mengelola Risiko Pembangunan*.³² Laporan itu mengamati bahwa “menyadari bahwa kejutan negatif dapat mendorong mereka ke keadaan miskin, pailit, atau krisis, kaum miskin dapat bertahan menggunakan teknologi dan sumber nafkah yang tampaknya relatif aman namun juga tidak berkembang,” menyoroti bahwa tidak hanya hal ini mencegah mereka yang berada pada tingkat distribusi setengah ke bawah untuk meningkat ke atas, namun juga secara negatif mempengaruhi pembangunan nasional melalui kurangnya investasi dalam pekerjaan yang produktif.

Gambar 50: 75 persen rumah tangga tidak keluar dari kemiskinan atau kerentanan selama lebih dari tiga tahun (status rumah tangga tahun 2010 yang miskin pada 2008, persen)



Catatan: Miskin adalah keluarga di bawah garis kemiskinan resmi; rentan adalah mereka yang hidup di antara garis kemiskinan dan 1,5 kali garis itu.

Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia

³² Laporan tersedia di <http://www.worldbank.org/wdr2014/>.

Kotak 6: Temuan utama penelitian terbaru tentang risiko dan manajemen risiko di Indonesia

Menggunakan bukti-bukti kualitatif asli dari empat lokasi daerah perdesaan dan pinggiran kota, penelitian ini menelaah secara mendalam risiko-risiko yang dihadapi dan praktik-praktik manajemen risiko yang dipilih pada tingkat rumah tangga dan warga di Indonesia. Tiga pertanyaan penelitian yang berkaitan dipelajari: risiko dan guncangan apa yang paling sering dan paling besar dihadapi oleh rumah tangga dan warga? Siapa atau apa yang diandalkan oleh rumah tangga untuk menangani risiko-risiko dan kejutan-kejutan tersebut? Faktor khusus rumah tangga dan warga apa yang mendorong peningkatan risiko-risiko dan/atau penggunaan metode manajemen risiko yang spesifik?

Penelitian ini mengandung lima pesan utama. Pertama, kaum miskin dan mendekati miskin di perdesaan menghadapi berbagai jenis risiko dan guncangan. Guncangan ekonomi dan kesehatan adalah yang terpenting. Selain itu, penelitian ini juga menelaah suatu risiko yang lebih jarang dibicarakan, yang timbul akibat tingginya biaya untuk turut serta dalam ritual adat pada siklus kehidupan. Kedua, walau telah ada peningkatan bantuan sosial yang resmi, mekanisme penanggulangan yang tidak resmi, seperti meminjam dari teman dan keluarga, masih merupakan cara paling utama bagi rumah tangga dan warga dalam mengelola berbagai risiko dan kejutan yang mereka jumpai. Ketiga, sumber daya informal yang digunakan bersama antar rumah tangga atau di dalam lingkungan warga seringkali tidak mencukupi untuk mengelola kejutan perorangan atau rumah tangga yang paling merusak, atau kejutan yang mempengaruhi seluruh warga pada saat yang bersamaan, seperti bencana alam; sumber daya informal juga tidak memadai ketika rumah tangga menghadapi sejumlah kejutan pada waktu yang bersamaan atau secara berturut-turut dengan jeda waktu yang singkat. Keempat, bantuan sosial, terutama dalam bentuk program-program yang menanggapi kejutan kesehatan dan lingkungan, memainkan peran yang penting, namun cakupan dan tingkat bantuannya masih tetap belum mencukupi. Kelima, membangun sistem yang memadai yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko dan kejutan-kejutan adalah perhatian utama dari para penyusun kebijakan – temuan-temuan ini menunjukkan bahwa terdapat risiko-risiko penting yang belum terungkap dalam siklus kehidupan yang mungkin akan lebih baik bila dihadapi dengan bantuan yang bersifat formal.

Sumber: Laporan Bank Dunia (akan datang) tentang Manajemen Risiko Informal dan Kerentanan pada Masyarakat Miskin di Indonesia: Penelitian di Empat Desa

f. Ketimpangan dapat mengarah ke penurunan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan konflik

Peningkatan ketimpangan dapat memperlambat pengentasan kemiskinan

Selain pertimbangan keadilan dan kesetaraan, ketimpangan juga menjadi penting karena berbagai alasan lain, termasuk stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Penduduk miskin tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena mereka tidak memiliki pendidikan memadai. Selain itu, banyak penduduk yang tidak miskin namun berpendidikan yang lebih baik yang juga tidak dapat menemukan pekerjaan produktif. Seperti yang telah disinggung di atas, sebagian besar pekerjaan yang ada sekarang, dan sebenarnya sebagian besar pekerjaan yang dibuka di Indonesia dalam dekade terakhir, berada pada sektor-sektor dengan produktivitas rendah. Selain itu, para pekerja memiliki akses terbatas ke perlindungan pekerja yang resmi. Hal ini mengakibatkan penduduk dari rumah tangga yang lebih miskin harus berjuang untuk keluar dari kemiskinan.

Ketimpangan yang lebih besar dapat pula mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi

Tidak cukupnya pekerjaan-pekerjaan produktif juga dapat mempengaruhi pertumbuhan Indonesia saat ini dengan tidak memaksimalkan kontribusi produktif angkatan kerja yang ada saat Indonesia berada pada puncak dividen demografis. Tingginya tingkat ketimpangan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara lain. Ketidakmampuan 40 persen rumah tangga Indonesia yang paling bawah untuk keluar dari keadaan yang rentan dan meningkat ke kelas menengah dapat memperlemah proyeksi pertumbuhan konsumsi kelas menengah dan menurunkan pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah jalur-jalur lainnya, seperti rendahnya investasi dalam sumber daya manusia dan penurunan kegiatan kewirausahaan. Selain itu, ketimpangan kesempatan dapat berdampak terhadap kemampuan generasi muda kini untuk mewujudkan potensi mereka secara paripurna, sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan pada masa depan. Dalam kadar tertentu, ketimpangan diperlukan untuk pertumbuhan, karena imbalan yang berbeda akan memberikan insentif bagi kerja keras dan inovasi. Di Indonesia, temuan awal mengindikasikan bahwa kadar ketimpangan yang lebih tinggi pada tingkat kabupaten memiliki kaitan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, namun setelah melewati kisaran tertentu, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dapat menghambat pertumbuhan.³³

³³ Yumna, Rakhmadi, Hidayat, Gultom, Suryadi, 2014 (akan datang), "Estimating the Impact of Inequality on Growth and Unemployment in Indonesia".

... dan perlambatan pertumbuhan dapat semakin menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan

Kemiskinan umumnya turut menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, namun laju pengentasan kemiskinan akan bergantung pada seberapa meratanya pertumbuhan itu. Jika pola pertumbuhan lebih menguntungkan penduduk mampu berada dibanding penduduk miskin, laju pengentasan kemiskinan melambat. Kuatnya pertumbuhan Indonesia selama dekade lalu seharusnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Rata-rata pengaruh pertumbuhan—tanpa melihat siapa yang menerima manfaat dari pertumbuhan itu—seharusnya akan menurunkan kemiskinan dari 17,4 persen pada tahun 2003 ke 0 persen pada tahun 2010.³⁴ Hal ini sebetulnya akan dapat mengentaskan hampir seluruh kemiskinan di Indonesia jika seluruh rumah tangga menerima rata-rata pertumbuhan itu dengan adil dan merata.³⁵ Namun distribusi yang tidak seimbang mengakibatkan tingkat kemiskinan hanya turun sebesar 5,4 poin persentase, menjadi 12,0 persen. Tingkat ketimpangan, dengan demikian, mempengaruhi sejauh mana Indonesia dapat mewujudkan sasaran pengentasan kemiskinannya.

Ketimpangan juga dapat berkontribusi pada konflik dan tekanan sosial

Ketika ketimpangan meningkat, perbedaan antara taraf hidup rumah tangga menjadi lebih terlihat. Hal ini dapat mendorong rasa iri dan konflik. Penelitian baru dalam pengaruh ketimpangan di Indonesia menunjukkan bahwa ketika suatu daerah menjadi lebih tidak setara, maka mereka lebih cenderung untuk mengalami konflik. Secara rata-rata, suatu kabupaten dengan koefisien Gini sebesar 30 mencatat sekitar 30 persen insiden kekerasan yang lebih banyak dibanding kabupaten dengan koefisien Gini sebesar 20. Pada kabupaten dengan koefisien Gini sebesar 40, kekerasan meningkat sebesar 60 persen.³⁶ Peningkatan konflik membawa dampak yang merugikan secara sosial dan politik, dan dapat menjadi penghambat lain dari pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

g. Kebutuhan untuk bertindak dan sejumlah pesan kebijakan utama

Survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mengharapkan pemerataan yang lebih baik dan bersedia menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat untuk mencapainya...

Ketika diminta memilih antara dua distribusi pendapatan—satu yang lebih merata dan satu yang lebih tidak merata—sebagian besar responden survei di Indonesia memilih distribusi yang lebih merata.³⁷ Secara rata-rata, mereka mengatakan bahwa mereka lebih memilih 20 persen penduduk paling mampu di Indonesia untuk menerima sekitar 29 persen dari jumlah pendapatan nasional, dan 20 persen distribusi paling bawah untuk menerima 13 persen dari jumlah pendapatan nasional. Distribusi ideal mereka tidak sepenuhnya merata: bagian atas tetap memiliki pendapatan lebih dari dua kali dibanding yang di bawah. Ketika diberi pilihan, para responden survei menyatakan bahwa mereka cenderung memilih pertumbuhan yang lebih lambat dan penurunan ketimpangan dibanding pertumbuhan yang lebih cepat namun dengan peningkatan ketimpangan. Responden juga memiliki bayangan bagaimana memperkecil ketimpangan. Sebanyak 42 persen menyatakan bahwa menyediakan kesempatan kerja adalah cara terbaik untuk mengatasi ketimpangan, sementara 24 persen memilih strategi perlindungan sosial. Responden lain memilih pendidikan sebagai opsi terbaik (18 persen) atau pemberantasan korupsi (18 persen).

Untuk dapat menanggapi dibutuhkan

Proyek penelitian Bank Dunia yang sedang berjalan tentang ketimpangan yang menjadi dasar penulisan bagian ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab ketimpangan di Indonesia. Dengan diagnosis tersebut, penelitian ini akan

³⁴ Berdasarkan penelitian Bank Dunia yang menguraikan penurunan kemiskinan historis menjadi kontribusi dari rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga (pengaruhnya bila seluruh rumah tangga menerima rata-rata pertumbuhan secara merata) dan dari distribusi pertumbuhan tersebut (pengaruhnya bila tidak ada pertumbuhan dan hanya perubahan yang diamati dalam ketimpangan). Penerapannya di Indonesia memberikan pengaruh pertumbuhan dan distribusi, namun juga residual yang besar (dan negatif). Namun kasus yang paling konservatif terhadap pengaruh pertumbuhan dapat ditentukan dengan menambahkan seluruh sisa residual ini kepada distribusi, mengakibatkan pengaruh pertumbuhan *minimum* terhadap pengentasan kemiskinan, seperti yang disajikan di sini.

³⁵ Pada kenyataannya, kemiskinan akan rendah namun tidak nol, karena beberapa penduduk tidak miskin akan jatuh ke kemiskinan setelah menerima kejutan.

³⁶ Peirskalla dan Sacks (2014). "Research Note: Using NVMS Data to Identify Determinants of Political Violence and Social Conflict".

³⁷ Lembaga Survei Indonesia (2014), *Inequality Perceptions Survey*

pemahaman yang lebih baik terhadap ketimpangan...

mendukung pemerintah dan penyusun kebijakan baru di Indonesia dalam memahami rangkaian pilihan kebijakan yang tersedia dan sejauh mana kebijakan itu dapat mengatasi pendorong-pendorong utama ketimpangan di Indonesia.

... dan belajar dari negara-negara lain yang telah menurunkan ketimpangan sementara terus tumbuh

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan tidaklah harus menjadi hasil dari pembangunan, dan bukan pula tren yang umum pada wilayah ini selama dekade lalu. Thailand, Vietnam, dan Filipina mencatat tingkat pertumbuhan yang hampir serupa dengan Indonesia selama periode serupa pula. Namun, negara-negara tersebut berhasil mencatat ketimpangan yang stabil atau bahkan menurun. Pertumbuhan pada dekade lalu juga lebih merata di Vietnam dan Thailand dibanding di Indonesia. Selain itu, bahkan Amerika Latin—daerah yang paling tidak merata di dunia—telah mencatat penurunan ketimpangan sejak akhir tahun 1990an. Negara-negara di wilayah ini telah mencapai prestasi tersebut dengan cara yang berbeda-beda, namun terdapat pembelajaran serupa dan sejumlah pilihan kebijakan yang dapat dipilih.³⁸

Kebijakan-kebijakan belanja pemerintah dan perpajakan memainkan peran penting dalam mengatasi isu terkait distribusi pendapatan

Struktur kebijakan fiskal dapat menjadi faktor penentu penting dalam tren ketimpangan dalam suatu ekonomi. Beberapa bentuk belanja cenderung hanya menguntungkan kelompok kaya, seperti subsidi BBM. Sementara belanja lainnya dapat bermanfaat bagi seluruh penduduk, seperti investasi dalam layanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta infrastruktur untuk menghubungkan desa-desa ke kota-kota secara lebih baik, mendekatkan daerah-daerah ke pusat, dan Indonesia ke pasar internasional. Struktur perpajakan juga memainkan peran penting. Pemerintah pun dapat meminta seluruh penduduk untuk membayar porsi yang adil. Memperluas cakupan pajak untuk menyertakan lebih banyak penduduk tidak hanya dapat meningkatkan opsi kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan menurunkan ketimpangan, namun juga dapat mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.

Membangun dasar bagi pertumbuhan yang inklusif dimulai dengan investasi pada pendidikan dasar dan kesehatan berkualitas bagi semua anak...

Seperti yang ditegaskan dalam *Indonesia 2014 Development Policy Review* yang baru saja diterbitkan oleh Bank Dunia, perbaikan akses daerah ke berbagai layanan merupakan salah satu prioritas utama dalam memastikan pemerataan kesejahteraan pada masa depan.³⁹ Investasi pendidikan dan kesehatan tidak hanya perlu untuk menutup kesenjangan layanan yang masih ada, namun di kemudian hari, harus menjawab kesenjangan yang lebih mendasar dalam layanannya antara daerah-daerah yang lebih kaya dan lebih miskin. Selain itu, peningkatan akses ke air bersih, sanitasi yang layak, dan perumahan berkualitas sangatlah penting untuk mendukung upaya-upaya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Hanya ketika seluruh anak-anak dapat memiliki awal mula yang terbaik dalam hidupnya, maka mereka dapat memaksimalkan potensi mereka, yang pada gilirannya akan memungkinkan Indonesia untuk meraup manfaat ekonomi yang lebih besar, dan pada saat yang sama, menurunkan ketimpangan.

...dan memastikan semua orang memiliki akses ke mata pencaharian yang produktif...

Berikutnya, penduduk Indonesia yang terdidik dan sehat membutuhkan mata pencaharian yang produktif. Ini berarti penciptaan lebih banyak pekerjaan yang berbasis keterampilan, dan memastikan bahwa para lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang tepat untuk mengisi pekerjaan tersebut. Hal ini membutuhkan suatu lingkungan ekonomi yang terbuka yang mendorong peningkatan berkelanjutan Indonesia pada tangga nilai, termasuk peraturan ketenagakerjaan yang menguntungkan bagi tenaga kerja dan dunia usaha, iklim investasi yang positif, peraturan perundangan dunia usaha yang efisien dan transparan, serta birokrasi yang bebas dari korupsi dan ketidakefisienan. Seperti yang telah dipaparkan dalam *Development Policy Review*, penerapan strategi pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas seperti ini dibutuhkan untuk mewujudkan potensi ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan menyebarkan kesejahteraan secara lebih merata.

³⁸ Lihat, misalnya, Bank Dunia, April 2012, "Inequality in Focus"

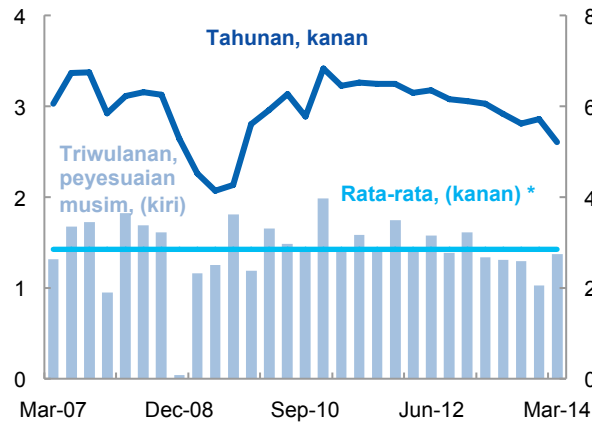
³⁹ Bank Dunia (2014), "Indonesia Development Review 2014: Avoiding the Trap". Laporan tersedia di <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/06/23/indonesia-2014-development-policy-review> dan diringkas di edisi *IEQ* Maret 2014.

**...dan terlindung dari
berbagai guncangan**

Banyak penduduk Indonesia yang belajar dengan rajin di sekolah, menjaga kesehatan, dan mendapat pekerjaan yang baik, namun mereka masih menghadapi berbagai risiko dalam hidup; dan guncangan-guncangan dapat melenyapkan hasil-hasil kerja keras mereka. Pemerintah dapat membantu melindungi rumah tangga dari guncangan seperti itu, baik terhadap kesehatan, pekerjaan, biaya hidup, dan yang lain. Pertama, hal itu berarti mendorong akses yang lebih baik ke asuransi guna memungkinkan mereka yang sanggup membayarnya untuk melindungi mereka sendiri, sementara memperluas cakupan perlindungan kepada mereka yang tidak dapat membayar perlindungan bagi mereka sendiri. Pengaturan yang tepat untuk program-program jaminan sosial yang baru akan menjadi sangat penting. Kedua, hal itu berarti memperluas dan meningkatkan jaring pengaman sosial yang ada untuk secara efektif memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk miskin dan rentan untuk mengatasi seluruh risiko yang mereka hadapi dalam hidup. Ketiga, terus memperbaiki pengelolaan risiko bencana dan semakin memperkuat ketahanan diperlukan guna melindungi hasil upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendapatan yang selama ini telah dicapai dengan susah payah.

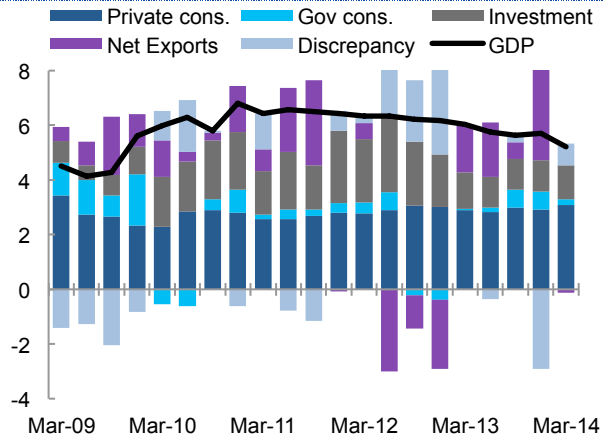
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB
(pertumbuhan PDB riil, persen)



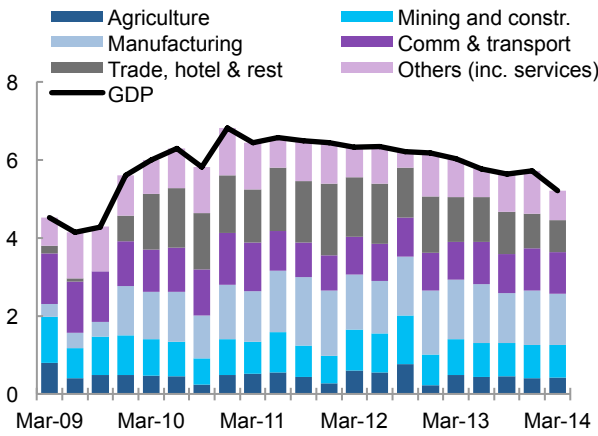
Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw Q12007 – Q4 2014
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran
(kontribusi pertumbuhan PDB riil qoq, penyesuaian musiman, persen)



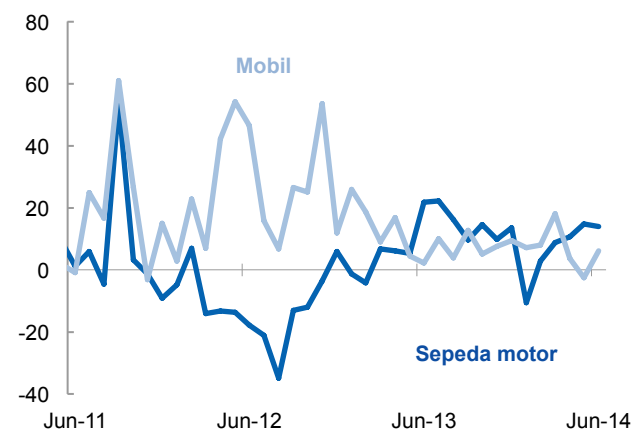
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi
(kontribusi pertumbuhan PDB riil qoq, penyesuaian musiman, persen)



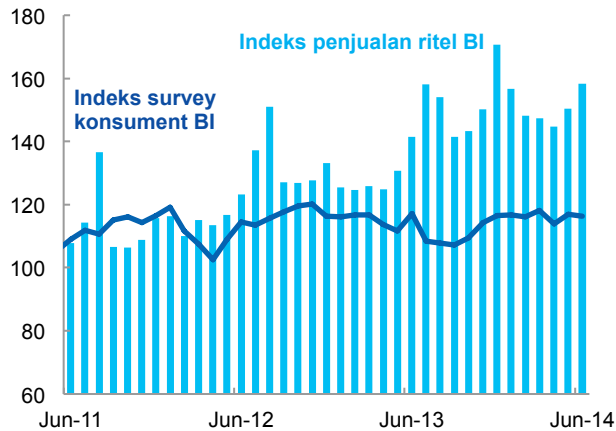
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil
(pertumbuhan penjualan dengan penyesuaian musiman, persen)



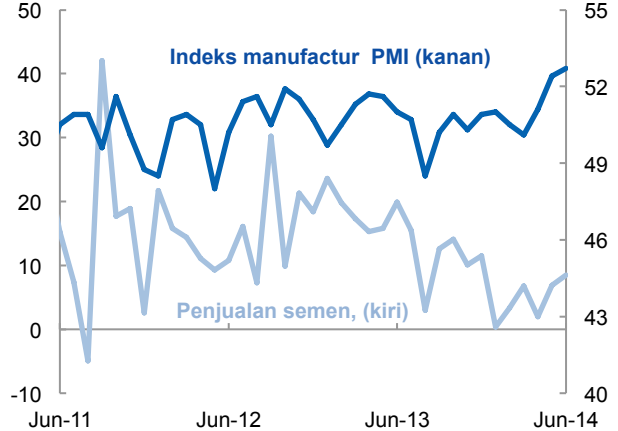
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen
(tabel dasar penjualan eceran 2010=100)



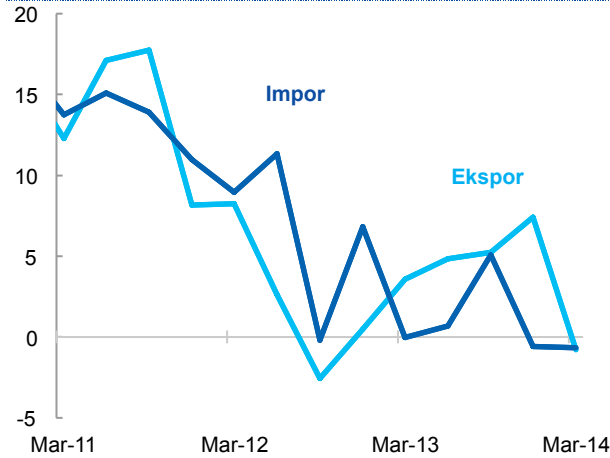
Sumber: BI

Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri
(indeks PMI dan pertumbuhan yoy, penyesuaian musiman, persen)



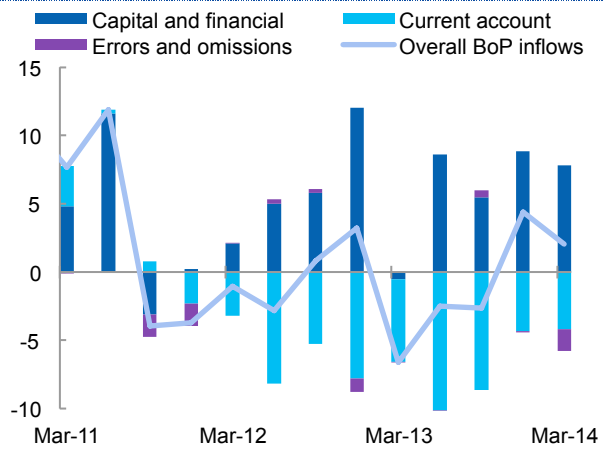
Sumber: BPS; Markit HSBC Purchasing Manager's Index

Lampiran Gambar 7: Arus volume perdagangan
(pertumbuhan yoy, persen)



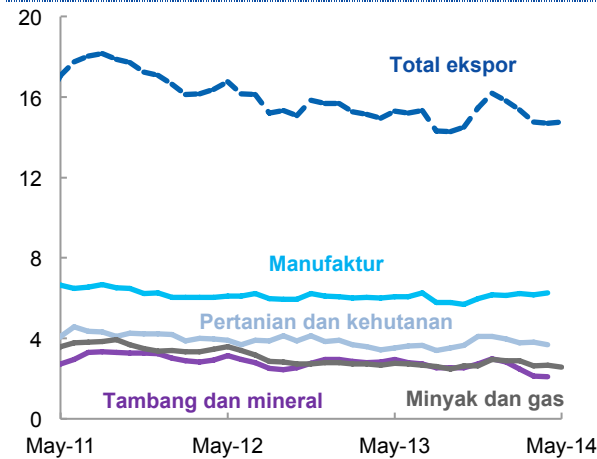
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran
(miliar dolar AS)



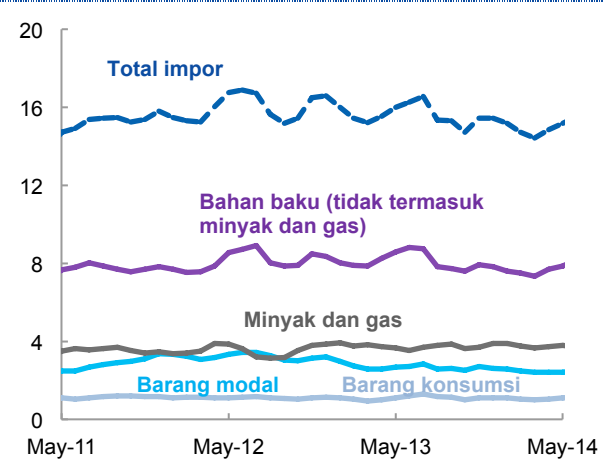
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



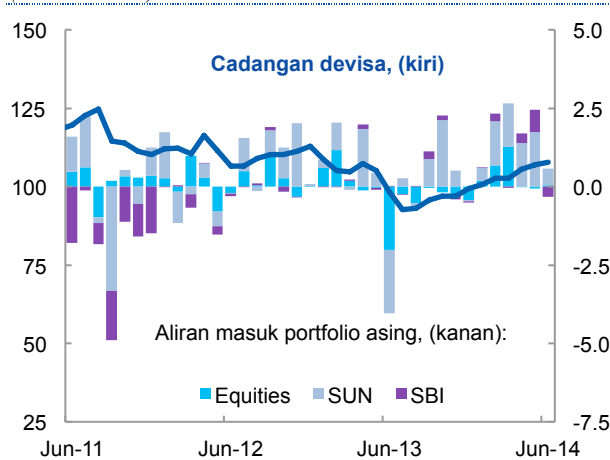
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



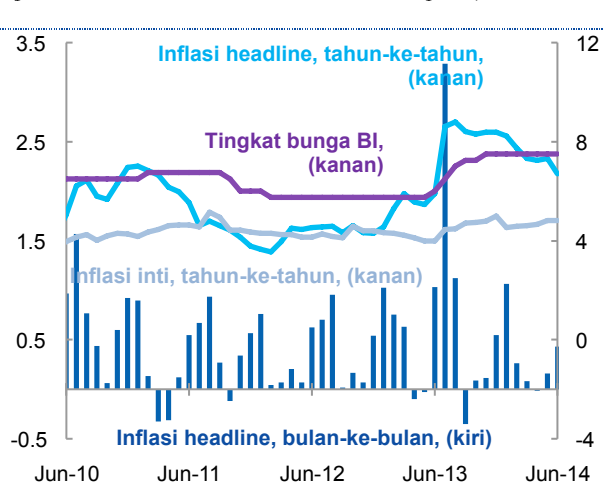
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal
(miliar dolar AS)



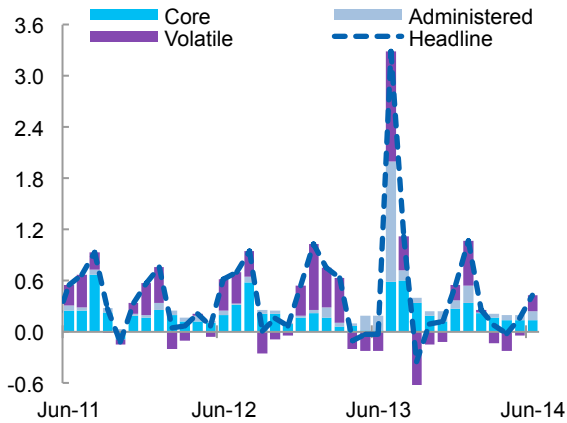
Sumber: BI; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter
(pertumbuhan bulan-ke-bulan dan tahun-ke-tahun, persen)



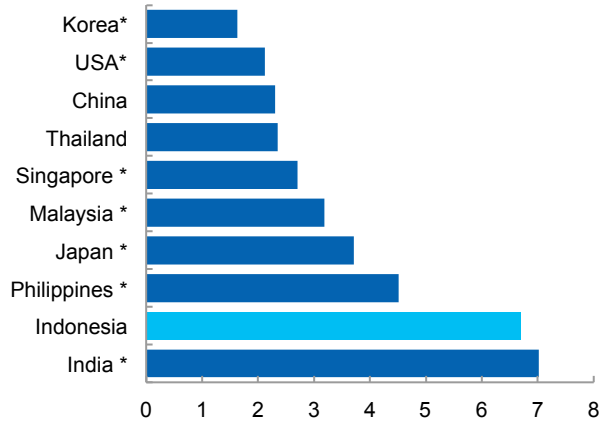
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK
(persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan)



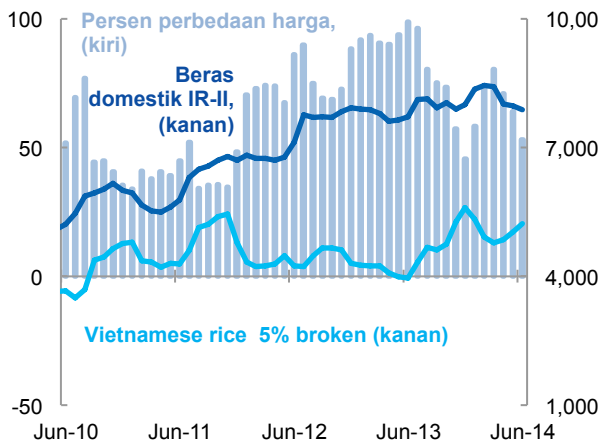
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara
(tabun-ke-tabun, Juni 2014)



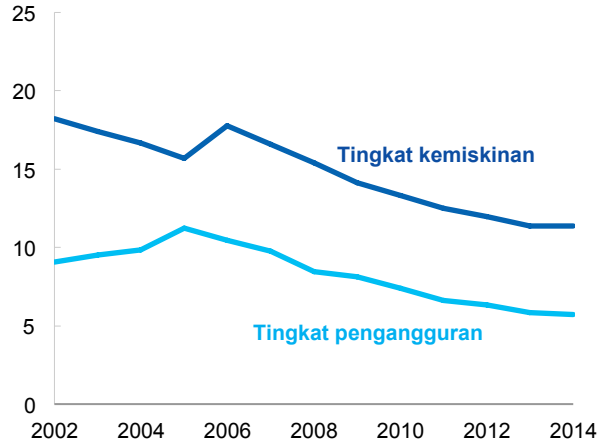
*data May
Sumber: Biro statistik nasional via CEIC; BPS

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional
(perbedaan harga persen kiri, harga kulakan Rp per kg, kanan)



Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO; Bank Dunia

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran
(persen)



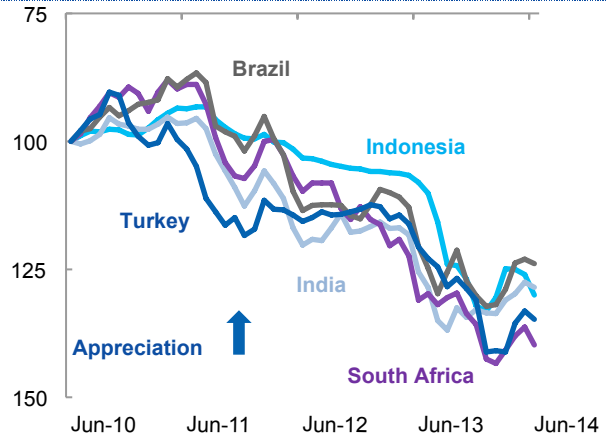
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional
(indeks harian January 4 2010=100)



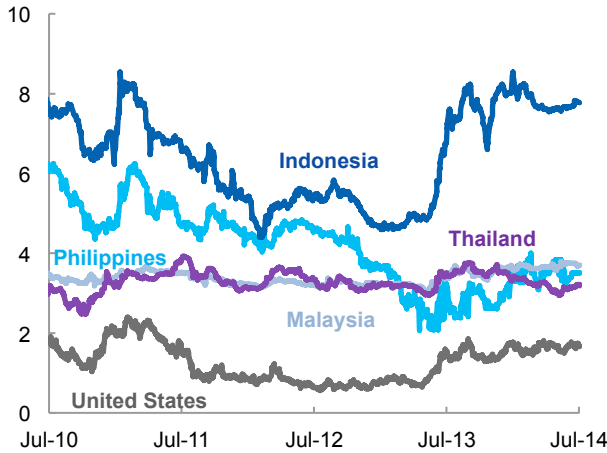
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS
(indeks bulanan, Juni 2010=100)



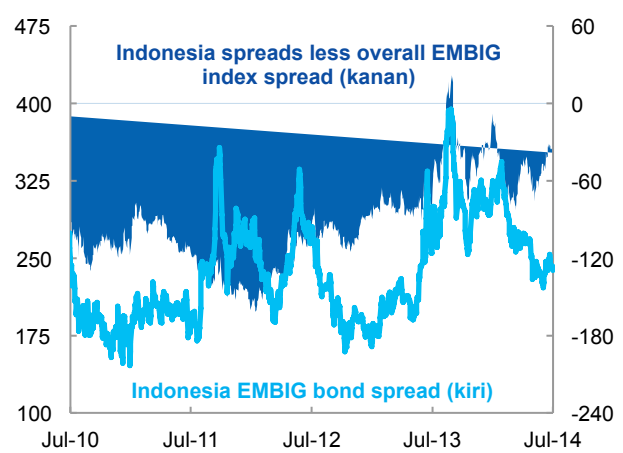
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal
(barisan, persen)



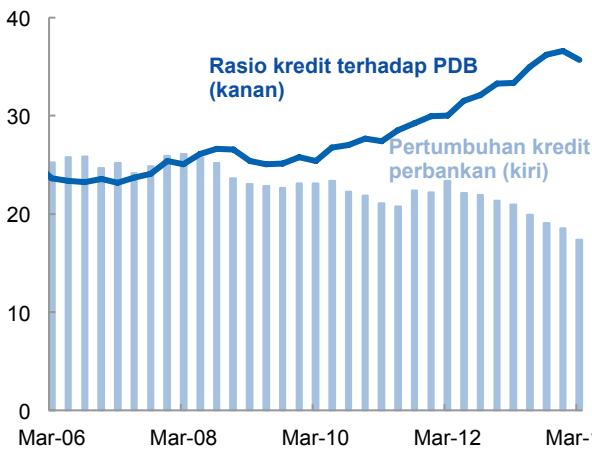
Sumber: CEIC;

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI
(barisan, basis poin)



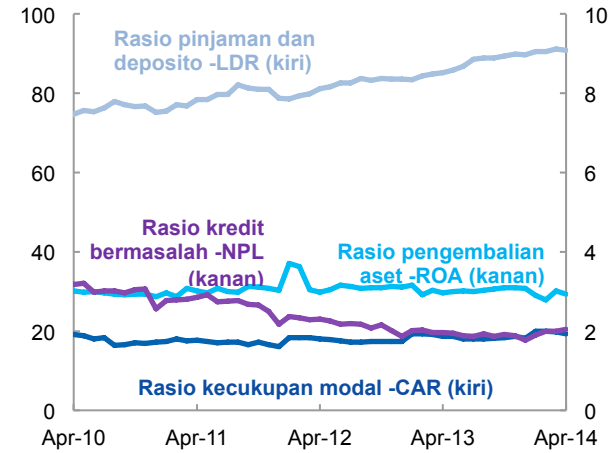
Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit perbankan komersial dan pedesaan
(bulanan, indeks Januari 2009=100)



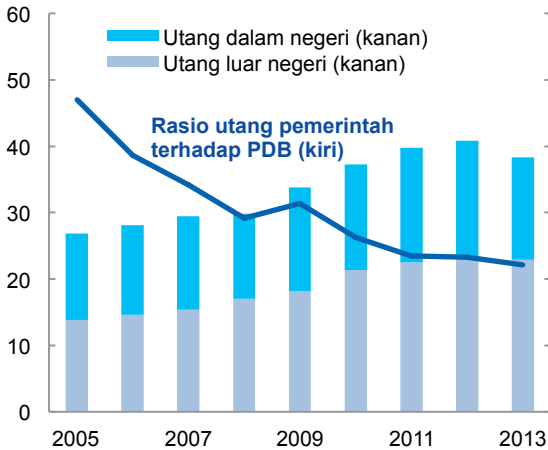
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan
(bulanan, persen)



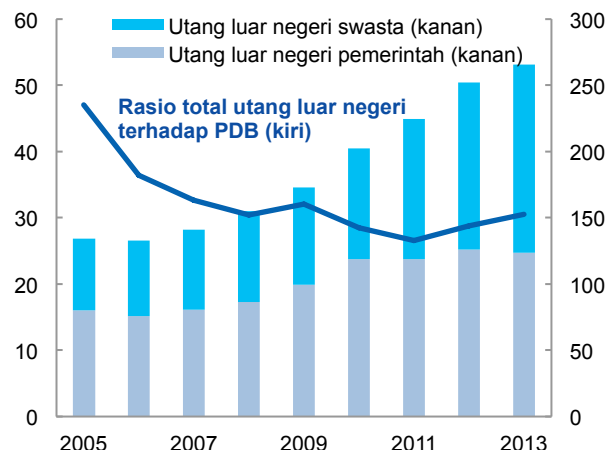
Sumber: BI

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah
(persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri
(persen terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah

(Rupiah trillion)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
	Aktual	Aktual	Aktual	Aktual	Aktual	APBN	APBN-P
A. Penerimaan negaran dan hibah	849	995	1,211	1,338	1,430	1,667	1,635
1. Penerimaan pajak	620	723	874	981	1,072	1,280	1,246
2. Penerimaan non-pajak	227	269	331	352	353	385	387
B. Pengeluaran	937	1,042	1,295	1,491	1,639	1,842	1,877
1. Pemerintah pusat	629	697	884	1,011	1,126	1,250	1,280
2. Transfer ke pemerintah daerah	309	345	411	481	513	593	597
C. Neraca primer	5	42	9	-53	-97	-54	-106
D. Surplus/defisit	-89	-47	-84	-153	-210	-175	-241
(persen dari PDB)	-1.6	-0.7	-1.1	-1.9	-2.2	-1.7	-2.4

Sumber: Kementerian keuangan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(Miliar dolar AS)

	2011	2012	2013	2012		2013				2014
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Neraca Pembayaran	11.9	0.2	-7.3	0.8	3.2	-6.6	-2.5	-2.6	4.4	2.1
<i>Persen dari PDB</i>	1.4	0.0	-0.8	0.4	1.5	-3.0	-1.1	-1.2	2.2	1.0
Neraca berjalan	1.7	-24.4	-29.1	-5.3	-7.8	-6.0	-10.1	-8.6	-4.3	-4.2
<i>Persen dari PDB</i>	0.2	-2.8	-3.3	-2.4	-3.6	-2.7	-4.5	-4.0	-2.1	-2.1
Neraca perdagangan	24.2	-1.7	-6.1	0.8	-2.4	-1.0	-4.1	-2.7	1.6	1.3
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-22.5	-22.7	-23.0	-6.1	-5.4	-5.0	-6.1	-6.0	-6.0	-5.5
Neraca modal & keuangan	13.6	24.9	22.4	5.8	12.0	-0.5	8.6	5.5	8.8	7.8
<i>Persen dari PDB</i>	1.6	2.8	2.6	2.6	5.5	-0.2	3.8	2.5	4.4	3.8
Investasi langsung	11.5	13.7	13.7	4.5	4.1	3.6	3.7	5.8	0.5	3.0
Investasi porfolio	3.8	9.2	9.8	2.5	0.2	2.8	3.4	1.9	1.8	9.0
Investasi lain	-1.8	1.9	-1.1	-1.2	7.7	-6.9	1.6	-2.3	6.5	-4.1
Kesalahan & pembulatan	-3.4	-0.3	-0.6	0.3	-1.0	-0.1	-1.0	0.5	-0.1	-1.6
Cadangan devisa*	110.1	112.8	99.4	110.2	112.8	104.8	98.1	95.7	99.4	102.6

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode

Sumber: BI; BPS

Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Neraca Nasional (% perubahan)¹								
PDB riil	9.0	8.4	4.9	5.7	6.2	6.5	6.3	5.8
Investasi riil	25.3	22.6	11.4	10.9	8.5	8.3	9.7	4.7
Konsumsi riil	23.2	21.7	4.6	4.3	4.1	4.5	4.8	5.2
Swasta	23.9	22.7	3.7	4.0	4.7	4.7	5.3	5.3
Pemerintah	18.8	14.7	14.2	6.6	0.3	3.2	1.3	4.9
Ekspor riil, barang dan jasa	22.5	18.0	30.6	16.6	15.3	13.6	2.0	5.3
Impor riil, barang dan jasa	30.2	29.6	26.6	17.8	17.3	13.3	6.7	1.2
Investasi (% PDB)	28	28	20	24	32	32	33	32
Nominal PDB (milyar dolar AS)	114	202	165	286	709	846	877	868
PDB per capita (dolar AS)	636	1035	804	1,300	2,984	3,467	3,546	3,468
Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)²								
Penerimaan dan hibah	18.8	15.2	20.8	17.8	15.5	16.3	16.2	15.3
Penerimaan bukan pajak	1.0	4.8	9.0	5.3	4.2	4.5	4.3	3.8
Penerimaan pajak	17.8	10.3	11.7	12.5	11.3	11.8	11.9	11.5
Pengeluaran	11.8	13.9	22.4	18.4	16.2	17.4	18.1	17.5
Konsumsi	..	3.9	4.0	3.0	3.8	4.0	4.1	4.2
Modal	..	4.6	2.6	1.2	1.3	1.6	1.8	1.8
Bunga pinjaman	..	1.4	5.1	2.3	1.4	1.3	1.2	1.2
Subsidi	6.3	4.3	3.0	4.0	4.2	3.8
Surplus/defisit	0.4	1.3	-1.6	-0.6	-0.7	-1.1	-1.9	-2.2
Utang Pemerintah	41.9	32.3	85.9	47.0	26.3	23.5	23.3	22.1
Utang luar negeri pemerintah	41.9	32.3	45.1	22.0	9.6	8.0	7.2	6.7
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	61.0	61.5	87.1	47.1	28.5	26.6	28.8	30.5
Neraca Pembayaran (% PDB)³								
Neraca pembayaran keseluruhan	0.2	4.3	1.4	0.0	-0.7
Neraca transaksi berjalan	-2.6	3.2	4.8	0.1	0.7	0.2	-2.8	-3.3
Ekspor, barang dan jasa	25.6	26.2	42.8	35.0	24.7	26.2	24.1	23.7
Impor, barang dan jasa	24.0	26.9	33.9	32.0	21.6	23.3	24.3	24.4
Transaksi berjalan	1.6	-0.8	8.9	2.9	3.0	2.9	-0.2	-0.7
Neraca transaksi keuangan	0.0	3.7	1.6	2.8	2.6
Penanaman modal langsung, neto	1.0	2.2	-2.8	1.8	1.6	1.4	1.6	1.6
Cadangan devisa bruto (USD billion)	8.7	14.9	29.4	34.7	96.2	110.1	112.8	99.4
Moneter (% change)³								
Deflator PDB ¹	7.7	9.9	20.4	14.3	8.3	8.1	4.4	4.4
Suku bunga Bank Indonesia (%)	9.1	6.5	6.6	5.8	6.5
Kredit domestik	28.7	17.5	24.4	24.2	22.1
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) ⁴	1,843	2,249	8,422	9,705	9,090	8,770	9,387	10,461
Harga-harga (% perubahan)¹								
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.9	9.0	9.4	17.1	7.0	3.8	4.3	8.4
Indeks harga konsumen (rata-rata)	7.7	9.4	3.7	10.5	5.1	5.4	4.3	7.0
Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel) ⁵	..	17	28	53	79	112	113	107

Source: ¹ BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia; ² Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia (untuk 1995 menggunakan tahun dasar FY 1995/1996; untuk tahun 2000 hanya 9 bulan); ³ Bank Indonesia; ⁴ IMF; ⁵ CEIC

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Kependudukan¹								
Penduduk (juta)	184	199	213	227	241	244	247	250
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.7	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	31	36	42	46	50	51	51	52
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	67	61	55	54	53	53	52	52
Angkatan Kerja²								
Angkatan kerja, total (juta)	75	84	98	106	117	117	120	120
Laki-laki	46	54	60	68	72	73	75	75
Perempuan	29	31	38	38	45	44	46	45
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	55	43	45	44	38	36	35	35
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	14	19	17	19	19	21	22	20
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	31	38	37	37	42	43	43	45
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	2.5	7.0	8.1	11.2	7.1	7.4	6.1	6.2
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan³								
Konsumsi rumah tangga, median (Rp.000)	104	211	374	421	446	487
Garis kemiskinan nasional (Rp.000)	73	129	212	234	249	272
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	35	31	30	29	28
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19.1	16.0	13.3	12.5	12.0	11.4
Di perkotaan	14.6	11.7	9.9	9.2	8.8	8.4
Di perdesaan	22.4	20.0	16.6	15.7	15.1	14.3
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	13.3	11.0	10.2	9.5	9.2
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	12.8	9.5	9.7	8.8	8.6
GINI indeks	0.30	0.35	0.38	0.41	0.41	0.41
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	8.7	7.9	7.4	7.5	7.4
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	41.4	40.6	46.5	46.7	47.3
Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) ⁴	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% APBN) ⁴	2.4	2.4	2.3	2.3	3.3
Kesehatan dan Gizi¹								
Tenaga kesehatan (per 1,000 people)	0.14	0.16	0.16	0.13	0.29	..	0.20	..
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun)	98	67	52	42	34	32	31	..
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup)	27	26	22	19	16	16	15	..
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	67	51	41	34	28	27	26	..
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	600	420	340	270	210	190
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun)	..	63	74	77	75	74	80	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP)	..	1.8	2.0	2.8	2.9	2.9	3.0	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP)	..	0.7	0.7	0.9	1.1	1.1	1.2	..
Pendidikan³								
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	92	92	92	93	92
APM perempuan (% dari total partisipasi)	48	48	49	49	50
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	52	61	60	60	61
APM perempuan (% dari total partisipasi)	50	50	50	49	50
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	9	16	14	15	16
APM perempuan (% dari total partisipasi)	55	53	50	54	54
Angka melek huruf Dewasa (%)	91	91	91	92	93
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) ⁴	2.7	3.2	3.4	3.4	3.6
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) ⁴	14.5	20.0	19.7	18.8	19.0
Air Bersih dan Kesehatan lingkungan¹								
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)	70	74	78	81	84	84	84.9	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	91	91	92	93	93	93.0	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	61	65	68	71	75	76	76.4	..
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	32	38	44	53	57	59	58.8	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	56	60	64	70	70	73	71.4	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	21	26	30	38	44	44	45.5	..
Lainnya¹								
Pengurangan resiko bencana, penilaian (skala 1-5; 5=terbaik)	3.3
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) ⁶	8	11	18	18.2	18.6	..

Source: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS (Susenas) and Bank Dunia; ⁴ Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia, termasuk pengeluaran untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, PKH; ⁵ Inter-Parliamentary Union



Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.